

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin serta rahmat-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan I Tahun 2026” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik *makro* maupun *mikro* serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai, program dan kegiatan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Cilacap, 17 April 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,

Imas Masriah, S.Pi., M.Pi.
NIP. 19750414 200212 2 003



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan.....	2
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	3
Keragaan Pegawai.....	8
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2026.....	13
PERENCANAAN KINERJA.....	15
Rencana Strategis KKP.....	15
Visi.....	16
Misi.....	16
Tujuan.....	17
Sasaran.....	17
Rencana Kerja Tahun 2026.....	17
Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	18
Pengukuran Kinerja.....	20
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
Capaian Kinerja Organisasi.....	22
Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	23
Capaian IKU PPS Cilacap.....	23
Nilai PNBP.....	27
Volume Produksi Perikanan Tangkap.....	30
Tingkat Kinerja Pelabuhan.....	32
Nilai Pengendalian Lingkungan.....	34
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.....	37
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja.....	39
Persentase Rencana Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP.....	41
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.....	43
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2026.....	45
PENUTUP.....	46
Kesimpulan.....	46
Saran.....	47
Tindaklanjut Laporan Kinerja Tahun 2025.....	48
Penutup.....	49
LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG.....	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rencana Kerja PPS Cilacap TA 2026.....	17
Tabel 2 Perjanjian Kinerja PPS Cilacap TA 2026	19
Tabel 3 Bobot validasi IKU.....	20
Tabel 4 Klasifikasi target indikator kinerja	21
Tabel 5 Status Capaian Nilai Kinerja	21
Tabel 6 Capaian IKU PPS Cilacap Triwulan I Tahun 2026.....	27
Tabel 7 Capaian IKU 1 Triwulan I Tahun 2026.....	28
Tabel 8 Capaian IKU 2 Triwulan I Tahun 2026.....	30
Tabel 9 Capaian IKU 4 Triwulan I Tahun 2026.....	33
Tabel 10 Capaian IKU 7 Triwulan IV Tahun 2026	35
Tabel 11 Capaian IKU 8 Triwulan I Tahun 2026.....	38
Tabel 12 Capaian IKU 11 Triwulan I Tahun 2026.....	39
Tabel 13 Capaian IKU 14 Triwulan I Tahun 2026.....	42
Tabel 14 Capaian IKU 18 Triwulan I Tahun 2026.....	43

DAFTAR GAMBAR

Halaman

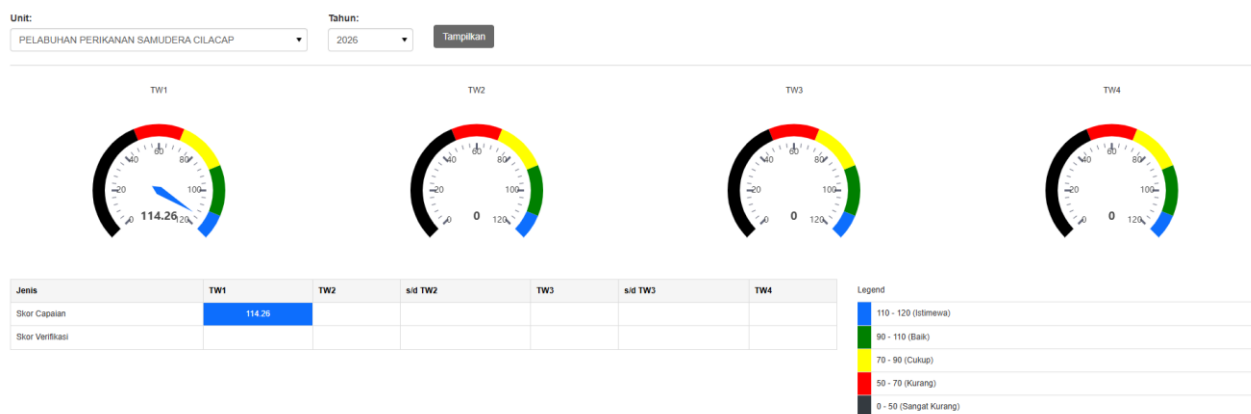
Gambar 1 Struktur Organisasi PPS Cilacap Tahun 2026	4
Gambar 2 Diagram Pie Status Pegawai PPS Cilacap.....	8
Gambar 3 Diagram Pie Struktur Pegawai PPS Cilacap	9
Gambar 4 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di PPS Cilacap	10
Gambar 5 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Umum di PPS Cilacap	11
Gambar 6 Diagram Pie Tingkat Pendidikan Pegawai di PPS Cilacap	12
Gambar 7 Diagram pie perbandingan gender pegawai di PPS Cilacap.....	13
Gambar 8 Nilai Kinerja PPS Cilacap Periode Triwulan I Tahun 2026.....	22
Gambar 9 <i>Screen shot</i> Aplikasi SIDAK	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) merupakan unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap tanggal 30 Desember 2020.

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029, yang diikuti dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Tahunan secara konsisten, terus menerus, dan berkesinambungan PPS Cilacap berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Kegiatan. Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

PPS Cilacap telah menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam Tahun 2026. Kelima sasaran kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan rincian 8 (delapan) indikator kinerja dengan periode pengukuran triwulanan, 3 (tiga) indikator kinerja semesteran, dan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan periode perhitungan tahunan. Periode Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa dari lima sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tercapai dengan baik dalam pencapaian progres kegiatan. Capaian kinerja tersebut tercermin dalam hasil pengukuran melalui aplikasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id), di mana PPS Cilacap mencatatkan nilai capaian sebesar 114,26% pada Triwulan I. Nilai tersebut berada dalam kategori “Istimewa” (rentang nilai 110-120) dan ditandai dengan indikator berwarna biru, dengan rincian sebagai berikut:



Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Sasaran Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2026, pada periode Triwulan I dapat tercapai dengan rincian sebagai berikut :

1. IKU 1 – Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak Rp. 1301,79 Juta atau 120,00% dari target Triwulan I yaitu Rp. 873,101 Juta;
2. IKU 2 – Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak 6.084,93 Ton atau 120% dari target Triwulan I yaitu 5.000 Ton;
3. IKU 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai dengan Nilai 94,67 atau sebesar 112,70% dari target Triwulan I yaitu Nilai 84;
4. IKU 7 – Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Nilai 86,94 atau sebesar 120% dari target Triwulan I yaitu Nilai 33;
5. IKU 8 – Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan tercapai sebanyak 1.322 Kapal atau 100,61% dari target Triwulan I yaitu 1.314 Kapal;
6. IKU 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100% atau 116,28% dari target Triwulan I yaitu 86%;
7. IKU 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai 100 Persen atau 120,00% dari target Triwulan I yaitu 77%;
8. IKU 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Nilai 96,70 atau 108,90% dari target Triwulan I yaitu Nilai 88,8.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Cilacap Triwulan I Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori sangat baik dan menunjukkan tingkat pencapaian yang melampaui target. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi PPS Cilacap dalam mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak, optimalisasi produksi perikanan tangkap, peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan dan kesyahbandaran, serta penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan berorientasi hasil.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja PPS Cilacap dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen PPS Cilacap dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) atau Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan PPS Cilacap.

PPS Cilacap sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP. Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah menetapkan rencana kerja tahun 2026, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj PPS Cilacap untuk periode Triwulan I Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban oleh PPS Cilacap. Acuan dalam penyusunan LKj PPS Cilacap Tahun 2026 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) PPS Cilacap Triwulan I Tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan tangkap. Laporan ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar perbaikan kinerja di masa mendatang. Melalui pelaporan yang terukur, terarah, dan berlandaskan regulasi yang berlaku, PPS Cilacap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan

PPS Cilacap sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Negara telah menetapkan target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut kemudian disusun dalam Laporan Kinerja PPS Cilacap sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja PPS Cilacap Triwulan I Tahun 2026 ini, yaitu:

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan PPS Cilacap kepada DJPT;
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PPS Cilacap pada Triwulan I Tahun 2026 dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya; dan
3. sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

PPS Cilacap mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap tanggal 30 Desember 2020.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS Cilacap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Adapun susunan organisasi PPS Cilacap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi PPS Cilacap Tahun 2026

1. Subbagian Umum.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK PPS Cilacap;
- b. Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparatur pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup PPS Cilacap;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup PPS Cilacap;
- d. Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup PPS Cilacap;
- e. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Cilacap;
- f. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Cilacap;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup PPS Cilacap;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup PPS Cilacap;
- i. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup PPS Cilacap;
- j. Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup PPS Cilacap;
- k. Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup PPS Cilacap;
- l. Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup PPS Cilacap;

- m. Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di PPS Cilacap;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di PPS Cilacap;
- o. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup PPS Cilacap;
- p. Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup PPS Cilacap;
- q. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup PPS Cilacap.

2. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tergabung dalam Tim Kerja lingkup PPS Cilacap sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Cilacap Nomor B.48/PPC/KP.440/I/2026 tanggal 2 Januari 2026.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, telah dibentuk tim kerja dengan ketua tim kerja sebagaimana ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.48/PPC/KP.440/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Tim Kerja lingkup PPS Cilacap sebagai berikut:

a. Tim Kerja Operasional Pelabuhan;

Tim Kerja Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Operasional Pelabuhan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan data dan statistik PPS Cilacap;
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja PPS Cilacap ;
- Melakukan evaluasi terkait kinerja PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional PPS Cilacap;
- Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP.

b. Tim Kerja Kesyahbandaran;

Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kapal perikanan dan kesyahbandaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Kesyahbandaran menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di PPS Cilacap;

- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pemeriksaan *Log Book* di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PPS Cilacap;
- Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di PPS Cilacap;
- Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawasan Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di PPS Cilacap.

c. Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana;

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan data/informasi yang terkait dengan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;

- Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana prasarana di PPS Cilacap;
- Melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan di PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan oleh pelabuhan perikanan sendiri ataupun oleh pihak swasta;
- Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap.

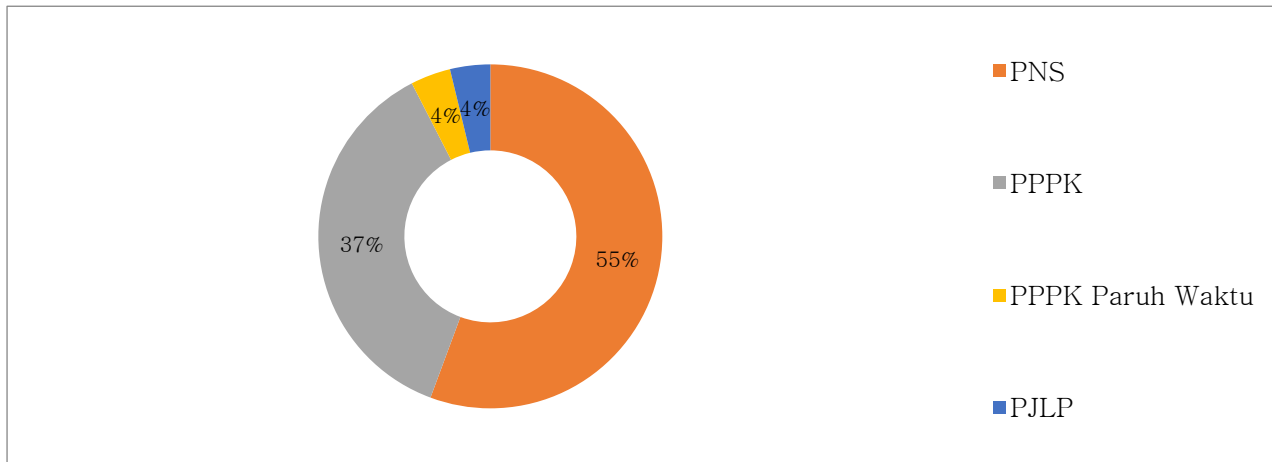
d. Tim Kerja Pelayanan Usaha;

Tim Kerja Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemanfaatan di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Pelayanan Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan pengusahaan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan analisis atas rencana kerja pengusahaan (investasi) di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Menyiapkan tagihan pemanfaatan jasa/layanan di PPS Cilacap.

Keragaan Pegawai

Berdasarkan Gambar 2, jumlah pegawai di lingkungan PPS Cilacap per 1 April 2026 tercatat sebanyak 106 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 59 orang ($\pm 55\%$), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 39 orang ($\pm 37\%$), PPPK Paruh Waktu sebanyak 4 orang ($\pm 4\%$), serta Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 4 orang ($\pm 4\%$).



Gambar 2 Diagram Pie Status Pegawai PPS Cilacap

Struktur kepegawaian tersebut masih didominasi oleh PNS. Kondisi ini menunjukkan peran utama PNS dalam menjaga kesinambungan kelembagaan serta pelaksanaan tugas strategis pelabuhan. Dominasi tersebut juga sejalan dengan pengisian jabatan struktural oleh PNS dalam menjalankan fungsi manajerial dan pengambilan kebijakan.

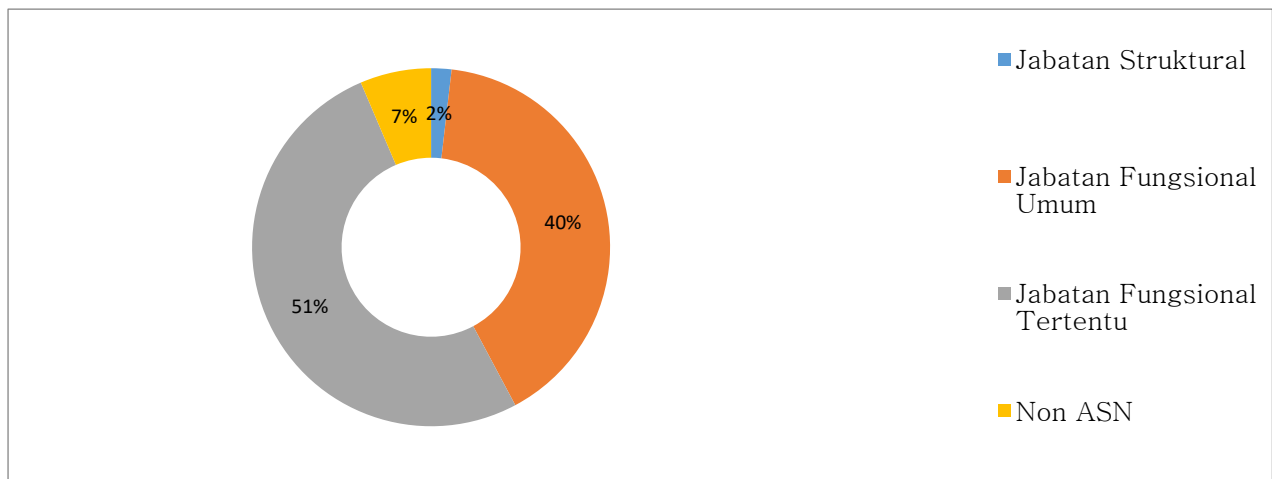
Di sisi lain, proporsi PPPK yang mencapai lebih dari sepertiga dari total pegawai mencerminkan penguatan sumber daya manusia pada jabatan fungsional dan teknis. Penguatan ini bersifat adaptif terhadap kebutuhan operasional pelabuhan serta menjadi indikator transformasi manajemen kepegawaian menuju peningkatan efektivitas kerja dan optimalisasi pelayanan publik. Sebagian besar PPPK tersebut dapat dikategorikan dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang memerlukan keahlian khusus, serta sebagian lainnya dalam Jabatan Fungsional Umum.

Sementara itu, keberadaan PJLP yang mencapai sekitar 4% berperan sebagai pendukung kegiatan operasional harian, khususnya pada aspek teknis dan administratif yang memerlukan tingkat fleksibilitas tinggi. Kelompok ini termasuk dalam kategori non-ASN dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan operasional tanpa ikatan kepegawaian tetap.

Dengan komposisi tersebut, PPS Cilacap memiliki struktur sumber daya manusia yang relatif seimbang antara pegawai tetap, tenaga profesional kontraktual, dan tenaga pendukung. Keseimbangan ini memungkinkan pelabuhan

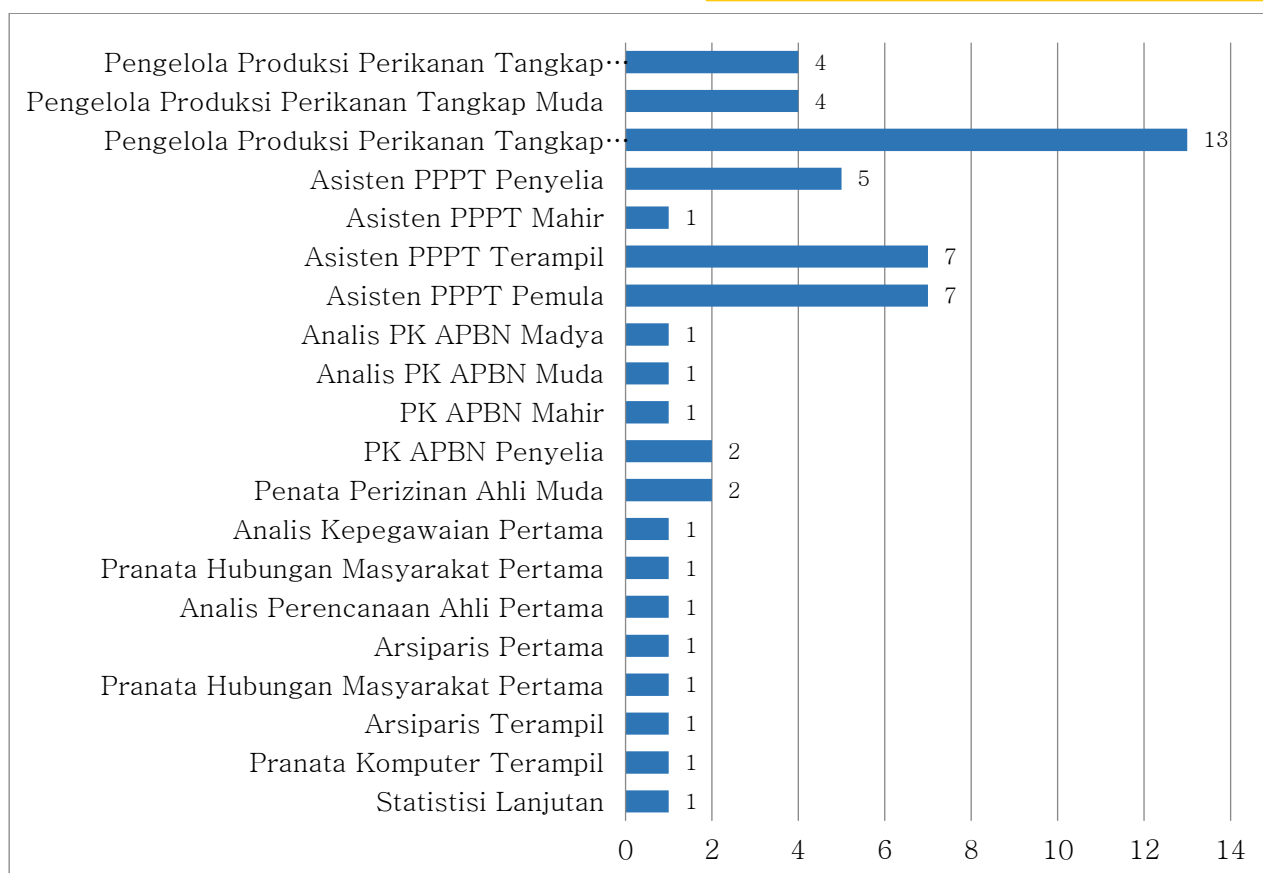
untuk beradaptasi terhadap dinamika operasional serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Berdasarkan Gambar 3, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di PPS Cilacap didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 56 orang ($\pm 51\%$), diikuti Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 44 orang ($\pm 40\%$). Sementara itu, Non ASN berjumlah 4 orang ($\pm 7\%$) dan Jabatan Struktural sebanyak 2 orang ($\pm 2\%$). Struktur tersebut mencerminkan orientasi kinerja PPS Cilacap yang kuat pada fungsi teknis dan profesional, di mana sebagian besar pegawai berperan langsung dalam mendukung kegiatan operasional pelabuhan serta pelayanan publik di sektor perikanan tangkap.



Gambar 3 Diagram Pie Struktur Pegawai PPS Cilacap

Dominasi JFT menunjukkan penekanan pada kompetensi keahlian dan kinerja berbasis profesi. Penekanan ini sejalan dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Jabatan fungsional tertentu juga berperan penting dalam menjamin penerapan standar teknis dan operasional di lapangan, khususnya pada bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap. Sebanyak 19 jenis jabatan fungsional tertentu aktif di PPS Cilacap. Jumlah terbanyak berada pada jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama, yaitu 13 orang. Kelompok ini menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan teknis pelabuhan.



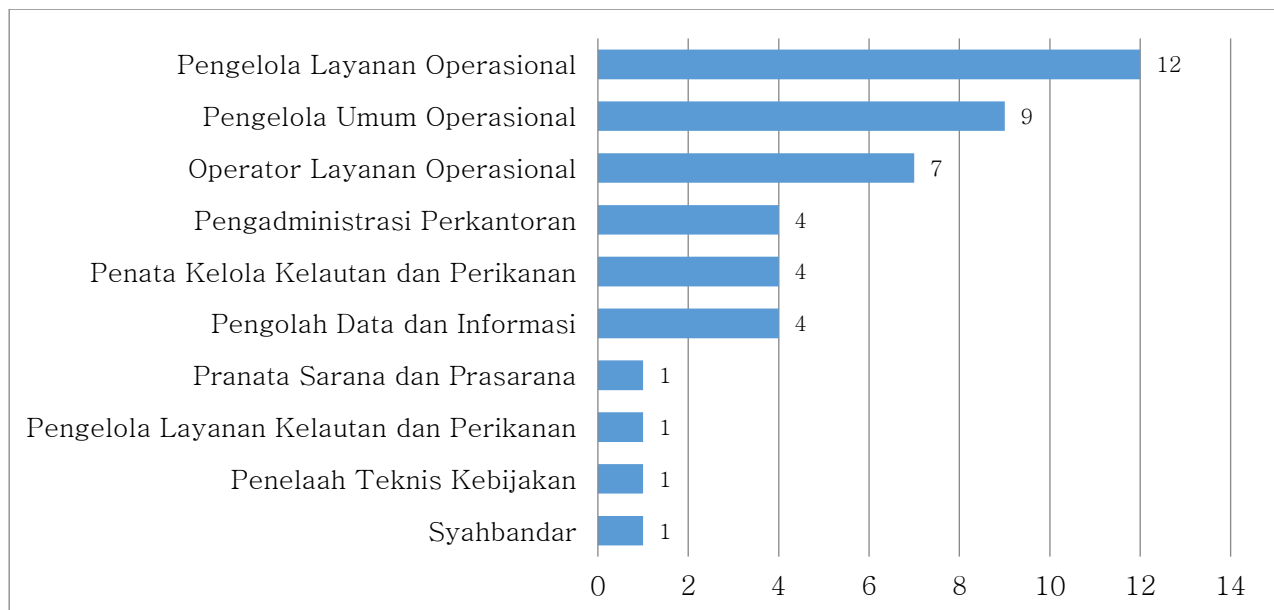
Gambar 4 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di PPS Cilacap

Apabila ditinjau lebih lanjut pada rincian Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) seperti yang terlihat pada gambar 4, dapat diketahui bahwa struktur jabatan didominasi oleh kelompok jabatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional lapangan. Jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama merupakan yang terbanyak dengan 13 orang, diikuti oleh Asisten Produksi Perikanan Tangkap Pemula dan Terampil masing-masing sebanyak 7 orang, serta Asisten Produksi Perikanan Tangkap Penyelia sebanyak 5 orang. Selain itu, terdapat Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda dan Madya masing-masing sebanyak 4 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa kekuatan utama SDM fungsional PPS Cilacap berada pada aspek produksi, pembinaan, dan pendampingan kegiatan perikanan tangkap.

Di sisi lain, jabatan yang berkaitan dengan fungsi pendukung organisasi seperti perencanaan, kepegawaian, dan penganggaran, antara lain Analisis Perencanaan, Analisis Kepegawaian, serta Analisis PK APBN memiliki jumlah yang relatif terbatas, yaitu berkisar antara 1-2 orang pada setiap jenjang jabatan. Demikian pula jabatan pendukung lainnya seperti Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pranata Hubungan Masyarakat, yang masing-masing hanya diisi oleh satu orang. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi administratif dan manajerial tetap berjalan, namun dengan proporsi yang lebih efisien dibandingkan fungsi teknis operasional.

Secara keseluruhan, komposisi dan struktur sumber daya manusia PPS Cilacap mencerminkan keseimbangan antara pegawai tetap, tenaga profesional berbasis keahlian, dan tenaga pendukung operasional. Struktur ini menunjukkan orientasi kelembagaan yang berfokus pada penguatan fungsi teknis dan pelayanan publik, sekaligus tetap menjaga efektivitas tata kelola organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

Selanjutnya, berdasarkan Gambar 5, komposisi Jabatan Fungsional Umum (JFU) di PPS Cilacap menunjukkan sebaran yang cukup beragam, dengan dominasi pada jabatan yang mendukung operasional layanan pelabuhan. Jabatan dengan jumlah terbesar adalah Pengelola Layanan Operasional sebanyak 12 orang, diikuti oleh Pengelola Umum Operasional sebanyak 9 orang, serta Operator Layanan Operasional sebanyak 7 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan operasional menjadi salah satu penopang utama dalam kegiatan pelabuhan. Selain itu, terdapat beberapa jabatan dengan jumlah menengah, yaitu Pengadministrasi Perkantoran, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, serta Pengolah Data dan Informasi, masing-masing sebanyak 4 orang. Kelompok ini berperan dalam mendukung kelancaran administrasi, pengelolaan data, serta tata kelola kegiatan di sektor kelautan dan perikanan.

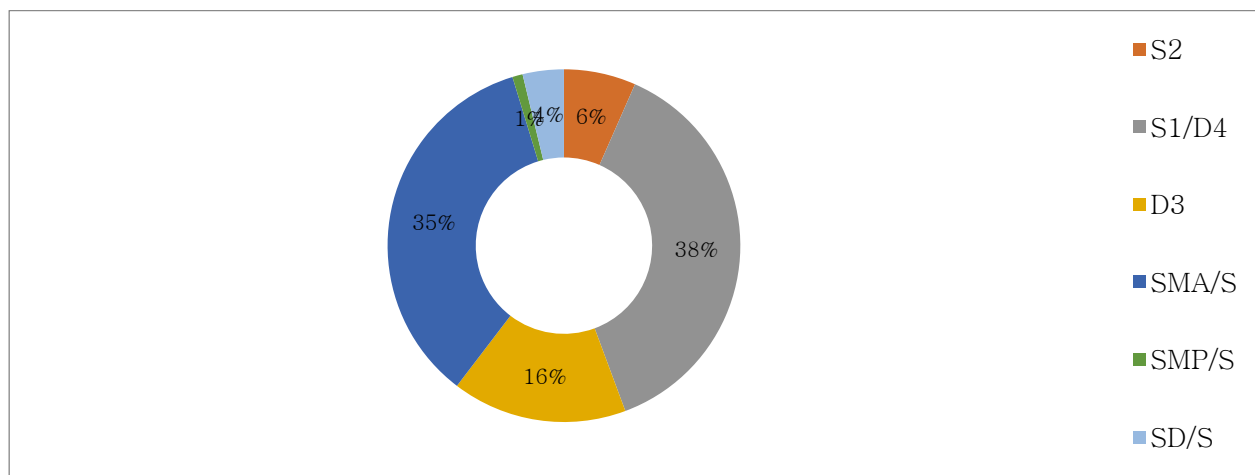


Gambar 5 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Umum di PPS Cilacap

Di sisi lain, terdapat beberapa jabatan dengan jumlah yang relatif terbatas, seperti Pranata Sarana dan Prasarana, Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan, Penelaah Teknis Kebijakan, serta Syahbandar, yang masing-masing hanya diisi oleh 1 orang. Keberadaan jabatan-jabatan ini meskipun terbatas tetap memiliki peran strategis, khususnya dalam mendukung aspek teknis tertentu, pengambilan kebijakan, serta fungsi pengawasan dan keselamatan operasional pelabuhan.

Secara keseluruhan, struktur JFU di PPS Cilacap mencerminkan dukungan yang kuat terhadap fungsi operasional dan pelayanan, dengan distribusi pegawai yang menyesuaikan kebutuhan aktivitas pelabuhan. Kombinasi antara jabatan operasional, administratif, dan teknis ini memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas serta mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh.

Berdasarkan gambar yang disajikan pada gambar 6, komposisi tingkat pendidikan pegawai dapat dianalisis secara bertingkat. Data menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jenjang pendidikan tinggi, dengan jumlah terbesar di tingkat S1/D4 sebanyak 40 orang ($\pm 38\%$), diikuti secara signifikan oleh lulusan D3 sebanyak 17 orang ($\pm 16\%$), dan SMA/SMK sebanyak 37 orang ($\pm 35\%$). Adanya sejumlah pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 7 orang ($\pm 6\%$) juga menandakan bahwa PPS Cilacap telah memiliki basis tenaga ahli yang mampu mendorong analisis kebijakan dan inovasi di tingkat yang lebih strategis. Sementara itu, representasi pendidikan pada tingkat SMP/S dan SD/S menunjukkan keberagaman latar belakang sumber daya manusia yang ada.



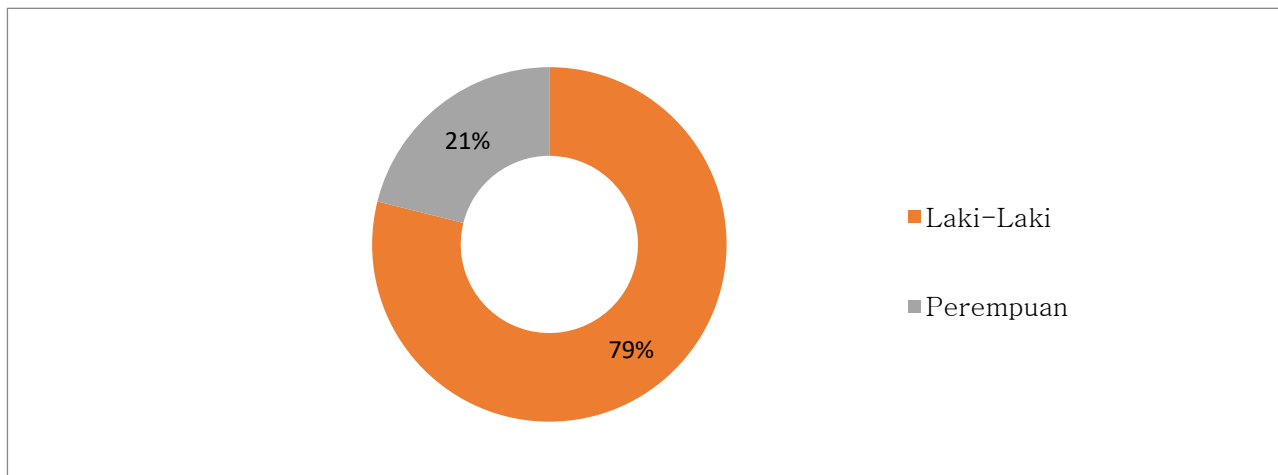
Gambar 6 Diagram Pie Tingkat Pendidikan Pegawai di PPS Cilacap

Distribusi pendidikan ini mencerminkan bahwa PPS Cilacap memiliki modal intelektual yang kuat untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis, operasional, dan administratif secara profesional. Dominasi lulusan diploma dan sarjana mengindikasikan kesiapan SDM dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian spesifik serta kemampuan adaptasi terhadap sistem dan teknologi modern. Keberadaan pegawai dengan pendidikan lebih tinggi (S2) juga menjadi aset berharga untuk pengembangan organisasi, perencanaan strategis, dan peningkatan kualitas layanan.

Dengan komposisi seperti ini, instansi dapat lebih mudah menerapkan sistem pelatihan dan pengembangan yang terstruktur, serta mendorong peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu adanya program pembinaan karir dan alih pengetahuan yang menjembatani

perbedaan tingkat pendidikan, sehingga seluruh pegawai dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan bidang dan jenjang masing-masing.

Dari aspek gender (gambar 7), proporsi pegawai laki-laki masih mendominasi sebesar 84 orang atau 79%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 22 orang atau 21%. Meskipun terjadi ketimpangan gender, namun peran perempuan tetap signifikan dalam mendukung kegiatan organisasi, baik pada aspek administratif maupun teknis.



Gambar 7 Diagram pie perbandingan gender pegawai di PPS Cilacap

Secara keseluruhan, keragaan pegawai di PPS Cilacap mencerminkan struktur SDM yang cukup solid dan berpotensi besar untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan komposisi kepegawaian yang didominasi oleh tenaga fungsional serta tingkat pendidikan yang relatif tinggi, PPS Cilacap memiliki modal sumber daya manusia yang strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan efektivitas pengelolaan pelabuhan perikanan ke depan. Optimalisasi kapasitas, pemerataan tugas sesuai kompetensi, serta peningkatan profesionalisme pegawai menjadi kunci penting dalam mendorong kemajuan organisasi secara berkelanjutan.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2026

Sistem Penyajian Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban yang dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mengenai keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini berisi pertanggungjawaban kinerja PPS Cilacap dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2026 sendiri dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2026 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana dan atau penetapan kinerja (komitmen

kinerja) yang telah dilakukan akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan membandingkan hasil. Demikian pula akan disajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun berjalan, selain juga melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Dalam mengaitkan dengan anggaran maka, realisasinya akan digunakan untuk membahas perwujudan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun sistemetika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang PPS Cilacap seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di PPS Cilacap.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja PPS Cilacap Tahun 2026 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis KKP

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Peran strategis tersebut selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pengelolaan laut dan perikanan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis kesejahteraan, sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, maka peran sektor kelautan dan perikanan adalah *engine growth* bagi pertumbuhan ekonomi tinggi yang diwujudkan melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan sumber pertumbuhan baru sehingga dapat memberikan peningkatan nilai tambah dan *multiplier effect* yang besar. Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 0%, maka pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan secara inklusif dan merata dengan menysasar nelayan, pembudi daya, petambak garam, pengolah, pemasar, dan masyarakat di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana akibat ancaman perubahan iklim. Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM dicapai melalui pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan vokasi serta penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM kelautan dan perikanan. Upaya tersebut diperkuat dengan penerapan standarisasi dan sertifikasi guna memastikan tenaga kerja yang ada memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan industri, berdaya saing tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah ke depan, paradigma lama yang hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan perlu ditinggalkan. Sebagai landasan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan, diterapkan paradigma ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Pendekatan ini menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengendalian tekanan terhadap ekosistem, peningkatan nilai tambah, serta pemanfaatan teknologi secara terukur, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya produktif, tetapi juga mampu menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Sejalan dengan prinsip tersebut, ekonomi biru menjadi pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Paradigma ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, serta diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota; (3) pengembangan Perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) dilakukan secara komprehensif untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran nasional. Renstra menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan Renstra KKP tahun 2025-2029, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan guna mengidentifikasi peluang pengembangan di masa mendatang. Selain itu, berbagai permasalahan yang masih menghambat pembangunan sektor ini juga dikaji secara komprehensif. Analisis tersebut dilengkapi dengan telaah lingkungan strategis, baik nasional maupun global, yang berpotensi mempengaruhi arah pembangunan kelautan dan perikanan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Visi

Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Misi

Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang KKP maka KKP memiliki peran strategis dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Tujuan

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Sasaran

PPS Cilacap memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2026 dengan mengacu pada sasaran program DJPT yang diturunkan dari sasaran strategis KKP yaitu:

- SK-1 Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- SK-2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat
- SK-3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
- SK-4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- SK-5 Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja PPS Cilacap Tahun Anggaran 2026 disajikan pada Tabel 1.

No	Kegiatan	Pagu
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	102.625.306.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	16.751.657.000
TOTAL		119.376.963.000

Tabel 1 Rencana Kerja PPS Cilacap TA 2026

Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Pada Tahun 2026, PPS Cilacap telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala PPS Cilacap. Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU PPS Cilacap pada Tahun 2026 untuk semua SK berjumlah 18 (delapan belas) IKU. Sebagai alat ukur pencapaian SK, target 18 (delapan belas) IKU PPS Cilacap yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 terlihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.492,404
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	30.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	33

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.333
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	77
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	82
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,75
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,8		

Tabel 2 Perjanjian Kinerja PPS Cilacap TA 2026

Pengukuran Kinerja

Nilai kinerja adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU. Status capaian yang ditunjukkan dengan pewarnaan ditentukan dari perbandingan antara capaian dengan target. Untuk menghitung nilai kinerja perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU dengan sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU, terdiri dari *Outcome*, *Output* Kendali Rendah, *Output* Kendali Tinggi, dengan bobot seperti Tabel 3.

No	Validitas IKU	Bobot
1	<i>Outcome</i>	5
2	<i>Output</i> Kendali Rendah	3
3	<i>Output</i> Kendali Tinggi	2

Tabel 3 Bobot validasi IKU

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas *Outcome* yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh *stakeholder/customer* pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas *Output* Kendali Rendah yaitu yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. Validitas *Output* Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja. Pola Perhitungan terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menepakati standar status kinerja untuk nilai kinerja dengan klasifikasi polarisasi. Polarisasi terdiri dari *Maximize*, *Minimize*, atau *Stabilize*. *Maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk. *Minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk. *Stabilize* yaitu semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Berikut klasifikasi polarisasi yang ditentukan sesuai Tabel 4.

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Sangat Baik

Tabel 4 Klasifikasi target indikator kinerja

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Status capaian nilai kinerja ditentukan oleh nilai indeks pada Tabel 5.

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110-120
Baik	Nilai 90-<110
Cukup	Nilai 70-<90
Kurang	Nilai 50-<70
Sangat Kurang	Untuk Nilai <50
Belum Ada Penilaian	

Tabel 5 Status Capaian Nilai Kinerja

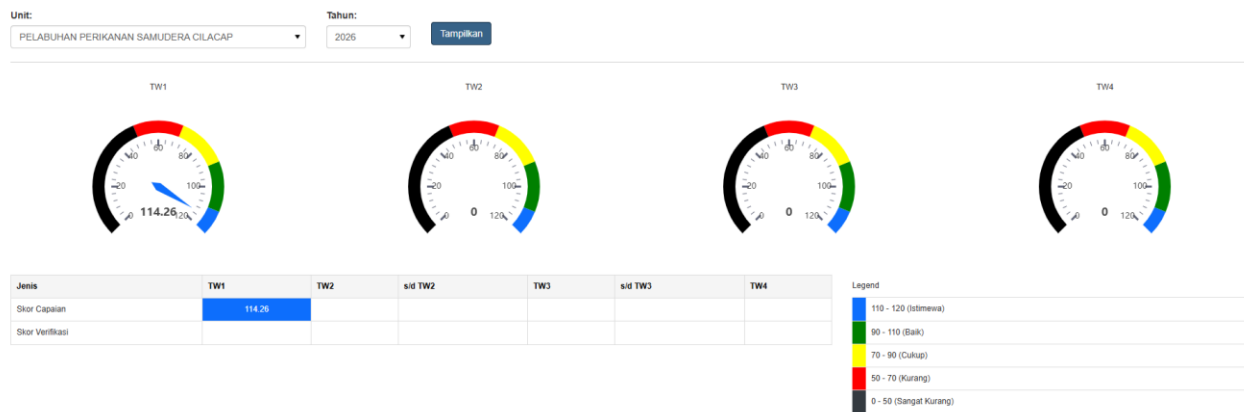
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2026, PPS Cilacap menerima mandat untuk melaksanakan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan mencapai target dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SK dan IKU ini menjadi pedoman utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja di lingkungan PPS Cilacap. Memasuki akhir Triwulan I, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh sasaran dan indikator tidak hanya berhasil dicapai, tetapi melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.

Capaian tersebut tercermin secara kuantitatif melalui sistem monitoring resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan data sistem, PPS Cilacap mencatatkan nilai capaian sebesar 114,26% pada Triwulan I. Dengan nilai tersebut, PPS Cilacap berhasil masuk dalam kategori “Istimewa” (rentang nilai 110–120), yang ditandai dengan indikator warna biru, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 8 berikut ini:



Gambar 8 Nilai Kinerja PPS Cilacap Periode Triwulan I Tahun 2026

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dan kontribusi seluruh pegawai PPS Cilacap yang terus berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kolaborasi tim yang solid, tata kelola yang baik, serta penguatan pengawasan dan evaluasi internal menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja yang unggul.

Pencapaian ini diharapkan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan semata, tetapi juga menjadi motivasi untuk menjaga konsistensi kinerja hingga akhir tahun anggaran. Dengan semangat kerja kolektif dan orientasi pada hasil, PPS Cilacap

siap menjawab tantangan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi KKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2026 dapat tercapai.

Capaian IKU PPS Cilacap

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi PPS Cilacap. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja PPS Cilacap Tahun 2026 dapat tercapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW I	CAPAIAN TW I	PERSENTASE %
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	873,101	1.301,79	120%
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	5.000	6.084,93	120%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW I	CAPAIAN TW I	PERSENTASE %
	Cilacap meningkat					
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)			
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	94,67	112,70%
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)			
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)			
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	33	86,94	120%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW I	CAPAIAN TW I	PERSENTASE %	
			Samudera Cilacap (Nilai)				
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.314	1.322	100,61%	
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)				
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)				
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86	100	116,28%	
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)				

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	CAPAIAN TW I	PERSENTASE %
		13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)			
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	77	100	120%
		15 Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)			
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)			
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)			
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,8	96,70	108,90%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	CAPAIAN TW I	PERSENTASE %
	lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)			

Tabel 6 Capaian IKU PPS Cilacap Triwulan I Tahun 2026

Sumber : Kinerjaku PPS Cilacap

SASARAN KEGIATAN 1

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sasaran kegiatan Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPS Cilacap. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

Nilai PNBP Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam mengukur optimalisasi pemanfaatan layanan dan aset negara di PPS Cilacap. PNBP tersebut berasal dari pungutan atas layanan dan pemanfaatan sumber daya serta hak yang dikelola negara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan menjadi bagian dari penerimaan Pemerintah Pusat di luar perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pelaksanaan pungutan PNBP di PPS Cilacap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017. Ruang lingkup layanan yang menjadi sumber penerimaan meliputi jasa tambat labuh, jasa air, jasa *cold room* dan freezer, jasa kendaraan dan peralatan, jasa penggunaan tanah dan/atau bangunan, jasa penumpukan barang, jasa pas masuk, jasa kebersihan, jasa listrik, serta jasa dock. Keragaman jenis layanan ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan PNBP sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas operasional pelabuhan dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia.

Pada Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026, target PNBP Non-SDA ditetapkan sebesar Rp873,10 juta. Berdasarkan data pada Tabel 7, realisasi pada periode ini mencapai Rp1.301,79 juta atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum kinerja penerimaan pada awal

tahun berjalan berada pada tingkat yang optimal, khususnya ditopang oleh kontribusi signifikan dari jasa tambat labuh dan penggunaan tanah dan/atau bangunan sebagai komponen utama penerimaan.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2025, realisasi PNBP Triwulan I Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 2,48%. Penurunan ini menunjukkan adanya kontraksi kinerja secara tahunan (*year-on-year*) yang perlu dicermati lebih lanjut, meskipun secara target kinerja triwulanan tetap tercapai.

Secara analitis, penurunan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor musiman yang berkaitan dengan kalender hari besar keagamaan, yaitu Tahun Baru Imlek 2576 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Pada periode tersebut, terjadi kecenderungan penurunan aktivitas operasional pelabuhan akibat penundaan keberangkatan kapal oleh pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK). Dampaknya, frekuensi layanan tambat labuh dan layanan terkait lainnya mengalami penurunan, yang secara langsung menurunkan basis penerimaan PNBP.

Kedua, faktor struktural berupa perubahan mekanisme layanan, khususnya pada penggunaan unit pendingin dan jasa dock yang beralih menjadi skema pemanfaatan. Perubahan ini berdampak pada pola pengenaan tarif dan waktu pencatatan penerimaan, sehingga menyebabkan sebagian potensi penerimaan belum terealisasi secara optimal pada periode pelaporan. Kondisi ini mencerminkan adanya masa transisi kebijakan yang berpengaruh terhadap kinerja penerimaan jangka pendek.

Namun demikian, capaian kumulatif hingga Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 37,27% dari target tahunan sebesar Rp3.492,404 juta. Persentase ini menunjukkan bahwa secara proyeksi, kinerja penerimaan masih berada pada jalur yang positif untuk mencapai target akhir tahun, dengan catatan bahwa aktivitas operasional pelabuhan kembali normal dan pemanfaatan layanan dapat dioptimalkan pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan strategi optimalisasi PNBP, antara lain melalui peningkatan utilisasi fasilitas pelabuhan, penyesuaian implementasi kebijakan layanan agar tidak menghambat realisasi penerimaan, serta pengendalian terhadap faktor musiman melalui perencanaan operasional yang lebih adaptif. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan dan pertumbuhan penerimaan PNBP secara berkelanjutan.

Tahunan 2026			Tw I Tahun 2026			Perbandingan dg Tw I Tahun 2025	
Target	Capaian Tw I	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
3.492,404	1.301,79	37,27%	873,101	1.301,79	149,10%	1.334,95	-2,48%

Tabel 7 Capaian IKU 1 Triwulan I Tahun 2026

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian realisasi PNBPNon-SDA pada Triwulan I Tahun 2026 yang melampaui target (Rp1.301,79 juta dari target Rp873,10 juta) menunjukkan adanya faktor-faktor pendukung keberhasilan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan layanan utama
Tingginya kontribusi dari jasa tambat labuh serta penggunaan tanah dan/atau bangunan menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas inti pelabuhan berjalan secara optimal. Hal ini mengindikasikan tingkat aktivitas operasional yang masih cukup tinggi pada awal tahun.
2. Kinerja pengelolaan layanan yang efektif
Pengelolaan layanan kepelabuhanan yang relatif baik, termasuk dalam aspek administrasi, penagihan, dan pelayanan, turut mendukung peningkatan realisasi penerimaan sehingga mampu melampaui target triwulanan yang telah ditetapkan.
3. Penetapan target yang realistis dan terukur
Target PNBPNon-SDA pada Triwulan I Tahun 2026 disusun secara realistis dengan mempertimbangkan tren historis dan potensi penerimaan, sehingga memungkinkan untuk dicapai bahkan dilampaui dalam kondisi operasional normal.
4. Diversifikasi sumber penerimaan
Adanya berbagai jenis layanan jasa di PPS Cilacap memberikan kontribusi terhadap ketahanan penerimaan, sehingga penurunan pada satu sektor masih dapat diimbangi oleh sektor lainnya.

Meskipun target tercapai, terjadi penurunan kinerja dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 2,48%. Hal ini menunjukkan adanya beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Faktor musiman (*seasonal factor*)
Adanya peringatan Tahun Baru Imlek 2576 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H menyebabkan penurunan aktivitas operasional pelabuhan. Sebagian pemilik kapal dan ABK menunda kegiatan melaut, sehingga berdampak langsung pada penurunan frekuensi layanan tambat labuh dan layanan terkait lainnya.
2. Penurunan aktivitas operasional kapal
Dampak lanjutan dari faktor musiman adalah berkurangnya kunjungan dan pergerakan kapal di pelabuhan, yang berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap berbagai jasa kepelabuhanan.
3. Perubahan mekanisme layanan (faktor kebijakan)
Perubahan mekanisme penggunaan unit pendingin dan jasa dock menjadi skema pemanfaatan menyebabkan penyesuaian dalam pola tarif, sistem pembayaran, dan waktu pengakuan pendapatan. Pada masa transisi ini, sebagian potensi penerimaan belum dapat terealisasi secara optimal.

4. Belum optimalnya masa adaptasi terhadap kebijakan baru
Pengguna jasa dan pengelola layanan masih berada dalam tahap penyesuaian terhadap mekanisme baru, sehingga berdampak pada belum maksimalnya pemanfaatan layanan tertentu dalam periode pelaporan.
5. Penurunan kontribusi dari beberapa sektor layanan
Beberapa jenis layanan seperti pas masuk harian, jasa kebersihan, dan jasa listrik mengalami penurunan kontribusi, yang secara agregat memengaruhi total penerimaan PNBP.

SASARAN KEGIATAN 2

Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat

Sasaran kegiatan Produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap meningkat. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan indikator yang mengukur jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan didaratkan di PPS Cilacap dalam bentuk basah. Indikator ini diukur secara triwulanan, dengan data produksi yang dilaporkan secara berkala, baik harian maupun bulanan.

Berdasarkan Tabel 8, capaian realisasi volume produksi hingga Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 6.084,93 ton dari target sebesar 5.000 ton, atau mencapai 121,70%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pada Triwulan I telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 21,70%.

Tahunan 2026			Tw I Tahun 2026			Perbandingan dg Tw I Tahun 2025	
Target	Capaian Tw I	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
30.000	6.084,93	20,28%	5.000	6.084,93	121,70%	5.243,35	16,05%

Tabel 8 Capaian IKU 2 Triwulan I Tahun 2026

Apabila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 30.000 ton, realisasi hingga Triwulan I telah mencapai 20,28%. Hal ini menunjukkan progres awal tahun yang cukup baik dan berada pada jalur yang positif dalam mendukung pencapaian target tahunan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, volume produksi yang didaratkan juga mengalami peningkatan yang

signifikan. Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian sebesar 6.084,93 ton lebih tinggi dibandingkan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 5.243,35 ton, atau meningkat sebesar 16,05%. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah kapal yang melakukan pendaratan hasil tangkapan menjelang Hari Raya Idulfitri, sehingga volume produksi yang didaratkan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang optimal, dengan realisasi yang tidak hanya melampaui target triwulanan, tetapi juga menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja tahunan.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan capaian pada Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai 121,70% dari target triwulanan, dapat disimpulkan bahwa indikator ini mengalami keberhasilan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Peningkatan aktivitas pendaratan ikan
Terjadi peningkatan jumlah kapal yang melakukan pendaratan hasil tangkapan, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri. Kondisi ini mendorong kenaikan volume produksi yang didaratkan dibandingkan periode sebelumnya.
2. Kondisi operasional pelabuhan yang kondusif
Fasilitas dan layanan pelabuhan yang berjalan dengan baik mendukung kelancaran proses bongkar muat hasil tangkapan, sehingga aktivitas pendaratan ikan dapat berlangsung optimal.
3. Optimalisasi peran sumber daya manusia
Dominasi jabatan fungsional teknis, khususnya pada bidang produksi perikanan tangkap, berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja operasional dan pendampingan nelayan.
4. Sistem pencatatan dan pelaporan yang baik
Pelaporan produksi yang dilakukan secara harian dan bulanan memungkinkan data capaian terakumulasi secara akurat dan tepat waktu, sehingga mendukung monitoring kinerja secara efektif.
5. Faktor musim dan kondisi perairan
Kondisi cuaca dan musim penangkapan ikan yang relatif mendukung pada periode Triwulan I turut memengaruhi peningkatan hasil tangkapan nelayan.

Meskipun capaian menunjukkan keberhasilan, terdapat beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan kinerja pada periode berikutnya, antara lain:

1. Ketergantungan pada faktor musiman

Peningkatan produksi yang dipengaruhi oleh momentum tertentu (misalnya menjelang hari besar keagamaan) berpotensi tidak berulang pada triwulan berikutnya.

2. Kondisi cuaca dan iklim

Perubahan cuaca ekstrem, gelombang tinggi, atau musim paceklik dapat menurunkan aktivitas melaut dan berdampak pada penurunan volume produksi.

3. Keterbatasan armada dan alat tangkap

Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas armada dan alat tangkap, maka potensi peningkatan produksi dapat terhambat.

4. Fluktuasi harga dan permintaan pasar

Harga ikan yang tidak stabil dapat memengaruhi intensitas aktivitas penangkapan dan pendaratan ikan oleh nelayan.

5. Kapasitas fasilitas pelabuhan

Ketidakseimbangan antara lonjakan produksi dan kapasitas fasilitas (cold storage, dermaga, dan sarana pendukung lainnya) dapat menyebabkan terjadinya hambatan (*bottleneck*), yang pada akhirnya menghambat efektivitas dan kelancaran proses pelayanan.

SASARAN KEGIATAN 3

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang Optimal dan Bertanggung jawab

Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi :

1. administrasi dan sistem informasi;
2. fasilitas pelabuhan perikanan;
3. pelayanan umum; dan

4. investasi dan industri.

Tahunan 2026			Tw I Tahun 2026			Perbandingan dg Tw I Tahun 2025	
Target	Capaian Tw I	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
84	94,67	112,70%	84	94,67	112,70%	89,08	6,28%

Tabel 9 Capaian IKU 4 Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan data pada Tabel 9, target kinerja operasional pelabuhan baik secara tahunan maupun pada Triwulan I Tahun 2026 ditetapkan sebesar 84. Realisasi capaian pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 94,67 atau sebesar 112,70% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja operasional pelabuhan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui ekspektasi yang telah direncanakan.

Jika ditinjau terhadap target tahunan sebesar 84, capaian pada Triwulan I Tahun 2026 yang telah mencapai 94,67 menunjukkan bahwa target tahunan telah terlampaui sejak awal tahun anggaran. Kondisi ini mengindikasikan kinerja yang sangat optimal pada triwulan pertama serta memberikan ruang yang cukup untuk menjaga konsistensi capaian pada triwulan-triwulan berikutnya. Namun demikian, diperlukan upaya pengendalian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan agar capaian tersebut tetap stabil dan dapat dipertahankan hingga akhir tahun.

Capaian kinerja operasional pelabuhan pada Triwulan I Tahun 2026 tersebut tercatat sebesar 94,67 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai ini merupakan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja (EVKIN) yang mencakup 27 komponen penilaian secara komprehensif. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan pada beberapa indikator utama, antara lain frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, kualitas pelayanan tambat dan labuh, frekuensi pengiriman data melalui Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), serta kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM). Secara keseluruhan, peningkatan ini mencerminkan optimalisasi kinerja operasional pelabuhan yang semakin efektif, efisien, dan terintegrasi.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 89,08, terjadi peningkatan kinerja sebesar 6,28%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan sebagai hasil dari upaya peningkatan pelayanan dan pengelolaan operasional pelabuhan secara berkelanjutan. Dengan demikian, capaian ini mengindikasikan tren kinerja yang positif sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pelabuhan ke depan.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan capaian kinerja operasional pelabuhan pada Triwulan I Tahun 2026 yang telah melampaui target (112,70%) dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, maka secara umum kinerja dapat dikategorikan berhasil. Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan aktivitas operasional pelabuhan, khususnya frekuensi kunjungan kapal dan volume produksi, yang berdampak langsung pada peningkatan nilai kinerja.
2. Optimalisasi pelayanan tambat dan labuh, sehingga waktu tunggu kapal menjadi lebih efisien dan tingkat kepuasan pengguna jasa meningkat.
3. Konsistensi dan ketepatan pengiriman data melalui PIPP, yang mendukung akurasi pelaporan serta penilaian kinerja secara *real time*.
4. Kelancaran distribusi BBM, yang menjamin keberlangsungan operasional kapal dan aktivitas perikanan tanpa hambatan berarti.
5. Peningkatan koordinasi dan manajemen operasional, baik internal maupun dengan pemangku kepentingan terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
6. Komitmen terhadap pemenuhan indikator EVKIN, yang mendorong setiap unit kerja untuk mencapai target pada 27 komponen penilaian secara optimal.

Meskipun capaian menunjukkan hasil sangat baik, terdapat beberapa potensi kendala yang dapat memengaruhi keberlanjutan kinerja, antara lain:

1. Fluktuasi kondisi cuaca dan musim, yang dapat memengaruhi intensitas kunjungan kapal dan volume produksi perikanan.
2. Ketergantungan pada pasokan BBM, apabila terjadi gangguan distribusi dapat berdampak langsung pada aktivitas operasional.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kapasitas dermaga atau fasilitas pendukung lainnya yang berpotensi menjadi *bottleneck* jika terjadi peningkatan aktivitas secara signifikan.
4. Konsistensi kualitas pelayanan, yang harus terus dijaga agar tidak mengalami penurunan pada triwulan berikutnya.
5. Risiko ketidaktercapaian pada komponen EVKIN tertentu, apabila tidak dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus:

1. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan
2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Dalam mendukung hal tersebut, dilakukan melalui penggunaan aplikasi SELARASKAN yang merupakan sistem informasi berbasis WEB dan berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang *update* berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Tahunan 2026			Tw I Tahun 2026			Perbandingan dg Tw I Tahun 2025	
Target	Capaian Tw I	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
33	86,94	263,45%	33	86,94	263,45%	90,99	-4,45%

Tabel 10 Capaian IKU 7 Triwulan IV Tahun 2026

Berdasarkan Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B.1661/DJPT.4/PI.310/I/2026 Tanggal 14 April 2026 Hal Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan I TA. 2026 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat,-dapat diketahui bahwa capaian kinerja PPS Cilacap dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dengan perolehan skor rata-rata 86,94 PPS Cilacap berhasil mempertahankan predikat Sangat Baik. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap indikator penilaian, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam pengelolaan kebersihan, tata lingkungan, dan kualitas pelaporan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data pada Tabel 10, Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap pada Triwulan I tahun 2026 mengalami penurunan performa sebesar 4,45% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perlunya peninjauan kembali serta peningkatan upaya pengawasan terhadap kebersihan dan kelestarian ekosistem pelabuhan agar kualitas pengendalian lingkungan dapat kembali meningkat ke level optimal.

Meskipun target yang ditetapkan untuk tahun 2026 sebesar 33, realisasi pada Triwulan I sudah berhasil mencapai angka 86,94 yang menghasilkan persentase capaian terhadap target sebesar 263,45%. Tingginya angka capaian ini mengindikasikan bahwa efektivitas instrumen pengendalian lingkungan di lapangan berjalan jauh melampaui ekspektasi perencanaan awal, mencerminkan komitmen

yang kuat dalam menjaga kualitas lingkungan pelabuhan di atas standar minimal yang ditentukan.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan capaian implementasi SELARASKAN pada Triwulan I Tahun 2026 dengan nilai sebesar 86,94 atau mencapai 263,45% dari target, dapat disimpulkan bahwa indikator ini mengalami keberhasilan dan masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap regulasi

Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan mendukung tercapainya indikator kinerja secara optimal.

2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SELARASKAN

Pemanfaatan sistem monitoring berbasis web memungkinkan pengelolaan data lingkungan dilakukan secara terstruktur, terukur, dan mudah dievaluasi.

3. Konsistensi pelaporan dan penginputan data

Pelaporan yang dilakukan secara berkala dan sistematis meningkatkan akurasi data serta mendukung pencapaian skor kinerja yang tinggi.

4. Komitmen dalam pengelolaan lingkungan pelabuhan

Upaya perbaikan kebersihan, tata lingkungan, dan pengendalian dampak lingkungan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai kinerja.

5. Target kinerja yang relatif rendah

Penetapan target yang lebih rendah dibandingkan potensi capaian riil menyebabkan persentase capaian menjadi sangat tinggi.

Meskipun capaian menunjukkan keberhasilan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan performa serta berpotensi memengaruhi kinerja pada periode berikutnya, antara lain:

1. Penurunan nilai pengendalian lingkungan

Terjadi penurunan sebesar 4,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya aspek pengelolaan yang belum optimal.

2. Belum optimalnya pemenuhan *mandatory evidence*

Beberapa komponen penilaian belum didukung oleh bukti yang memenuhi bobot yang ditentukan sehingga memengaruhi nilai akhir.

3. Pengawasan dan implementasi program yang belum konsisten

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lapangan belum berjalan optimal secara merata.

4. Kualitas dokumentasi dan eviden

Kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar penilaian.

5. Ketidaktepatan penetapan target kinerja

Target yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan bias dalam pengukuran kinerja dan kurang mencerminkan kondisi capaian yang sebenarnya

SASARAN KEGIATAN 4

Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Oleh karena itu, setiap kapal perikanan yang akan beroperasi wajib memenuhi persyaratan kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, indikator kinerja “Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan” di PPS Cilacap diukur berdasarkan jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan, dengan formula perhitungan berupa nilai posisi akhir dari total dokumen yang telah diterbitkan dalam periode pelaporan.

Capaian kinerja pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), khususnya pada kapal izin daerah, pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perubahan kewenangan perizinan, di mana sebagian besar kapal izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil laut telah melakukan migrasi menjadi kapal dengan izin kewenangan pusat. Perubahan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan tertib administrasi serta kepatuhan pemilik kapal dalam pengurusan dokumen kelaikan kapal perikanan.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025, jumlah sertifikat kelaikan kapal yang diterbitkan oleh PPS Cilacap mengalami peningkatan sebesar 11,66%. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan bertambahnya volume pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh metode perhitungan capaian pada Tahun 2026 yang mencakup akumulasi dokumen yang telah diterbitkan pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Adapun rincian perbandingan capaian kinerja penerbitan SKKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahunan 2026			Tw I Tahun 2026			Perbandingan dg Tw I Tahun 2025	
Target	Capaian Tw I	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
1.333	1.322	99,17%	1.314	1.322	100,61%	1.184	11,66%

Tabel 11 Capaian IKU 8 Triwulan I Tahun 2026

Lebih lanjut, optimalisasi capaian kinerja tersebut juga didukung oleh penerapan mekanisme pelayanan berbasis daring melalui aplikasi SICEFI. Sistem ini mempermudah proses pengajuan serta pemantauan permohonan oleh pemilik kapal. Selain itu, Pejabat Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) dapat melaksanakan pemeriksaan secara bergantian dan fleksibel, menyesuaikan dengan beban kerja serta jumlah permohonan yang masuk. Dengan demikian, proses penerbitan SKKP dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian kinerja penerbitan Surat Keterangan Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang optimal. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik dari aspek regulasi, sistem pelayanan, maupun pengelolaan sumber daya.

Dari aspek regulasi, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur kewenangan penerbitan sertifikat kelaikan kapal oleh pemerintah pusat memberikan kejelasan pembagian kewenangan. Migrasi kapal izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil laut menjadi kewenangan pusat turut meningkatkan ketertiban administrasi serta kepatuhan pemilik kapal dalam memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah dokumen yang diproses dan diterbitkan.

Dari aspek sistem pelayanan, penerapan mekanisme berbasis daring melalui aplikasi SICEFI berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Digitalisasi proses pengajuan dan pemantauan permohonan mampu mempercepat waktu pelayanan, meminimalkan potensi kesalahan administratif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, dari aspek sumber daya manusia, optimalnya kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) dalam melaksanakan pemeriksaan secara bergantian dan fleksibel sesuai dengan beban kerja turut mendukung kelancaran proses penerbitan SKKP. Pengaturan kerja yang adaptif ini memungkinkan seluruh permohonan dapat ditangani secara tepat waktu.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian sebagai potensi kelemahan dalam pengukuran kinerja. Peningkatan capaian sebesar 11,66% dibandingkan periode sebelumnya tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kinerja riil pada tahun berjalan, karena metode perhitungan Tahun 2026 masih mengakumulasi dokumen yang diterbitkan pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Hal ini berpotensi menimbulkan bias dalam interpretasi capaian kinerja apabila tidak dilakukan pemisahan data berdasarkan tahun penerbitan.

Selain itu, ketergantungan pada sistem daring juga berpotensi menjadi kendala apabila terjadi gangguan teknis atau keterbatasan akses bagi sebagian pengguna. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi risiko melalui peningkatan keandalan sistem serta penyediaan alternatif layanan.

SASARAN KEGIATAN 5

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di Lingkungan PPS Cilacap. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut;

INDIKATOR KINERJA UTAMA 11

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

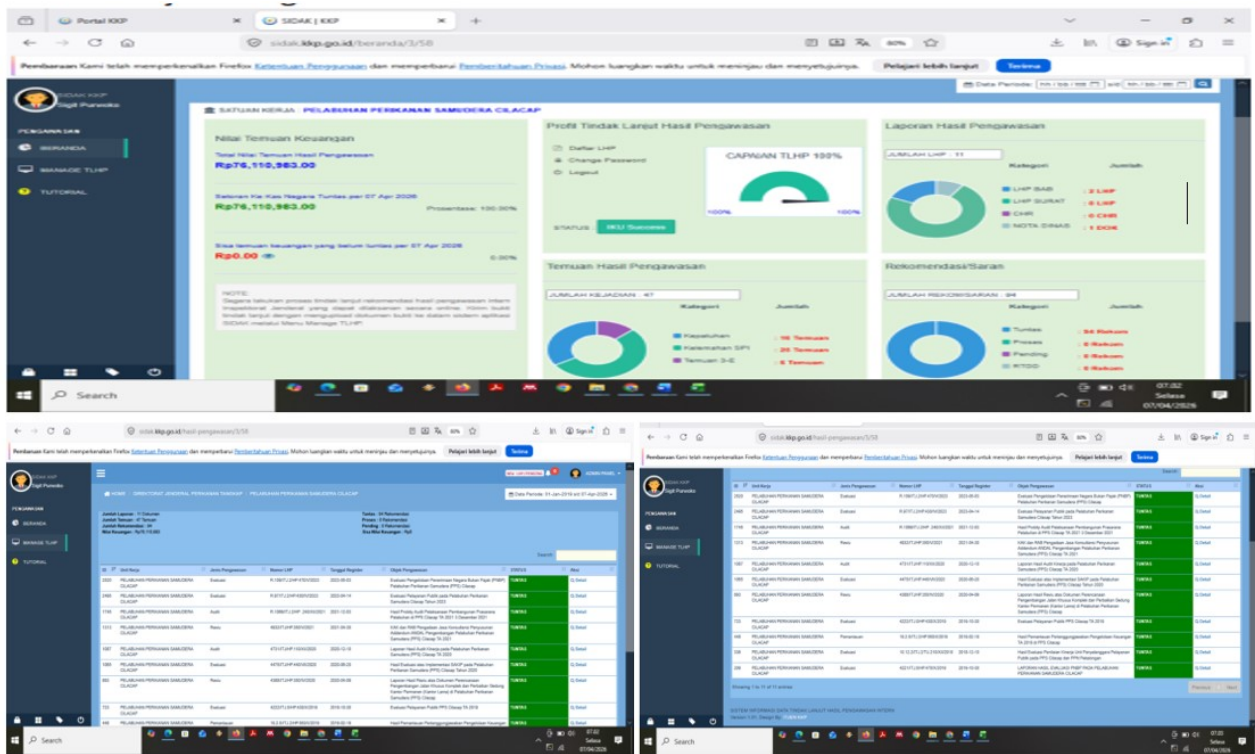
Indikator ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan I Tahun 2026–yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal No 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026 tanggal 13 April 2026.

Tahunan 2026			Tw I Tahun 2026			Perbandingan dg Tw I Tahun 2025	
Target	Capaian Tw I	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
86	100	116,28%	86	100	116,28%	100	0,00%

Tabel 12 Capaian IKU 11 Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan data pada Tabel 12, realisasi IKU 11 mengenai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan di PPS Cilacap menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan mencapai angka sempurna sebesar 100% pada Triwulan I tahun 2026. Capaian ini melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 86%, sehingga menghasilkan tingkat efektivitas pemanfaatan rekomendasi mencapai 116,28%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh saran perbaikan dari hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara total oleh manajemen pelabuhan, yang mencerminkan komitmen kuat dalam melakukan perbaikan kinerja operasional secara berkelanjutan dan responsif terhadap hasil audit maupun pengawasan internal.

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap tercapai sebesar 100%. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP, seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan aplikasi SIDAK KKP sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 9 *Screen shot* Aplikasi SIDAK

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap pada Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai 100 persen merupakan hasil dari komitmen kuat manajemen PPS Cilacap dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP secara tepat waktu dan menyeluruh. Seluruh hasil rekomendasi pengawasan telah ditindaklanjuti melalui pemanfaatan aplikasi

Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIDAK) KKP, yang memungkinkan pemantauan progres tindak lanjut secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Kondisi ini mencerminkan efektivitas mekanisme pengendalian internal serta koordinasi antar tim kerja yang berjalan baik, sehingga setiap temuan dan potensi perbaikan dapat segera ditangani secara tuntas. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja dan tata kelola PPS Cilacap bersifat responsif, tidak hanya berorientasi pada pencapaian *output*, tetapi juga pada pemenuhan proses yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Tidak ditemukannya faktor kegagalan pada indikator ini mengindikasikan bahwa budaya kepatuhan dan akuntabilitas telah terinternalisasi dengan baik dalam organisasi. Ke depan, konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan secara berkelanjutan akan menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional, serta mendukung penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja sektor perikanan tangkap secara menyeluruh di PPS Cilacap.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah secara terbuka mengumumkan paket-paket pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perencanaan pengadaan secara jelas dan terstruktur. Pengukuran persentase RUP yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) pada satuan kerja. Nilai indikator ini diperoleh dari perbandingan antara nilai pengadaan barang/jasa yang telah diumumkan dalam SiRUP dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri, yaitu pagu program yang telah dikurangi belanja pegawai dan belanja nonpengadaan. Ketentuan mengenai pengumuman RUP tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Pasal 11 ayat (1).

Sampai dengan Triwulan I, PPS Cilacap telah melakukan revisi dan penyesuaian dalam perencanaan anggaran yang seluruhnya ditindaklanjuti melalui perubahan RUP. Pagu awal DIPA PPS Cilacap sebesar Rp23.746.662.000,00 mengalami peningkatan setelah revisi menjadi Rp119.376.963.000,00. Dari pagu pengadaan yang telah ditetapkan, nilai paket RUP yang diumumkan dalam SiRUP

tercatat sebesar Rp10.461.664.000,00 dan seluruhnya telah terpublikasikan tanpa selisih, sehingga capaian persentase RUP yang diumumkan mencapai 100%.

Tahunan 2026			Tw I Tahun 2026			Perbandingan dg Tw I Tahun 2025	
Target	Capaian Tw I	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
77	100	129,87%	77	100	129,87%	100	0,00%

Tabel 13 Capaian IKU 14 Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan data pada Tabel 13, realisasi capaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) di PPS Cilacap menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi dengan persentase sebesar 100%. Hasil ini mencerminkan komitmen PPS Cilacap dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel, di mana seluruh perencanaan pengadaan telah diumumkan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di PPS Cilacap pada triwulan I tahun 2026 mencapai 100% merupakan hasil dari perencanaan pengadaan yang matang, kepatuhan administratif yang konsisten, serta komitmen kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Keberhasilan ini didukung oleh keseriusan satuan kerja dalam menyusun dan mengumumkan seluruh rencana pengadaan secara tepat waktu sesuai ketentuan, sebagaimana telah dievaluasi secara menyeluruh oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP melalui Nota Dinas Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tanggal 7 April 2026. Pengumuman RUP secara lengkap dan terintegrasi pada aplikasi SIRUP mencerminkan kesiapan PPS Cilacap dalam mendukung tata kelola pengadaan yang efektif, sekaligus memastikan keterbukaan informasi kepada publik. Selain itu, pengelolaan pagu belanja pengadaan yang signifikan tetap dapat dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan maksimal, yang menunjukkan efektivitas manajemen anggaran dan koordinasi internal yang baik. Capaian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan pengadaan di PPS Cilacap telah berjalan selaras dengan regulasi nasional pengadaan barang/jasa, sehingga berkontribusi langsung terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran. Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan pada indikator ini, sehingga capaian kinerja dapat dipertahankan pada level optimal dan menjadi fondasi kuat bagi perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan PPS Cilacap.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 18

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM di PPS Cilacap dilakukan oleh Petugas Pelayanan Publik PPS Cilacap secara periodik setiap triwulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diukur melalui skala Likert. Skala Likert digunakan untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik, di mana responden diminta menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan yang disajikan melalui beberapa pilihan jawaban. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner menggunakan aplikasi SKM serta wawancara tatap muka dengan pengguna layanan.

Variabel pengukuran dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada sembilan unsur yang ditetapkan dalam Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu: (1) persyaratan, (2) prosedur, (3) waktu pelayanan, (4) biaya atau tarif, (5) produk layanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) sarana dan prasarana, serta (9) penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Tahunan 2026			Tw I Tahun 2026			Perbandingan dg Tw I Tahun 2025	
Target	Capaian Tw I	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
88,8	96,70	108,90%	88,8	96,70	108,90%	94,15	2,71%

Tabel 14 Capaian IKU 18 Triwulan I Tahun 2026

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) PPS Cilacap dilaksanakan secara triwulanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Implementasi survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual atas persepsi pengguna layanan sekaligus sebagai instrumen evaluatif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 111 responden pada 13 jenis layanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 96,70, yang masuk dalam kategori A (Sangat Baik). Secara kuantitatif, capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 88,8, dengan tingkat realisasi

mencapai 108,90%, yang mengindikasikan adanya *over-achievement* pada kinerja pelayanan.

Jika ditinjau secara komparatif sesuai Tabel 14, capaian Triwulan I Tahun 2026 juga menunjukkan peningkatan sebesar 2,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (94,15). Kenaikan ini merupakan indikator adanya tren perbaikan yang konsisten, sekaligus menguatkan indikasi bahwa strategi peningkatan kualitas layanan yang diterapkan telah berjalan efektif dan berdampak nyata terhadap persepsi kepuasan masyarakat.

Secara analitis, capaian tersebut merefleksikan keberhasilan PPS Cilacap dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Nilai IKM yang tinggi tidak hanya menunjukkan terpenuhinya standar pelayanan minimum, tetapi juga mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan telah mampu melampaui ekspektasi pengguna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik PPS Cilacap pada Triwulan I Tahun 2026 berada dalam kondisi sangat optimal, dengan kecenderungan peningkatan yang positif dan berkelanjutan. Capaian ini perlu dipertahankan melalui penguatan inovasi layanan serta mitigasi terhadap potensi penurunan kualitas, guna menjaga konsistensi kepuasan masyarakat pada level yang tinggi.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian nilai SKM sebesar 96,70 (kategori sangat baik) menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di PPS Cilacap telah berjalan secara optimal. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu konsistensi penerapan standar pelayanan dan SOP, kompetensi serta perilaku petugas yang profesional dan responsif, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan, transparansi biaya, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, adanya mekanisme perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil survei periode sebelumnya turut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pelayanan.

Namun demikian, masih terdapat potensi kelemahan yang perlu menjadi perhatian, khususnya pada unsur kesesuaian produk layanan dan kecepatan respon yang memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya peluang peningkatan dalam aspek konsistensi output layanan dan kecepatan pelayanan. Selain itu, ketergantungan terhadap kualitas SDM, potensi bias dalam pengisian survei, serta keterbatasan jumlah responden juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi akurasi penilaian kinerja pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pengendalian mutu layanan, peningkatan standarisasi berbasis sistem, serta optimalisasi sarana prasarana guna menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan.

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2026

Pada tahun 2026, PPS Cilacap memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.119.376.963.000, sesuai dengan DIPA PPS Cilacap Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA- 032.03.2.518117/2026, tanggal 1 Desember 2025. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, PPS Cilacap mendapat alokasi blokir anggaran sebesar Rp.5.787.888.000, sehingga pagu anggaran efektif yang bisa dikelola sebesar RP.113.589.075.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dua kegiatan utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
2. Program Dukungan Manajemen.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp4.156.433.610, atau sebesar 3.48% dari total pagu keseluruhan dan 3.66% dari total pagu efektif.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan visi dan misi KKP pada Tahun 2026, PPS Cilacap telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 5 (lima) Sasaran Kinerja (SK) yang ingin dicapai dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk setiap Sasaran Kinerja (SK) yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Memasuki akhir Triwulan I Tahun 2026, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif. Seluruh SK dan IKU berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan kinerja yang tidak hanya efektif namun juga efisien. Hal ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional.

Capaian kinerja tersebut tercermin dalam hasil pengukuran melalui aplikasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id), di mana PPS Cilacap mencatatkan nilai capaian sebesar 114,26% pada Triwulan I dan ditandai dengan indikator berwarna biru, dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 1 – Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak Rp. 1301,79 Juta atau 120,00% dari target Triwulan I yaitu Rp. 873,101 Juta;
2. IKU 2 – Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak 6.084,93 Ton atau 120% dari target Triwulan I yaitu 5.000 Ton;
3. IKU 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai dengan Nilai 94,67 atau sebesar 112,70% dari target Triwulan I yaitu Nilai 84;
4. IKU 7 – Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Nilai 86,94 atau sebesar 120% dari target Triwulan I yaitu Nilai 33;
5. IKU 8 – Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan tercapai sebanyak 1.322 Kapal atau 100,61% dari target Triwulan I yaitu 1.314 Kapal;
6. IKU 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100% atau 116,28% dari target Triwulan I yaitu 86%;
7. IKU 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai 100 Persen atau 120,00% dari target Triwulan I yaitu 77%;

8. IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Nilai 96,70 atau 108,90% dari target Triwulan I yaitu Nilai 88,8.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Cilacap Triwulan I Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori sangat baik dan menunjukkan tingkat pencapaian yang melampaui target. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPS Cilacap dalam mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak, optimalisasi produksi perikanan tangkap, peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan dan kesyahbandaran, serta penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Saran

Meskipun capaian kinerja PPS Cilacap pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik, evaluasi tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan konsistensi kinerja pada periode berikutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan secara lebih cermat disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang terarah.

Adapun saran yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Ketergantungan Kinerja terhadap Faktor Eksternal

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal, perlu menyusun mekanisme mitigasi risiko berbasis analisis data historis dan prakiraan kondisi cuaca serta musim penangkapan. Selain itu, diversifikasi layanan pelabuhan dan pengembangan kegiatan non-musiman dapat menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas kinerja. Penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait juga perlu ditingkatkan guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika lapangan.

2. Ketidakseimbangan antara Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Perlu dilakukan penajaman perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berbasis kinerja, termasuk penyusunan rencana penarikan dana yang lebih terukur dan terjadwal. Perlu mempercepat proses administrasi dan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun anggaran, serta meningkatkan pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan capaian kinerja.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Perlu menyusun rencana induk pengembangan sarana dan prasarana secara bertahap dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan aktivitas operasional. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan fasilitas eksisting melalui pengaturan operasional yang lebih efisien dan berbasis prioritas perlu terus ditingkatkan. Upaya pengusulan tambahan anggaran dan kerja sama

dengan pihak lain juga dapat dipertimbangkan untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur.

4. Kualitas Implementasi dan Layanan yang Perlu ditingkatkan

Diperlukan standardisasi dan penyempurnaan prosedur operasional layanan secara berkelanjutan, termasuk penetapan indikator kinerja layanan yang lebih terukur. Perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi internal, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akurasi pelayanan.

5. Stabilitas Kinerja Nonfisik (Lingkungan dan Tata Kelola)

Perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator yang jelas dan terukur, serta memastikan ketersediaan dan kualitas data dukung (eviden) yang memadai. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pelaporan dan dokumentasi juga perlu dilakukan. Selain itu, perlu adanya penegasan komitmen terhadap implementasi tata kelola yang baik melalui penguatan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Tindaklanjut Laporan Kinerja Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan kinerja Tahun 2025, PPS Cilacap telah melaksanakan langkah-langkah strategis yang berfokus pada penguatan stabilitas penerimaan dan produksi perikanan tangkap melalui optimalisasi pemanfaatan aset dan peningkatan layanan bernilai tambah, melaksanakan gerai perizinan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pelabuhan melalui pengendalian pendangkalan dan pengembangan fasilitas melalui project AFD, serta optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui percepatan pengadaan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta penyelarasan rencana kegiatan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD). Selain itu, telah dilakukan peningkatan kinerja antar unit melalui efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan, serta penguatan kinerja lingkungan melalui kegiatan pengujian kualitas air dan udara di kawasan PPS Cilacap dan sumber daya manusia melalui peningkatan pengawasan, konsistensi pelaporan, dan pengembangan kompetensi ASN melalui bimbingan teknis perizinan berusaha bagi petugas pelayanan terkait dengan perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh Direktorat Usaha Penangkapan Ikan serta bimbingan teknis penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) melalui GARUDA AI *For Microsoft Elevate* yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan Microsoft Indonesia. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut telah mendukung terjaganya stabilitas kinerja, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, serta penguatan kapasitas organisasi secara berkelanjutan.

Penutup

Selaras dengan capaian terhadap Target Sasaran Kinerja PPS Cilacap pada Triwulan I Tahun 2026, seluruh kendala utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah diidentifikasi serta ditangani secara terukur sehingga tetap berada dalam kondisi terkendali. Capaian kinerja yang berada pada kategori “Istimewa” mencerminkan kuatnya komitmen organisasi, konsistensi pelaksanaan program, serta kesungguhan dalam memastikan ketercapaian target dan kualitas *output* yang dihasilkan.

Kinerja tersebut tidak semata-mata diukur dari tingkat pencapaian indikator, tetapi juga dari kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, capaian kinerja PPS Cilacap merupakan hasil dari komitmen kolektif yang direncanakan secara cermat, solutif, konstruktif, dan inovatif, serta memerlukan dukungan aktif seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan dan langkah strategis dapat diimplementasikan secara konsisten dan memberikan dampak nyata.

Lebih lanjut, capaian kinerja yang telah diraih harus dimaknai tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi sebagai bahan refleksi dan pembelajaran dalam perumusan kebijakan serta perencanaan kinerja ke depan. Penyusunan program dan kegiatan perlu dilakukan secara lebih matang, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, dengan memperhatikan keselarasan antara sasaran, ketersediaan sumber daya, dan kebutuhan riil organisasi. Upaya percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun, penguatan manajemen perubahan, serta peningkatan kapasitas organisasi menjadi langkah strategis yang perlu terus dioptimalkan.

Akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) PPS Cilacap Triwulan I Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi cerminan capaian kinerja dan bentuk akuntabilitas kepada pemberi mandat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan ke depan. Dengan demikian, PPS Cilacap optimis dapat mempertahankan kinerja yang tinggi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Imas Masriah**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap


Lotharia Latif


Imas Masriah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.492,404
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	30.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7 Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.333
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,2
		13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	77
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	82
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,8

NO	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	102.625.306.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	16.751.657.000
TOTAL		119.376.963.000

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap


Lotharia Latif


Imas Masriah



MANUAL INDIKATOR KINERJA 2026



PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Kata Pengantar

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesehatan sehingga Manual IKU Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 dapat tersusun. Manual IKU ini disusun sebagai pedoman dalam mengukur Indikator Kinerja Utama PPS Cilacap, sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat dipantau pencapaiannya.

Cilacap, 15 Januari 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap



Imas Masriah, S.Pi

Daftar Isi

1. Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
7. Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan
9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK)
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
15. Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap

1. Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPS Cilacap
Nama IKU	:	Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none">• Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.• Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
Formula Perhitungan	:	Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: $\text{Nilai TW I} = \text{capaian TW I}$; $\text{Nilai TW II} = \text{capaian TW I} + \text{TW II}$; $\text{Nilai TW III} = \text{capaian TW I} + \text{TW II} + \text{TW III}$; $\text{Nilai TW IV} = \text{capaian TW I} + \text{TW II} + \text{TW III} + \text{TW IV}$
Satuan	:	Juta Rupiah
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	3.492,404 Juta

2. Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap meningkat										
Nama IKU	:	Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap										
Definisi	:	Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.										
Formula Perhitungan	:	$Prod_{Perikanan\ Tangkap} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$										
		<table><tr><td>Keterangan:</td><td>Keterangan:</td></tr><tr><td>$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut</td><td>Nilai TW I = capaian TW I</td></tr><tr><td>$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat</td><td>Nilai TW II = capaian TW I + TW II</td></tr><tr><td></td><td>Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III</td></tr><tr><td></td><td>Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV</td></tr></table>	Keterangan:	Keterangan:	$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut	Nilai TW I = capaian TW I	$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat	Nilai TW II = capaian TW I + TW II		Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III		Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
Keterangan:	Keterangan:											
$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut	Nilai TW I = capaian TW I											
$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat	Nilai TW II = capaian TW I + TW II											
	Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III											
	Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV											
Satuan	:	Ton										
Tingkat Validitas	:	Outcome										
Sumber Data	:	PPS Cilacap										
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir										
Polarisasi	:	Maximize										
Periode Pelaporan	:	Triwulanan										
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk										
Target	:	30.000 Ton										

3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan.• Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBPN yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan perusahaan.
Formula Perhitungan	:	Indikator I : $\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total jumlah usulan perusahaan yang masuk di (nama satker)}} \times 80\%$ Indikator II : Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 % Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator 2
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	100 %

4. Tingkat Kinerja PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan : Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU : Tingkat Kinerja PPS Cilacap
Definisi : Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Formula Perhitungan :

$$NK = \frac{\text{Bobot(A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$$

Keterangan :

1. Sangat baik jika NK = (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46- 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Parameter penilaian meliputi:

Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan	: Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output kendali rendah	Periode Pelaporan	: Triwulanan
Sumber Data	: PPS Cilacap	Metode Cascading	: Buat Baru
Pola Perhitungan	: Rata-rata	Target	: 84

*Penentuan target berdasarkan capaian tahun sebelumnya
Jika tercapai kategori Sangat Baik, maka target min. 87
Jika tercapai kategori Baik, maka target min. 66

5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap
Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan: <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%)2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
Formula Perhitungan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x1)2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2)3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = $100 - [(jumlah\ permintaan\ verifikasi\ SHTI / jumlah\ SHTI\ yang\ diterbitkan) \times 100]$..... (x3) <p>Tingkat Pelayanan = $x1 + x2 + x3$</p>
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	85

6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap
Definisi	:	Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	33

7. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan : Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab

Nama IKU : Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap

Definisi :

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.
- SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Formula Perhitungan : Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)

Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN)

Kategori

Kurang : 0-30	Baik : >61 - 80
Cukup : >30-60	Sangat Baik : >81 - 100

Keterangan:
Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)
Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

Keterangan:
Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan	: Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi	Periode Pelaporan	: Triwulanan
Sumber Data	: PPS Cilacap	Metode Cascading	: Buat Baru
Pola Perhitungan	: Rata-rata	Target	: 33

8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPS Cilacap
Nama IKU	:	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh (nama satker)
Formula Perhitungan	:	Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) oleh (nama satker)
		Keterangan: Nilai TW I = capaian 2024 + 2025 + TW I; Nilai TW II = capaian 2024 + 2025 + TW I + TW II; Nilai TW III = capaian 2024 + 2025 + TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian 2024 + 2025 + TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	:	Kapal
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	1.333 Kapal

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan



- Sasaran Kegiatan : Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPS Cilacap
- Nama IKU : Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
- Definisi :
 - Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.
 - Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.
 - Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut:
 - Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;
 - Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;
 - Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;
 - Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”;
- Formula Perhitungan : Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan.

(1) Kepatuhan s.d. 5 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}}$
(2) Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}}$
(3) Kepatuhan >30 s.d. 100 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB >30 s.d. 100 GT}}$
(4) Kepatuhan ≥ 100 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT}}$
(5) Kepatuhan ≥ 100 GT Laut Lepas	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT Laut Lepas}}$
(6) Kepatuhan ≥ 300 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 300 \text{ GT}}$
Total Nilai	$= \frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}{6 \text{ (sesuai range ukuran kapal yg ada di pelabuhan)}}$

Keterangan :

(a) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB

(b) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SE)

(c) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (Wajib lengkap 0.75 untuk kapal >100 Laut Lepas)

(d) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT)

(e) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (a)

(f) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (b)

(g) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (c)

(h) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan



Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Timja Kesyahbandaran
Pola Perhitungan	:	Rata-rata
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	0,28 (Kategori Cukup)

10. Nilai PM Pembangunan ZI PPS Cilacap (yang telah dinilai WBK)



Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan PPS Cilacap
Definisi	:	Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di (nama satker) yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
Formula Perhitungan	:	Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	75,5

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap
Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan
Formula Perhitungan	:	$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$
		Keterangan: RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	86

12. Nilai PM SAKIP PPS Cilacap



- Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
- Nama IKU : Nilai PM SAKIP PPS Cilacap
- Definisi : Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
- Formula Perhitungan : Nilai PM SAKIP (nama satker) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di (nama satker).

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

- Satuan : Nilai
- Tingkat Validitas : Output kendali tinggi
- Sumber Data : PPS Cilacap
- Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
- Polarisasi : Maximize
- Periode Pelaporan : Tahunan
- Metode Cascading : Dipersempit
- Target : 88,2

13. Indeks Profesionalitas ASN di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Indeks Profesionalitas ASN di PPS Cilacap
Definisi	:	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
Formula Perhitungan	:	Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).
Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Biro Kepegawaian
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	84,5

14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap
Definisi	:	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	77

15. Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap
Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: <ul style="list-style-type: none">• Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);• Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);• Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);• Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);• Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	82

16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPS Cilacap
Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Formula Perhitungan	:	Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	92,1

17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap



- Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
- Nama IKU : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap
- Definisi : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
- Formula Perhitungan : NKPA (nama satker) didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

- Satuan : Nilai
- Tingkat Validitas : Output kendali rendah
- Sumber Data : PPS Cilacap
- Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
- Polarisasi : Maximize
- Periode Pelaporan : Tahunan
- Metode Cascading : Komponen Pembentuk
- Target : 71,75

18.Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap
Definisi	:	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Formula Perhitungan	:	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	88,8



Terima Kasih



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
#GROWSTRONGER

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

POHON KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP TAHUN 2026



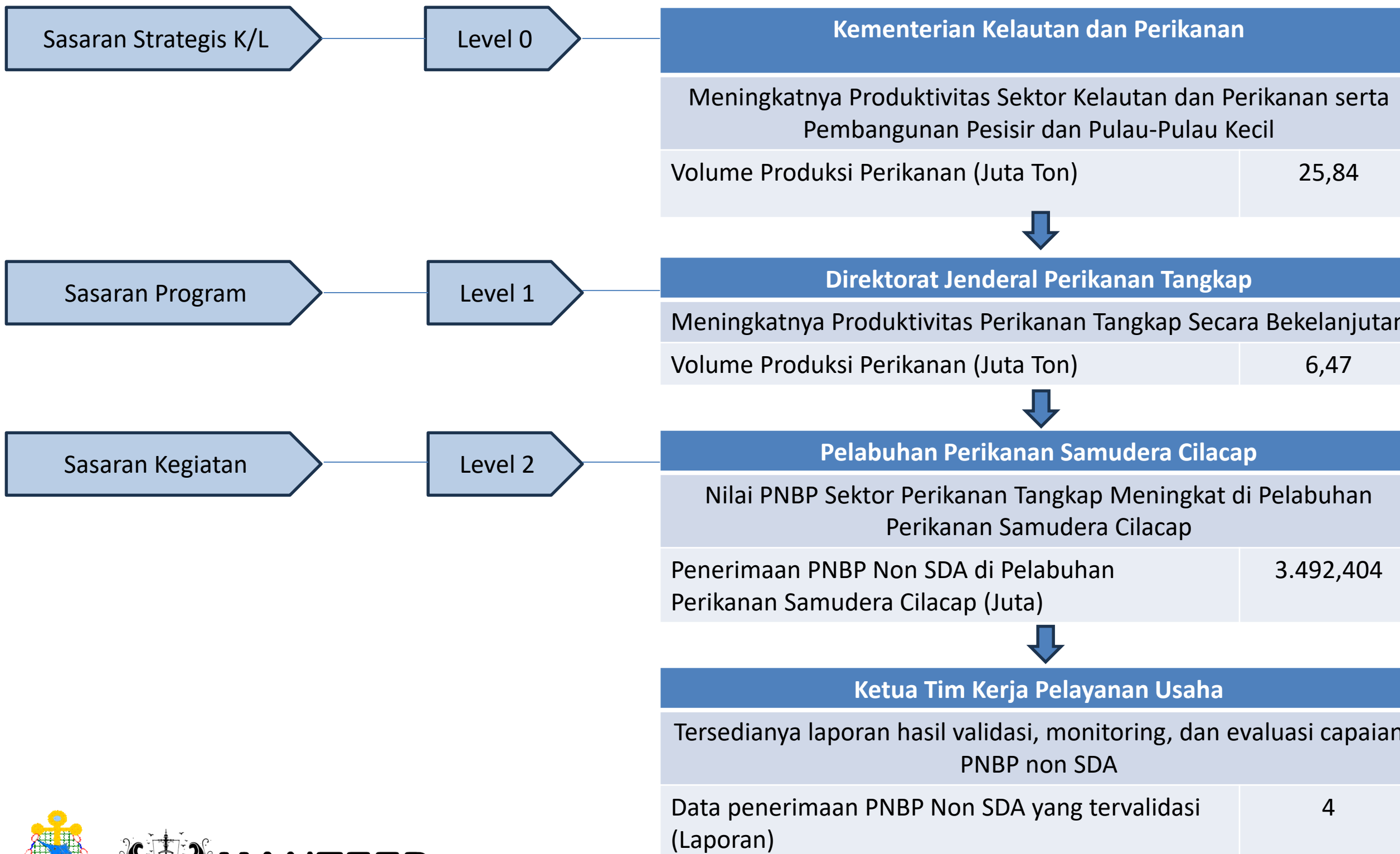
MANTEEP

Melayani Akuntabel No Korupsi Transparan Efektif Efisien Profesional

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonisoyal adaptif kolaboratif

POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 1

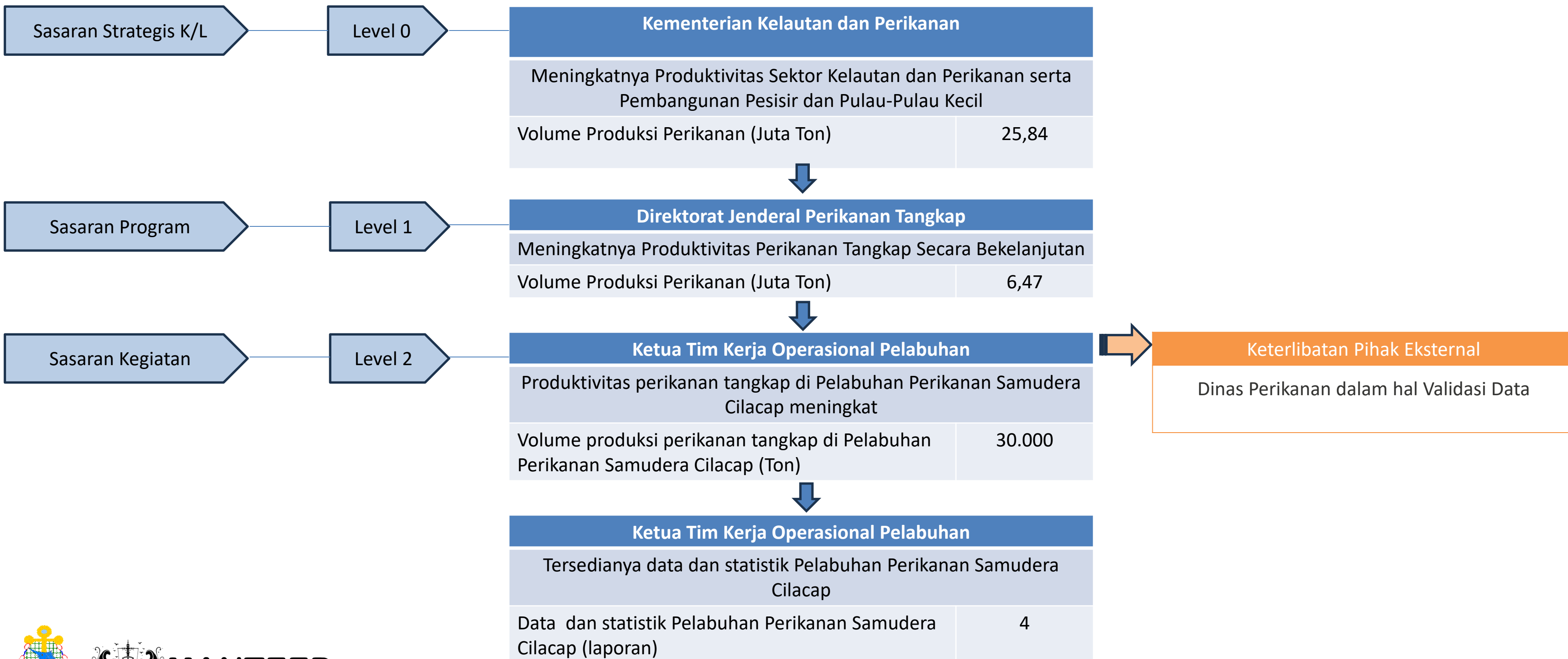


Keterlibatan Pihak Eksternal

1. Pengguna Jasa/Pelaku Usaha dalam hal kepatuhan implementasi pembayaran PNBP;
2. Kementerian Keuangan dalam hal penerimaan PNBP;
3. Perbankan dalam hal setoran PNBP;
4. PSDKP dalam hal pengawasan usaha dan penangkapan ikan

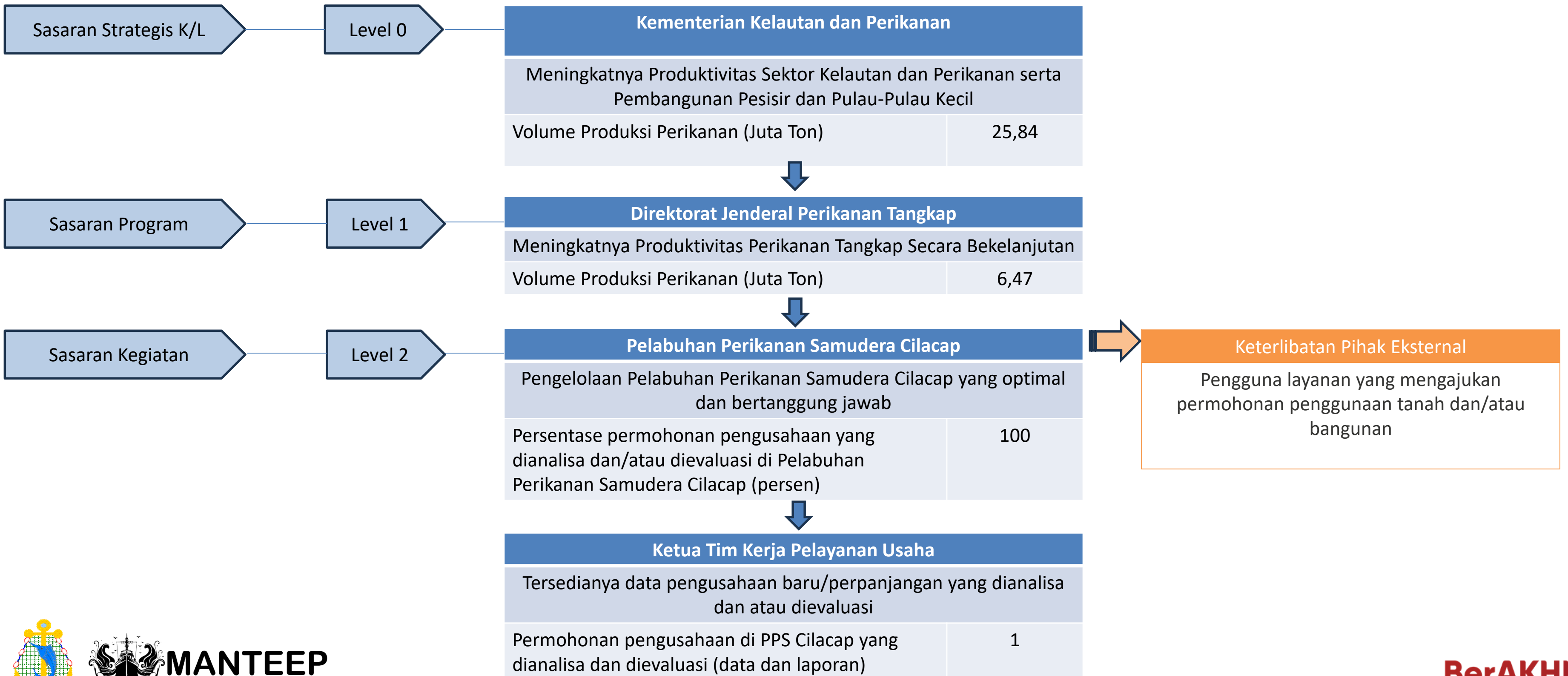
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 2



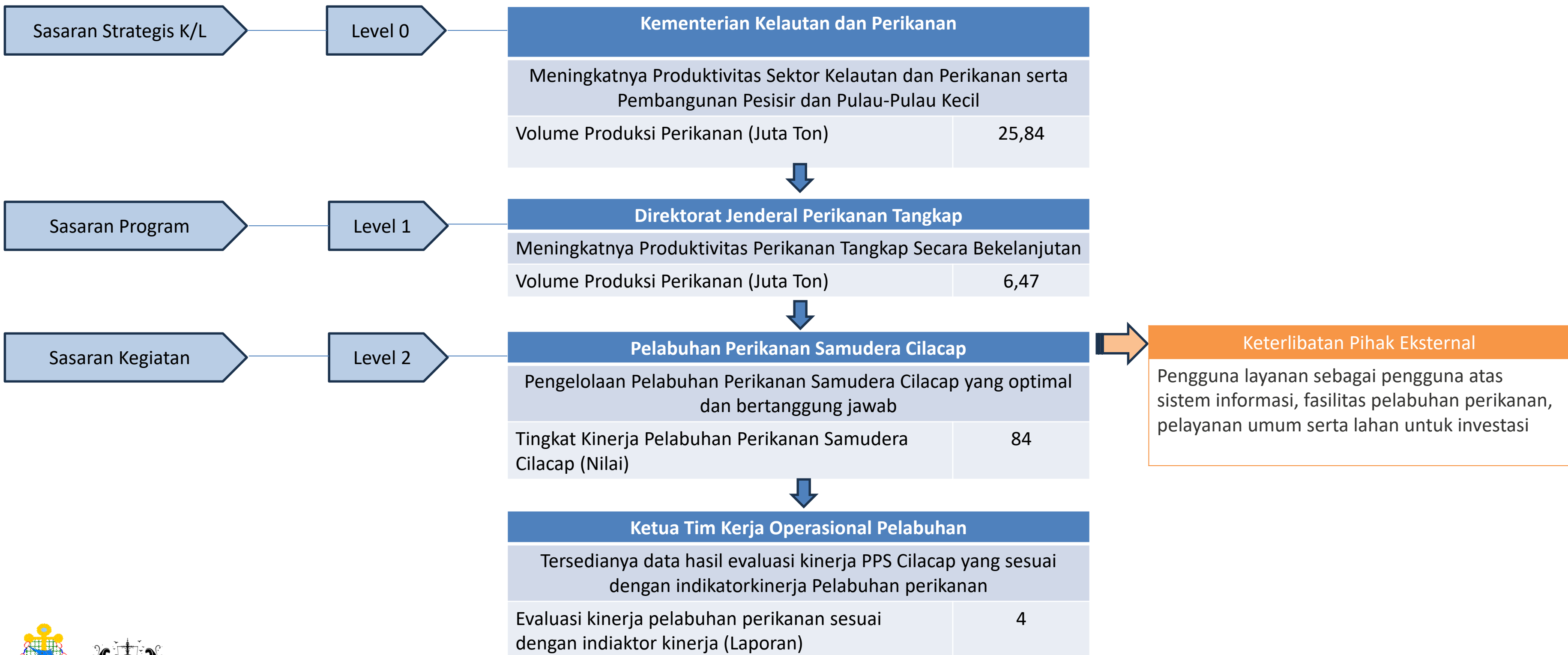
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 3



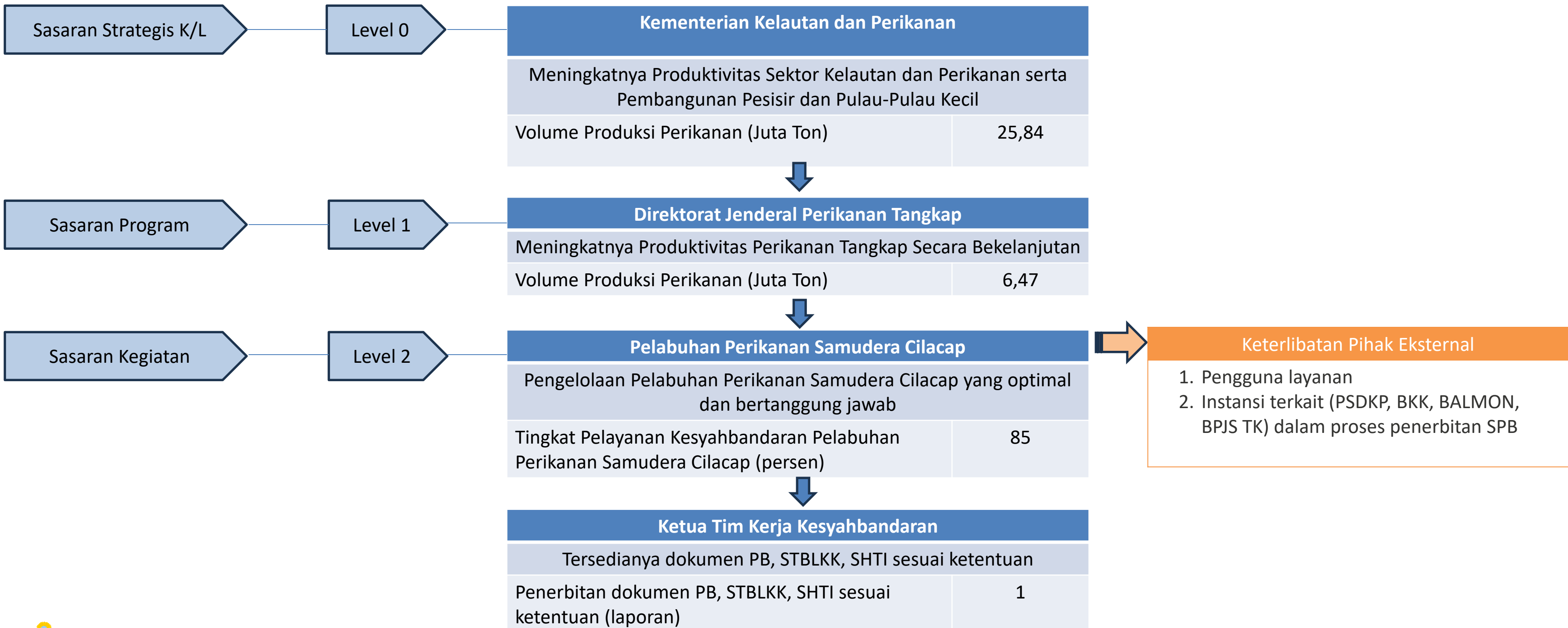
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 4



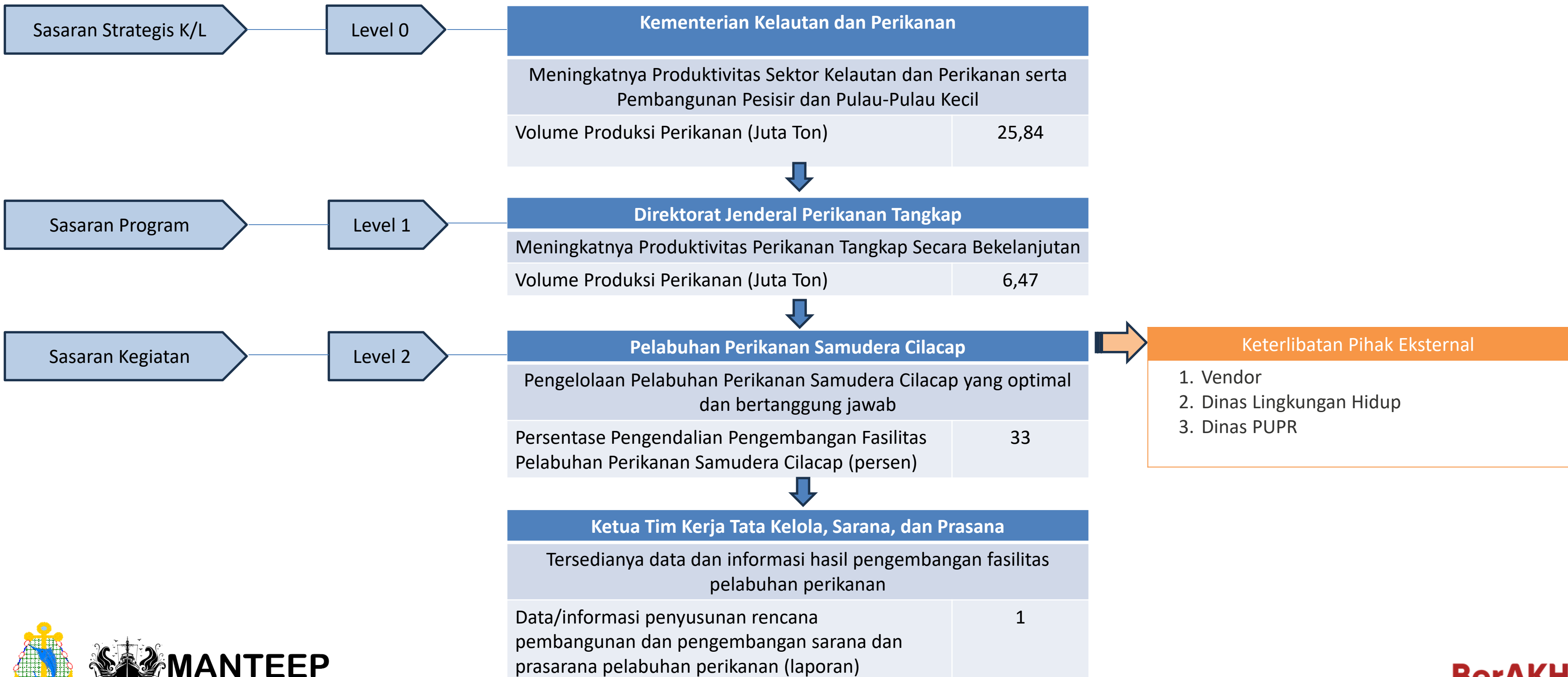
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 5



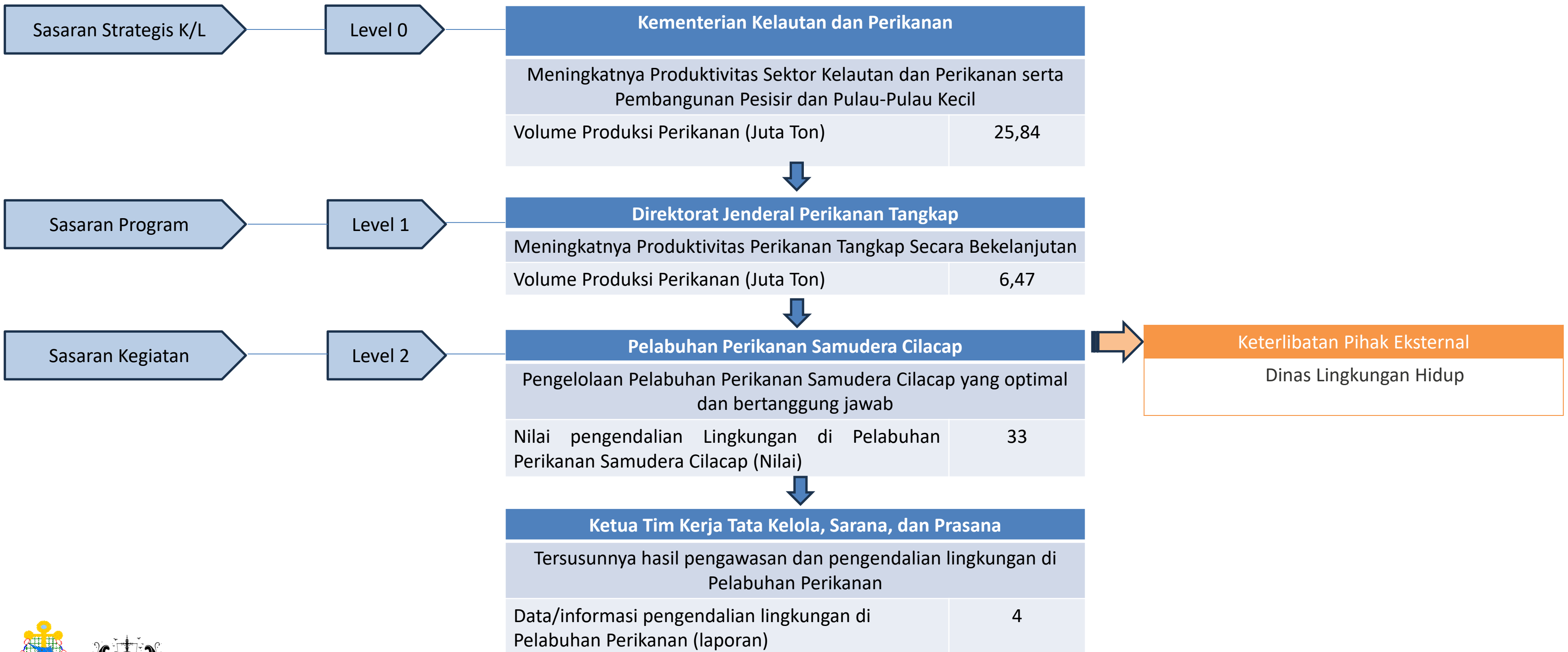
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 6



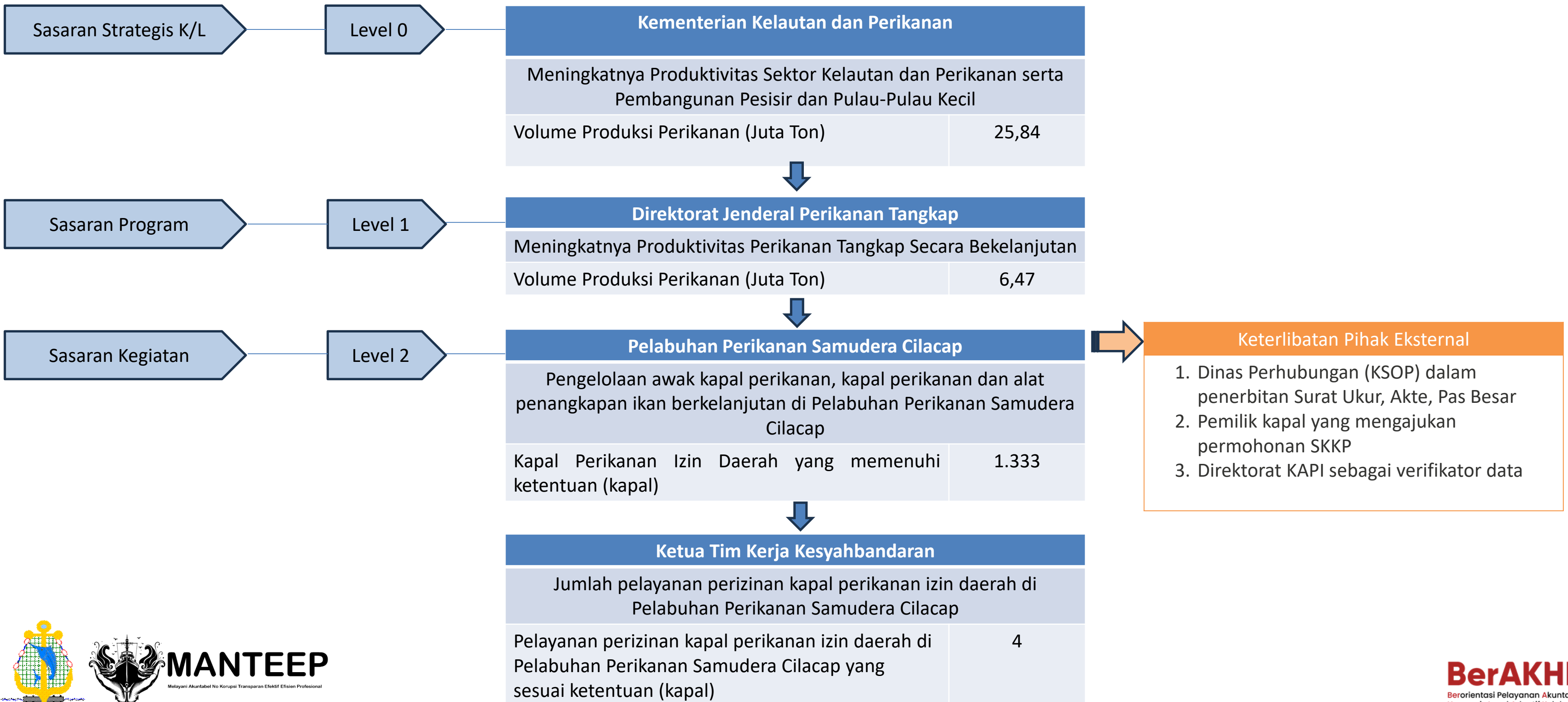
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 7



POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 8



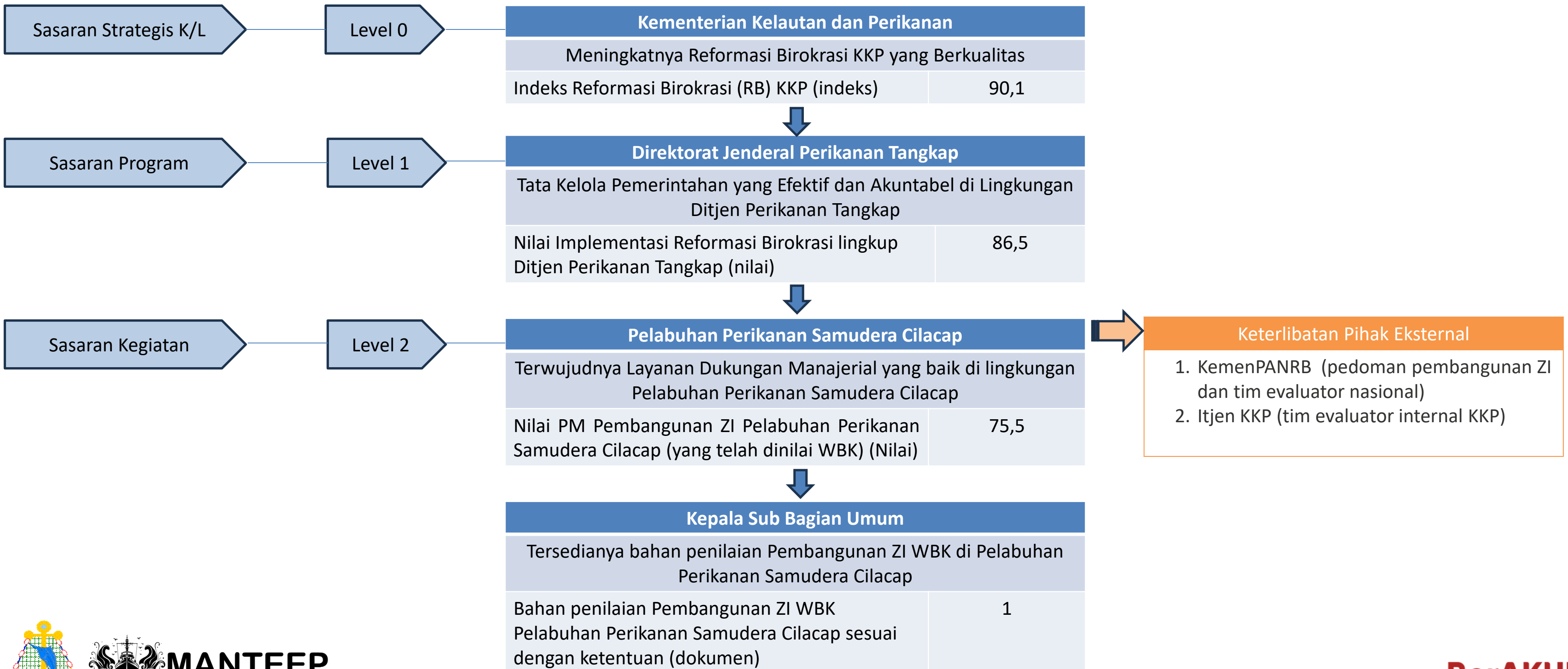
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 9



POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 10



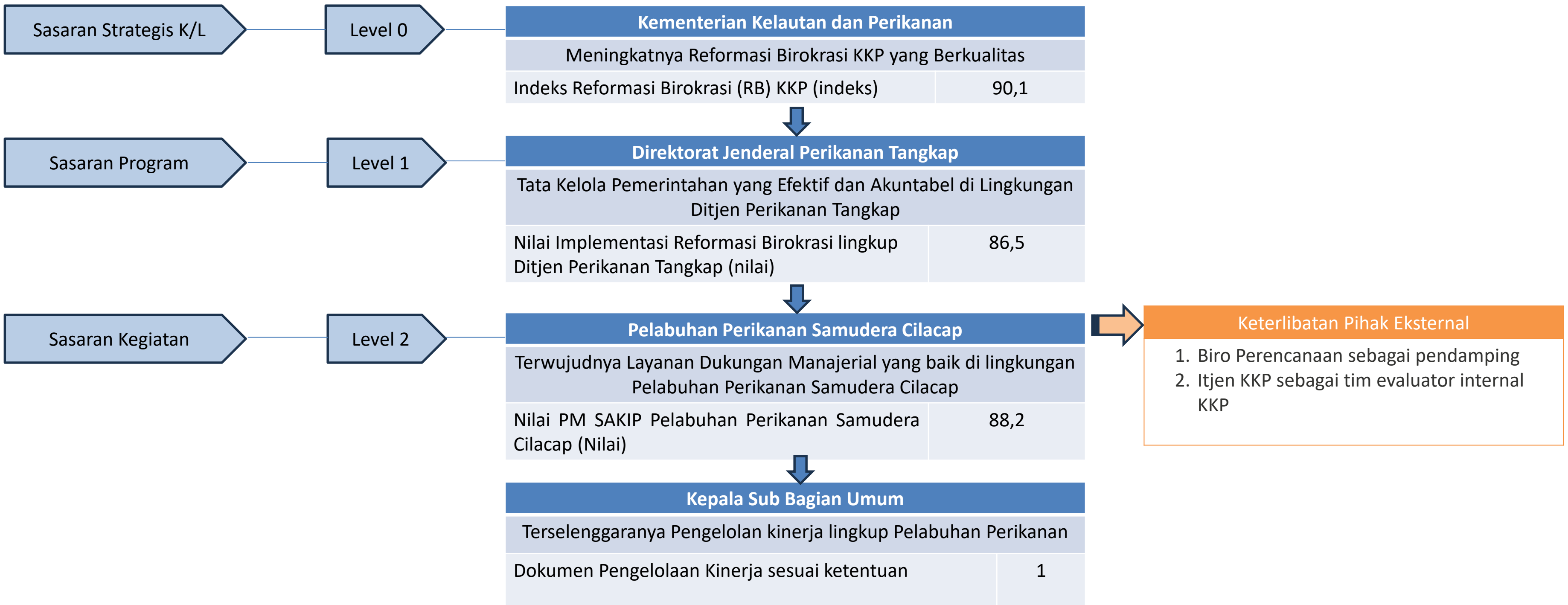
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 11



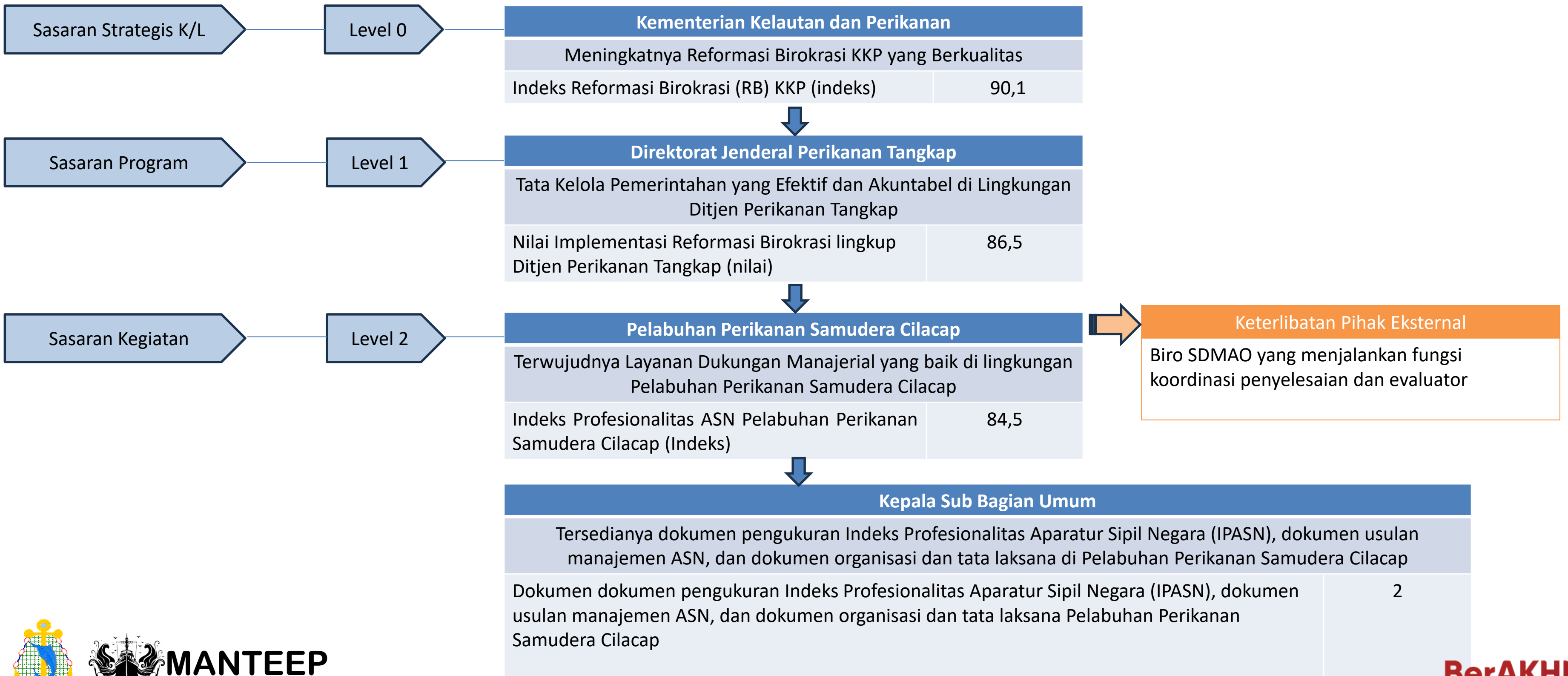
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 12



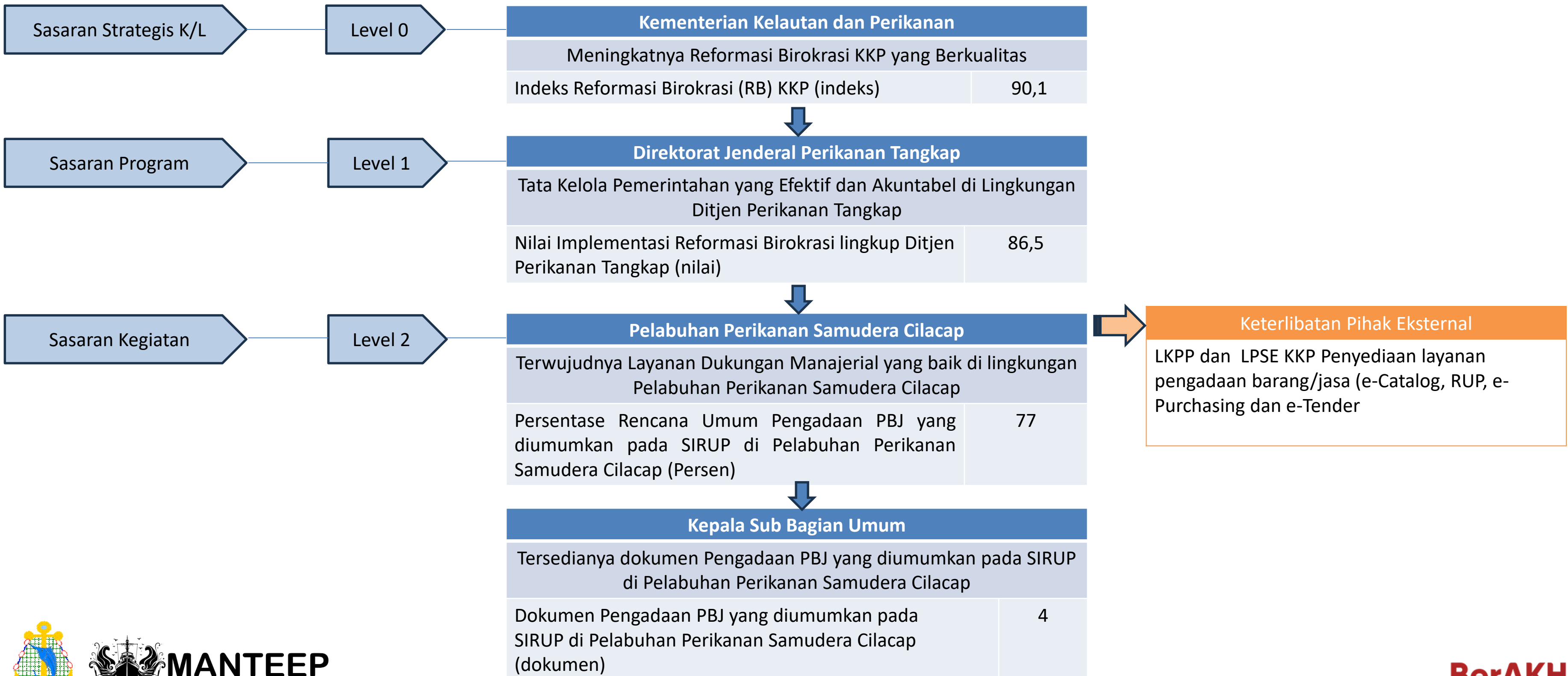
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 13



POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 14



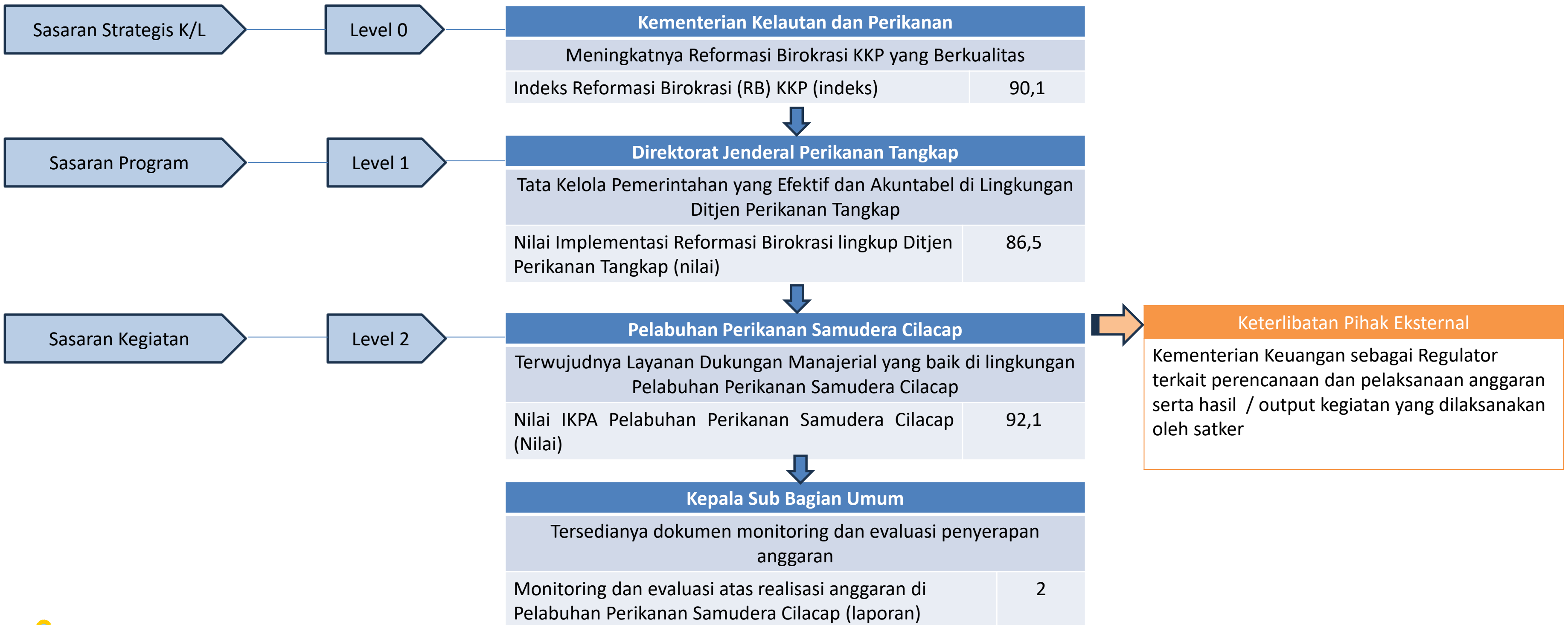
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 15



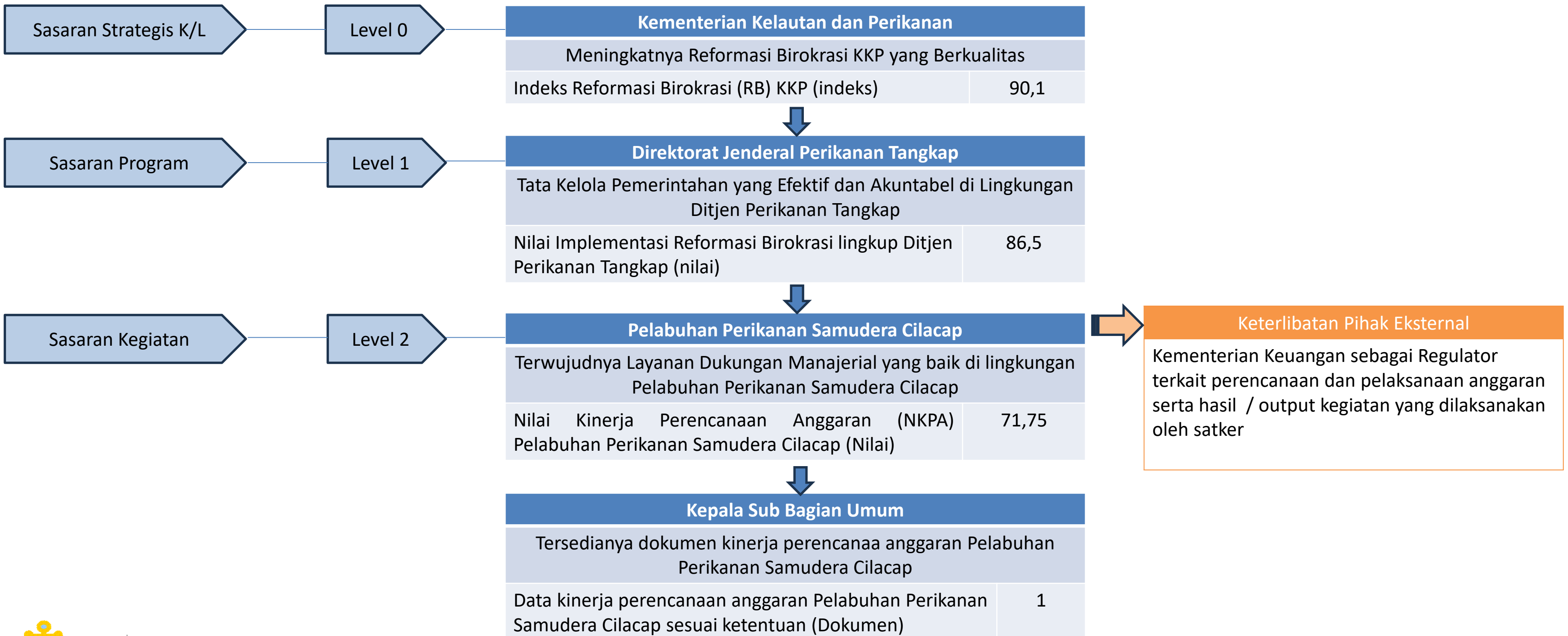
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 16



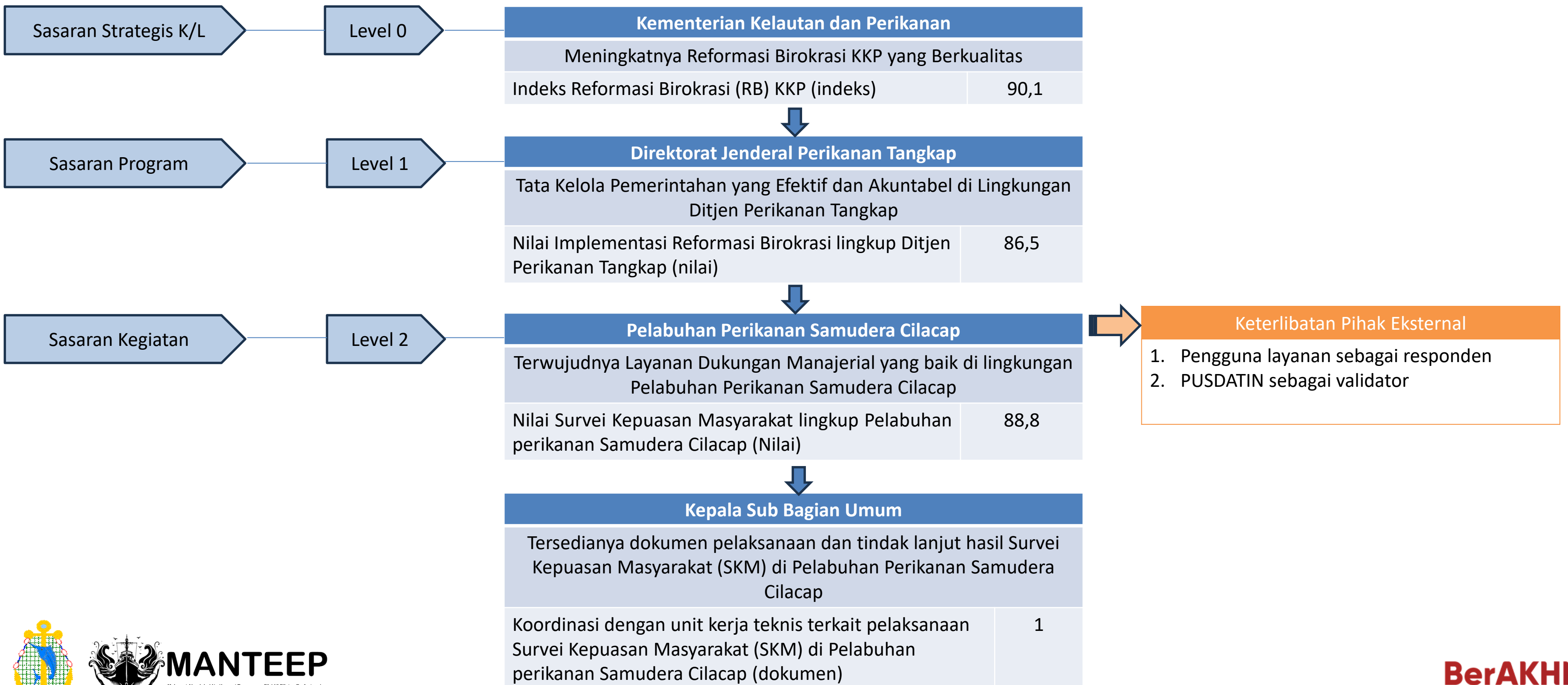
POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

IKU 17



POHON KINERJA PPSC TAHUN 2026

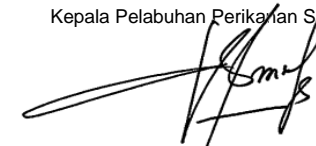
IKU 18



**MATRIKS RINCIAN TARGET IKU
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP TAHUN 2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FREKUENSI	POLA HITUNG	TARGET 2026						
					TW I	TW II	SD TW II	TW III	SD TW III	TW IV	SD TW IV
1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Juta	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	873,101	873,101	1746,202	873,101	2619,303	873,101	3492,404
2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Ton	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	5.000	6.000	11.000	10.000	21.000	9.000	30.000
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						100	100
4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Triwulanan	Rata-rata	84	84	84	84	84	84	84
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						85	85
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						33	33
7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Triwulanan	Rata-rata	33	33	33	33	33	33	33
8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan	Kapal	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	1.314	5	1.319	4	1.323	10	1.333
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Nilai	Semester	Rata-rata		0,28	0,28			0,28	0,28
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK)	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						75,5	75,5
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	86	86	86	86	86	86	86
12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						88,2	88,2
13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Indeks	Semester	Nilai Posisi Akhir		70	70			84,5	84,5
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	77	77	77	77	77	77	77
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						82	82
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Semester	Nilai Posisi Akhir		75	75			92,1	92,1
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						71,75	71,75
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8

Cilacap, 15 Januari 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap,



Imas Masriah, S.Pi.,M.Pi.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
BULAN MARET

TAHUN ANGGARAN 2026
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
NKO 114.26%

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target MARET	Capaian MARET	%	Target s/d MARET	Capaian s/d MARET	%	Tgl Input
SK.01	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap						120			120		
IKSK.01.01	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Juta	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3.492,40	873,1	1.301,79	120	873,1	1.301,79	120	16/04/2026 08:01
SK.02	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat						120			120		
IKSK.02.02	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	30.000,00	5.000,00	6.084,93	120	5.000,00	6.084,93	120	16/04/2026 08:01
SK.03	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab						115,62			115,62		
IKSK.03.03	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0	0	0	0	0	0	16/04/2026 08:01
IKSK.03.04	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	Rata-rata	84	84	94,67	112,7	84	94,67	112,7	16/04/2026 08:01
IKSK.03.05	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	0	0	0	0	0	0	16/04/2026 08:01
IKSK.03.06	Persentase penguasaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	33	0	0	0	0	0	0	16/04/2026 08:01
IKSK.03.07	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	Rata-rata	33	33	86,94	120	33	86,94	120	16/04/2026 08:01
SK.04	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap						100,61			100,61		
IKSK.04.08	Kapal perikanan izin Daerah yang memenuhi ketentuan	Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1.333,00	1.314,00	1.322,00	100,61	1.314,00	1.322,00	100,61	16/04/2026 08:01
IKSK.04.09	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Nilai	Maximize	Rata-rata	0,28	0	0	0	0	0	0	16/04/2026 08:01
SK.05	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap						115,06			115,06		
IKSK.05.10	Nilai PM Pemantauan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,5	0	0	0	0	0	0	16/04/2026 08:01
IKSK.05.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	86	100	116,28	86	100	116,28	16/04/2026 08:01
IKSK.05.12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,2	0	0	0	0	0	0	16/04/2026 08:01
IKSK.05.13	Indeks Prestasi/kinerja ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,5	0	0	0	0	0	0	16/04/2026 08:01
IKSK.05.14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	77	100	120	77	100	120	16/04/2026 08:01
IKSK.05.15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0	0	0	0	0	0	16/04/2026 08:01
IKSK.05.16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,1	0	0	0	0	0	0	16/04/2026 08:01
IKSK.05.17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0	0	0	0	0	0	16/04/2026 08:01
IKSK.05.18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,8	88,8	96,7	108,9	88,8	96,7	108,9	16/04/2026 08:01

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**

NOTA DINAS
NOMOR 634/PPSC/TU.140/IV/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2026
Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Tanggal : 9 April 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan di Tim Kerja Operasional Pelabuhan dengan periode pengukuran triwulanan sebagai berikut:

1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap (Ton)

- Indikator ini merupakan jumlah produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) dalam bentuk basah yang tercatat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	5.000	6.084,93	121,70

Volume produksi pada Triwulan I Tahun 2026 didominasi oleh jenis ikan seperti Cumi Karet, Tuna Mata Besar, Madidihang, Cakalang, dan Layur. Meski capaian kumulatif mencapai 121,70 %, terjadi penurunan produksi pada Triwulan I dibandingkan dengan triwulan IV Tahun 2025 karena awal tahun bukan musim penangkapan ditambah dengan cuaca yang buruk yang menyebabkan kapal tidak dapat melakukan operasi penangkapan sehingga jumlah hasil tangkapan/produksi setiap kapal mengalami penurunan jika dibandingkan pada periode sebelumnya.

- Perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025:

IKU	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	TW I 2025	TW I 2026	
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	5.243,35	6.084,93	16,05

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Volume produksi yang didaratkan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 16,05 %. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah kapal yang pulang menjelang hari raya Idul Fitri dan melakukan pembongkaran ikan sehingga jumlah hasil tangkapan/produksi yang didaratkan mengalami peningkatan dari periode sebelumnya.

2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

- Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja operasional pelabuhan berdasarkan kriteria teknis dan operasional sesuai dengan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap No. 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan. Penilaian meliputi aspek administrasi dan sistem informasi, fasilitas pelabuhan, pelayanan umum, serta investasi dan industri.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	94,67	112,69

Capaian kinerja operasional pelabuhan pada Triwulan I tahun 2026 mencapai nilai 94,67, yang termasuk dalam kategori *sangat baik*. Nilai tersebut merupakan hasil dari Evaluasi Kinerja (EVKIN) yang mencakup 27 komponen penilaian. Capaian ini didorong oleh meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, pelayanan tambat-labuh, frekuensi pengiriman data (PIPP), dan distribusi BBM.

- Perbandingan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025

NO	IKU	REALISASI TW I 2025	REALISASI TW I 2026	NAIK/TURUN (%)
1	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	89,08	94,67	6,28

Jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025, terjadi peningkatan sebesar 6,28 %. Kenaikan ini merupakan hasil dari upaya peningkatan pelayanan dan operasional pelabuhan secara berkelanjutan.

Terkait dengan capain IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukung kedua IKU tersebut untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yatim Kurniadi

Tembusan:
Kasubbag Umum dan Keuangan



DATA DUKUNG IKU 4
TINGKAT OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
(EVKIN (PERSEN)) TRIWULAN I
TAHUN 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan pihak kedua, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 24 Januari tahun 2025, sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan :

- a. Sasaran Program : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing dan berkelanjutan ;
- b. IKU 4 : Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen);
- c. Deskripsi : Tingkat capaian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ;
- d. Formula perhitungan : Prosentase rata rata capaian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melalui Aplikasi Evaluasi Kinerja (EVKIN) ;
- e. Data Dukung berupa : Laporan Evkin .

2. Lokasi

Lokasi monitoring dan evaluasi terkait tingkat kinerja pelabuhan adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Metode Kerja

Melakukan entri data kedalam Aplikasi PIPP.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan

Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan (EVKIN) terdiri dari 12 orang yaitu penginputan PIPP untuk kapal < 5 GT dan penginputan dalam aplikasi PIPP untuk kapal > 5 GT. Alat bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL 3.

3. Hasil Kegiatan

Hasil Kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) pada triwulan I :

No	Bulan	Nilai EVKIN (%)	Keterangan
1.	Januari	94,00	Sangat Baik
2.	Februari	97,25	Sangat Baik
3.	Maret	92,75	Sangat Baik
4.	April		
5.	Mei		
6.	Juni		
7.	Juli		
8.	Agustus		
9.	September		
10.	Oktober		
11.	November		
12.	Desember		
	Jumlah rata-rata Tri Wulan IV	94,67	Sangat Baik

Demikian laporan data dukung IKU 4, Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk Tri Wulan I adalah sebesar **95,33 % (Kategori : Sangat Baik)**.

An. Kepala Pelabuhan
Ketua Tim Kerja Operasional
Pelabuhan



Yatim Kurniadi

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN					
PPS. Cilacap					
January					
No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Nilai	Keterangan
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	30,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	95,14	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	104,84	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	7032,00	4,00	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1726,00	4,00	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,70	4,00	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	615,00	5,00	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	62,23	5,00	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1264,00	5,00	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	93,63	3,75	Kapal yang masuk antara 75 - 99%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	5,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	6,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil		0,00	
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan

	pengolahan)				(100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	82,00	4,00	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,98	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2379,07	2,25	Antara 2000 - 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	3 (149)	2,00	---
Jumlah				94,00	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

Evaluasi Kinerja (Evkin)
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Bulan : Februari 2026

No.	Kriteria	Satuan	January		
			97,25 = SANGAT BAIK		
			Realisasi	Nilai	Ket.
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	28	5	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	97,95	4	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	163.092,60	4	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	4.552,00	3	Antara 4000 - 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	302	5	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	50,63	5	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1.035,00	5	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	157,66	5	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	5	4	Diatas 3 kali

19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	4	3	Antara 3 - 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	83	4	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.365,12	2,25	Antara 2000 - 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	2 (153)	2	---
Jumlah Kesimpulan dan Rekomendasi				97.25	
				SANGAT BAIK	

Evaluasi Kinerja (Evkin)
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Bulan : Maret 2026

No.	Kriteria	Satuan	March		
			92,79 – SANGAT BAIK		
			Realisasi	Nilai	Ket.
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	24	5	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	92,59	4	Antara 75 – 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	190,29	4	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	9.832,87	4	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	698	5	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	84,59	5	Lebih dari 50 ton

16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1.112,00	5	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	64,7	2,5	Kapal yang masuk antara 50 – 74%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	2	2	Antara 2 – 2 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	2	2	Antara 1 – 2 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	82	4	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 – 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.383,97	2,25	Antara 2000 – 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	3 (153)	2	---
Jumlah				92.75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANG AT BAIK	



DATA DUKUNG IKU 2
VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TRIWULAN I
(BULAN JANUARI S.D MARET)
TAHUN 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan Pihak kedua, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 24 Januari 2025, sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan :

- a. Sasaran Program : Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- b. IKU 2 : Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton);
- c. Deskripsi : Merupakan indikator volume produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- d. Formula perhitungan : Penjumlahan volume produksi perikanan di laut dan di perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- e. Data Dukung berupa : Rekapitulasi data jumlah produksi di PPS Cilacap.
- f. Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terdiri dari ikan yang didaratkan dari kapal-kapal yang bongkar di PPS Cilacap maupun ikan yang berasal dari luar Cilacap yang diangkut ke PPS Cilacap dengan angkutan darat untuk dipasarkan ke konsumen di Cilacap.

2. Lokasi

Lokasi pendataan terkait data produksi adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Metode Kerja

Pelaksanaan kegiatan pengambilan data produksi di lakukan dengan metode Sampling dan Sensus.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan

Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan pendataan produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap sebanyak 11 orang, untuk pendataan kapal > 5 GT sebanyak 10 orang dan untuk pendataan kapal < 5 GT sebanyak 1 orang. Dalam Kegiatan pendataan produksi, form yang digunakan sebagai alat bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL3;

3. HASIL KEGIATAN

Hasil Kegiatan Pendataan ini dilakukan proses pengolahan data, kemudian dituangkan dalam laporan harian, berupa laporan produksi harian, yang akan dibuat sebagai dasar laporan mingguan dan bulanan, dapat kita lihat data volume produksi sampai dengan triwulan I, Sampai dengan bulan Desember 2026 dan Jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap :

No	Bulan	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1	Januari	1.994,85	53.761.871.500
2	Februari	1.378,02	34.342.680.549
3	Maret	2.712,03	63.719.623.000
	Jumlah	6.084,93	151.824.175.049

Perbandingan Volume dan Nilai Produksi hasil tangkapan ikan yang didaratkan antara tahun 2026 dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah. Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk volume produksi pada tahun 2026 mengalami sedikit penurunan meskipun jumlah kapal yang mendaratkan mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan adanya cuaca yang buruk yang menyebabkan kapal tidak dapat melakukan operasi penangkapan dan jumlah hasil tangkapan yang dihasilkan mengalami penurunan/sedikit dibandingkan dengan volume pada tahun sebelumnya.

BULAN	VOLUME(Ton)		NILAI PRODUKSI (Rp)	
	2025	2026	2025	2026
JANUARI	1.567,31	1.994,85	35.493.996.000	53.761.871.500
FEBRUARI	1.128,71	1.378,08	29.246.884.000	34.342.680.549
MARET	3.866,56	2.712,00	105.073.067.600	63.719.623.000
JUMLAH	6.562,58	6.084,93	169.813.947.600	151.824.175.049

4. Jenis Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap antara lain adalah :

Tuna Mata Besar, Madidihang, Cakalang, Lemadang, Layur, Albakora, Ikan Pedang (meka), Ikan Setan (Gindara), Setuhuk hitam, Setuhuk Loreng, Nyunglas, Hiu Lalaek (Cucut Selendang), Hiu Lanjam (Cucut lanjaman), Hiu Tikus (Cucut pahitan), Cumi Karet, Layang Benggol, Manyung, Tongkol Pisang Cerutu (Lisong), Hiu Anjing (Cucut Cakilan), Hiu Monyet (Cucut Tikusan), Ikan Layaran, Sunglir, dan lain-lain.

Demikian laporan data produksi dan nilai produksi yang dapat kami laporkan dan sebagai bahan kepentingan lebih lanjut.

An. Kepala Pelabuhan
Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan



Yatim Kurniadi

BULAN	VOLUME(Ton)	
	2025	2026
JANUARI	1.567,31	1.994,85
FEBRUARI	1.128,71	1.378,08
MARET	3.866,56	2.712,00
JUMLAH	6.562,58	6.084,93

BULAN	NILAI PRODUKSI (Rp)	
	2025	2026
JANUARI	35.493.996.000	53.761.871.500
FEBRUARI	29.246.884.000	34.342.680.549
MARET	105.073.067.600	63.719.623.000
JUMLAH	169.813.947.600	151.824.175.049

DATA BULAN JANUARI 2026

No	JENIS IKAN	JANUARI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	20.972	595.690.000	28.404
2	Alu-alu	609	11.730.000	19.261
3	Anggoli	15	255.000	17.000
4	Aruan tasek	39	702.000	18.000
5	Balong	3.256	79.617.000	24.452
6	Barakuda	250	6.712.000	26.848
7	Bawal Hitam	1.226	56.600.000	46.166
8	Bawal Putih	452	69.800.000	154.425
9	Bawal sabit	180	3.600.000	20.000
10	Belo/Selanget	21.910	109.550.000	5.000
11	Bilis/Bulu Ayam	25.993	129.965.000	5.000
12	Cakalang	254.362	3.502.228.500	13.769
13	Cucut baster	373	4.784.000	12.826
14	Cumi karet	633.891	19.547.253.000	30.837
15	Dogol	4.250	297.500.000	70.000
16	Gulamah	12.239	183.585.000	15.000
17	Hiu anjing	1.564	19.432.000	12.425
18	Hiu lalaek	3.954	32.044.000	8.104
19	Hiu lanjam	8.562	120.061.000	14.023
20	Hiu macan	1.732	27.712.000	16.000
21	Hiu monyet	6.410	57.985.000	9.046
22	Hiu taji	548	2.872.000	5.241
23	Hiu teteri	190	1.710.000	9.000
24	Hiu tikus	11.608	167.753.000	14.451
25	Ikan ayam-ayam	30	360.000	12.000
26	Ikan layaran	6.954	138.706.000	19.946
27	Ikan pedang	58.497	1.723.428.000	29.462
28	Ikan setan	1.204	27.692.000	23.000
29	Jambret/Rebon	23.251	581.275.000	25.000
30	Jerbung	3.853	770.600.000	200.000
31	Kembung	485	12.125.000	25.000
32	Kerong / Gerok	3.236	97.080.000	30.000
33	Kerosok	8.140	325.600.000	40.000
34	Kurisi	5.819	98.923.000	17.000
35	Layang	175	5.250.000	30.000
36	Layang benggol	66.983	628.910.000	9.389
37	Layur	4.782	143.460.000	30.000
38	Lemadang	72.900	1.429.776.000	19.613
39	Lendra/Lidah	1.518	37.950.000	25.000
40	Madidihang	347.329	13.662.775.000	39.337
41	Manyung	14.177	212.655.000	15.000
42	Nyunglas	3.712	111.084.000	29.926
43	Opah	226	3.634.000	16.080
44	Ikan Kerapu	64.100	64.100.000	8.000

45	Pari kelelawar	243	1.944.000	8.000
46	Pinjala	107	1.926.000	18.000
47	Remang	556	15.568.000	28.000
48	Selar bentong	978	14.670.000	15.000
49	Setuhuk hitam	9.517	291.368.000	30.616
50	Setuhuk loreng	1.689	51.671.500	30.593
51	Sunglir	9.451	190.628.000	20.170
52	Tigawaja	5.356	133.900.000	25.000
53	Tk madidihang	83.508	1.578.351.500	18.901
54	Tk mata besar	118.445	2.081.974.000	17.578
55	Tongkol pisang cerutu	5.899	44.589.000	7.559
56	Tuna mata besar	117.545	4.177.434.000	35.539
57	Tuna sirip biru selatan	3.689	137.360.000	37.235
TOTAL		1.994.847	53.761.871.500	24.605

DATA BULAN FEBRUARI 2026

No	JENIS IKAN	FEBRUARI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	31.054	667.661.000	21.500
2	Alu-alu	206	3.374.000	16.379
3	Barakuda	113	2.812.000	24.885
4	Bawal sabit	919	18.380.000	20.000
5	Bawal hitam	2.252	91.840.000	40.782
6	Belo/selanget	22.017	110.085.000	5.000
7	Bilis/bulu ayam	20.897	104.485.000	5.000
8	Cakalang	154.263	1.930.285.500	12.513
9	Cucut baster	939	15.024.000	16.000
10	Cumi karet	329.923	10.130.700.000	30.706
11	Hiu anjing	1.153	18.448.000	16.000
12	Hiu lalaek	5.709	68.508.000	12.000
13	Hiu lanjam	4.174	62.610.000	15.000
14	Hiu monyet	2.156	30.788.000	14.280
15	Hiu tikus	5.815	98.855.000	17.000
16	Gulamah	13.138	181.680.000	13.829
17	Ikan layaran	3.507	63.324.000	18.056
18	Ikan pedang	30.651	766.275.000	25.000
19	Ikan setan	17.360	399.280.000	23.000
20	Jambret/reon	24.055	579.775.000	24.102
21	Kakap batu	5	100.000	20.000
22	Kembung	1.020	25.500.000	25.000
23	Kerong/gerok	5.015	150.450.000	30.000
24	Kerosok	7.604	290.225.000	38.167
25	Layang	19.624	117.744.000	6.000
26	Layur	4.086	124.732.000	30.527
27	Lemadang	63.724	1.264.863.049	19.849
28	Lendra	1.015	25.375.000	25.000
29	Lobster	108	21.600.000	200.000
30	Madidihang	244.277	9.038.249.000	37.000
31	Manyung	13.842	207.630.000	15.000
32	Nyunglas	7.669	191.725.000	25.000
33	Pari kelapa	55	440.000	8.000
34	Pari kelelawar	44	352.000	8.000
35	Remang	103	2.884.000	28.000
36	Semar	1.340	26.380.000	19.687
37	Setuhuk hitam	7.431	189.408.000	25.489
38	Setuhuk loreng	1.257	32.053.500	25.500
39	Sunglir	3.513	70.260.000	20.000
40	Tigawaja	5.697	142.425.000	25.000
41	Tk madidihang	170.309	3.722.588.000	21.858
42	Tk mata besar	86.613	1.255.888.500	14.500
43	Tongkol pisang cerutu		6.450.000	5.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Standar Nasional dan telah ditetapkan sebagai tanda tangan elektronik yang telah diakui secara hukum sebagai tanda tangan elektronik.

44	Tuna mata besar	57.161	1.943.474.000	34.000
45	Tuna sirip biru selatan	6.140	153.500.000	25.000
TOTAL		1.378.082	34.342.680.549	

DATA BULAN MARET 2027

No	JENIS IKAN	MARET		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	38.939	837.681.500	21.513
2	Alu-alu	128	1.536.000	12.000
3	Balong	1.080	48.600.000	45.000
4	Barakuda	84	852.000	10.143
5	Bawal hitam	1.238	52.220.000	42.181
6	Bawal putih	435	104.900.000	241.149
7	Bawal sabit	976	19.520.000	20.000
8	Belo	8.517	49.109.000	5.766
9	Bilis	23.163	139.253.000	6.012
10	Cakalang	497.472	6.219.612.000	12.502
11	Cobia	52	936.000	18.000
12	Cucut baster	1.688	27.008.000	16.000
13	Cumi karet	616.200	18.486.000.000	30.000
14	Dogol	3.160	237.000.000	75.000
15	Gindara	9	207.000	23.000
16	Gulamah	11.170	169.626.000	15.186
17	Hiu anjing	1.629	26.064.000	16.000
18	Hiu koboi	21	336.000	16.000
19	Hiu lalaek	2.643	31.949.000	12.088
20	Hiu lalek	1.290	15.480.000	12.000
21	Hiu lanjam	6.424	96.360.000	15.000
22	Hiu macan	6.683	82.404.000	12.330
23	Hiu monyet	19.742	275.564.800	13.958
24	Hiu teteri	303	6.817.500	22.500
25	Hiu tikus	11.253	195.105.000	17.338
26	Ikan ayam-ayam	24	216.000	9.000
27	Ikan kambing-kambing	425	10.625.000	25.000
28	Ikan layaran	4.528	81.504.000	18.000
29	Ikan pedang	43.801	1.095.025.000	25.000
30	Ikan setan	5.231	128.957.000	24.652
31	Jambret	18.342	474.280.000	25.858
32	Jerbung	2.280	465.820.000	204.307
33	Kerong	4.424	137.195.000	31.012
34	Kerosok	5.964	241.440.000	40.483
35	Kurisi	2.180	37.060.000	17.000
36	Layang benggol	104.823	628.938.000	6.000
37	Layur	18.605	621.986.000	33.431
38	Lemadang	156.799	3.066.291.500	19.556
39	Lendra	1.136	30.850.000	27.157
40	Madidihang	353.427	13.005.631.000	36.799
41	Manyung	7.749	116.235.000	15.000
42	Do	1.000	30.000.000	24.973

43	Pari kelapa	33	231.000	7.000
44	Pari kelelawar	47	1.081.000	23.000
45	Pinjala	63	1.883.700	29.900
46	Selar bentong	66	990.000	15.000
47	Semar	2.128	21.280.000	10.000
48	Setuhuk hitam	9.801	249.886.000	25.496
49	Setuhuk loreng	1.059	27.004.500	25.500
50	Sunglir	7.082	142.891.000	20.177
51	Tigawaja	4.356	111.300.000	25.551
52	Tk madidihang	331.424	7.740.601.500	23.356
53	Tk mata besar	173.117	2.522.759.000	14.573
54	Tongkol banyar	225	2.250.000	10.000
55	Tongkol pisang cerutu	31.893	159.465.000	5.000
56	Tuna mata besar	145.077	4.932.618.000	34.000
57	Tuna sirip biru selatan	9.503	237.213.000	24.962
TOTAL		2.712.003	63.719.623.000	

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**

NOTA DINAS
NOMOR 623/PPSC/TU.140/IV/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha
Lampiran : Satu lembar
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2026 Tim Kerja Pelayanan Usaha
Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan di Tim Kerja Pelayanan Usaha dengan periode pengukuran triwulanan sebagai berikut:

1. Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)
 - Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA di PPS Cilacap adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan target dan capaian Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai PNBPN Non SDA di PPS Cilacap (Rp. Juta)	873,10	1.301,79	149,09

Penerimaan PNBPN PPS Cilacap terbesar berasal dari penerimaan tambat sebesar Rp. 764.266.369 dan penerimaan terbesar kedua berasal dari Penerimaan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan yaitu sebesar Rp. 275.672.077.

- Perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025:

IKU	REALISASI TW I 2025	REALISASI TW I 2026	NAIK/TURUN (%)
Nilai PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Rp. Juta)	1.334,99	1.301,79	(2,48)

Apabila dibandingkan dengan penerimaan PNBP Triwulan I Tahun 2025, penerimaan PNBP di Triwulan I Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 4,04 %. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai PNBP dari sektor penerimaan tambat dan labuh, pas masuk harian, jasa kebersihan kawasan, jasa listrik serta penerimaan lainnya.

Penerimaan pelayanan tambat labuh menurun dikarenakan pada Triwulan ini ada peringatan Tahun Baru Imlek 2576 (17Februari 2026) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H hal membuat kondisi para pemilik kapal dan ABK menunda keberangkatan kapal-kapalnya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Hal lain, adanya perubahan mekanisme penggunaan unit pendingin serta pelayanan jasa dock yang telah berubah ke mekanisme pemanfaatan menyebabkan penerimaan pada triwulan ini menurun.

Terkait dengan capaian IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukungannya. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Daniel Wahyu Setyawan

DATA DUKUNG CAPAIAN IKU TIM KERJA PELAYANAN USAHA TRIWULAN I TAHUN 2026

AKUN	URAIAN	Sd bulan Februari 2026	Maret 2026	Triwulan I Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2025	Kenaikan / Penurunan
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0		
	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0	7.977.567	-7.977.567
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (Tanpa Sewa rumah negara)	187.692.495	114.000.082	301.692.577		
	Penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai klaster	112.624.997	85.186.666	197.811.663	175.904.997	21.906.666
	Pemeliharaan Prasarana	28.156.248	21.296.666	49.452.914	43.976.247	5.476.667
	Bangunan	21.141.250	7.266.250	28.407.500	11.521.601	16.885.899
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penumpukan Barang	0	0	0	0	0
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penjemuran jaring / ikan	0	0	0	0	0
	Pelayanan Jasa Cold Room dan Freezer	0	0	0	16.194.993	-16.194.993
	Pelayanan Jasa Penggunaan Transportasi	4.000.000	0	4.000.000	3.200.000	800.000
	Pelayanan Jasa Peralatan dan Gerobak Dorong	270.000	250.500	520.500	381.500	139.000
	Ruang Pertemuan	21.500.000	0	21.500.000	0	21.500.000
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	589.460.955	410.635.600	1.000.096.555		
	Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh	435.838.615	328.427.754	764.266.369	813.053.189	-48.786.820
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian	43.611.000	22.967.000	66.578.000	72.442.000	-5.864.000
	Pelayanan Jasa Pas Langgan	31.080.000	15.495.000	46.575.000	42.735.000	3.840.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan	13.972.800	6.223.200	20.196.000	24.513.656	-4.317.656
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kolam	31.749.500	23.003.900	54.753.400	54.957.700	-204.300
	Pelayanan Jasa Air	1.005.438	491.210	1.496.648	1.082.190	414.458
	Pelayanan Jasa Dock	0	0	0	14.520.000	-14.520.000
	Pelayanan Jasa Listrik	32.203.602	14.027.536	46.231.138	52.494.874	-6.263.736
	JUMLAH PNBP KESELURUHAN	777.153.450	524.635.682	1.301.789.132	1.334.955.514	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 603/PPSC/TU.210/IV/2026

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama lingkup Tim Kerja Kesyahbandaran Triwulan I Tahun 2026
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 2 April 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada Tim Kerja Kesyahbandaran dengan periode pengukuran Triwulan I sebagai berikut :

Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

IKU.8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (surat ukur dan/atau sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. IKU ini merupakan IKU dengan periode pengukuran triwulanan.

IKU	Target	Realisasi Sd TW I	Capaian (%)
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.314	1.322	100,61

Capaian kinerja pelaksanaan Penerbitan SKKP pada kapal Izin Daerah dapat dilaksanakan secara optimal. Kapal izin Daerah yang beroperasi di atas 12 Mill sebagian besar telah melakukan migrasi ke Izin kewenangan Pusat.

Capaian Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan dengan Triwulan I 2025

IKU	Realisasi TW I 2025	Realisasi TW I 2026	Naik/Turun (%)
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.184	1.322	11,66

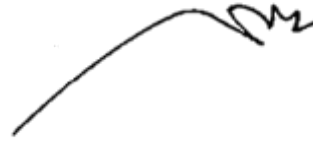
Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, jumlah sertifikat kelaikan kapal yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap naik sebesar 11,66% . Hal ini dikarenakan perhitungan capaian pada Tahun 2026 ini termasuk dokumen yang telah dikeluarkan pada tahun 2023, 2024 dan 2025.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian kinerja pelaksanaan penerbitan SKKP pada kapal ijin Daerah dapat dilaksanakan secara optimal salah satunya dikarenakan adanya mekanisme Online melalui aplikasi SICEFI serta PPKKP dapat melakukan pemeriksaan secara bergantian disesuaikan dengan beban pekerjaan pada saat adanya permohonan penerbitan SKKP dari pemilik kapal yang telah tersampaikan.

Matriks capaian dan dukung pengukuran IKU periode Triwulan I Tahun 2026 terlampir kami sampaikan.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.



Dwiharto Kurniawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH YANG MEMENUHI KETENTUAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
JANUARI	70	37	41	0
FEBUARI	80	38	49	11
MARET	73	39	60	4
APRIL	73	46	36	
MEI	92	41	39	
JUNI	44	50	6	
JULI	70	39	8	
AGUSTUS	21	35	5	
SEPTEMBER	28	37	5	
OKTOBER	25	21	4	
NOVEMBER	8	13	2	
DESEMBER	16	38	18	
JUMLAH	600	434	273	
TOTAL	1.322			

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**

NOTA DINAS
NOMOR 625/PPSC/TU.140/IV/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana
Lampiran : 1 berkas
Hal : Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026, bersama ini kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana sebagai berikut.

1. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

➤ Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan pengendalian pengembangan fasilitas di PPS Cilacap didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Master Plan PPS Cilacap Tahun 2007-2028.

Berdasarkan Master Plan tersebut terdapat 52 fasilitas yang perlu dilakukan pengendalian untuk menjaga kondisi tetap optimal. Jumlah fasilitas yang telah dilakukan pengendalian sebanyak 22 unit.

IKU	Target	Realiasi	Capaian (%)
Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPS Cilacap (%)	33	42,31	128,21

➤ Perbandingan dengan capaian kinerja pada periode Triwulan IV 2025

IKU	Target	Realiasi	Capaian (%)
Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPS Cilacap (%)	33	42,31	128,21

Jika dilihat kedua periode capaian kinerja pengendalian pengembangan fasilitas masih sama. Pengembangan fasilitas pelabuhan akan dilaksanakan setelah dokumen perencanaan pengembangan pelabuhan selesai yang saat ini sedang dikerjakan oleh PT. Haskoning melalui program *Proyek Eco Fishing Port*.

2. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

➤ Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. Penilaian kegiatan pengendalian lingkungan di PPS Cilacap dilakukan melalui kegiatan pengendalian lingkungan yang dilaporkan secara periodik pada aplikasi sistem informasi berbasis WEB yaitu SELARASKAN yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pada aplikasi SELARASKAN terdapat 2 program yang terdiri dari 18 indikator program mandatory, dan minimal 5 indikator program voluntary dengan jumlah bobot 60%. Sedangkan pada indikator hasil terdapat 8 penilaian dengan jumlah bobot 40%.

Pada triwulan I tahun 2026 realisasi nilai pengendalian lingkungan informasi yang dari pusat belum ada, sedangkan berdasarkan aplikasi SELARASKAN untuk sementara yang sampai saat ini dapat dilihat pada tabel berikut.

IKU	Target	Realisasi Bulan			Skor Kumulatif	Rata-Rata	Capaian (%)
		Januari	Februari	Maret			
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap (nilai)	33	94,6	87,4	99,2	281,2	93,73	284,04

➤ Perbandingan dengan capaian kinerja pada periode IV Tahun 2025

Nilai pengendalian lingkungan di PPS Cilacap pada Triwulan IV Tahun 2025 rata-rata 91,90 atau 302,03% dari target sebesar 30,1. Nilai capaian kinerja tersebut lebih besar daripada periode TW I tahun 2026 karena pada periode TW I Tahun 2026 masih terdapat evidence yang belum diverifikasi dan untuk nilai akhirnya dari pusat belum ada.

IKU	Target	Realisasi Bulan			Skor Kumulatif	Rata-Rata	Capaian (%)
		Oktober	November	Desember			
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap (nilai)	30,1	89,01	93,47	93,23	275,71	91,90	302,03

Terkait dengan laporan capaian indikator kinerja tersebut, terlampir kami sampaikan data dukung yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan terlima kasih.



Kushartanto A. Santosa

Tembusan: -

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah		Realisasi	Keterangan
3	Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian utara (Dermaga D) dengan konstruksi aspal	3.267	M1	Belum	
4	Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian utara (Dermaga D) dengan konstruksi beton	1.085	M1	Belum	
5	Pembangunan cold storage (20m X 12m)	1	Unit	Sudah	
6	Pembangunan klinik dan laboratorium (15m X 12m)	2	Unit	Belum	
7	Pembangunan Pos jaga	1	Unit	Belum	
8	Pembangunan break water	1	Unit	Belum	
9	Pembangunan dermaga D dengan konstruksi concrete sheet pile	1	Unit	Belum	
10	Pengurugan dan pematangan lahan areal pelabuhan bagian utara (Dermaga D)	1	Unit	Belum	
11	Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	2	Unit	Belum	
12	Pembuatan menara reservoir kapasitas 20m3	2	Unit	Belum	
13	Pembangunan MCK	3	Unit	Belum	
14	Pembangunan IPAL (Instalasi pengolahan Air Limbah)	2	Unit	Belum	
15	Pembangunan jaringan air bersih	3.267	M1	Belum	
16	Pembangunan mushollah	1	Unit	Belum	
17	Pengerukan kolam pelabuhan utara dan alur pelayaran sampai -5 LWS (-6,5 dari MWL)	1	Unit	Belum	
18	Pembangunan kantor pelayanan terpadu	1	Unit	Belum	
19	Pembangunan shelter nelayan	1	Unit	Belum	
20	Pembangunan kios pesisir/waserda	5	Unit	Belum	
21	Pembangunan areal parkir pelabuhan dan jaringan drainase	8.476	M2	Belum	
22	Pembangunan pagar keliling pelabuhan bagian utara (Dermaga D)	1	Unit	Belum	
23	Pembangunan rumah dinas tipe 72	2	Unit	Belum	
24	Pembangunan SPBU 2 pompa	1	Unit	Belum	
25	Pembangunan sarana olah raga	1	Unit	Belum	

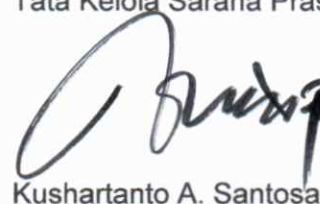
Keterangan:

- Rencana pengendalian dan pengembangan fasilitas sesuai master plan sebanyak 52 fasilitas
- Realisasi pengendalian dan pengembangan fasilitas sebanyak 22 fasilitas
- Nilai persentase fasilitas yang telah dilakukan pengendalian dan pengembangan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Jumlah Fasilitas Sesuai Master Plan}} \times 100$$

$$= \frac{22}{52} \times 100 = 42,31\%$$

Cilacap, 7 April 2026
Ketua Tim Kerja
Tata Kelola Sarana Prasarana

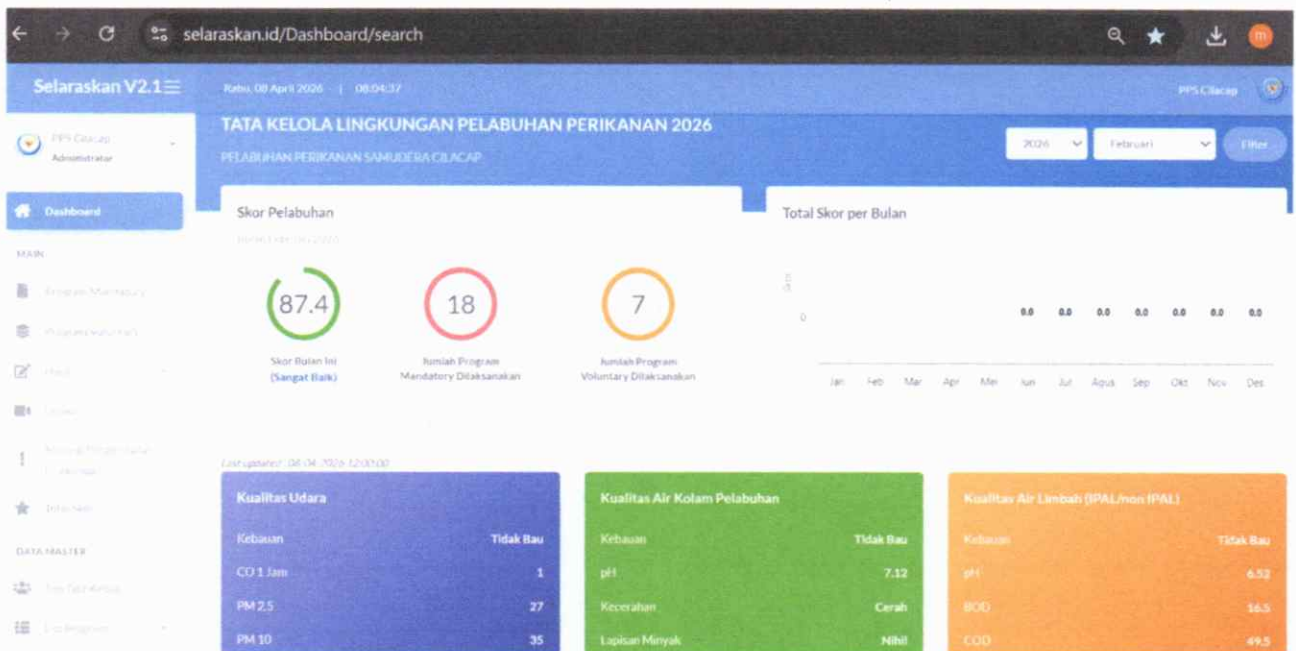
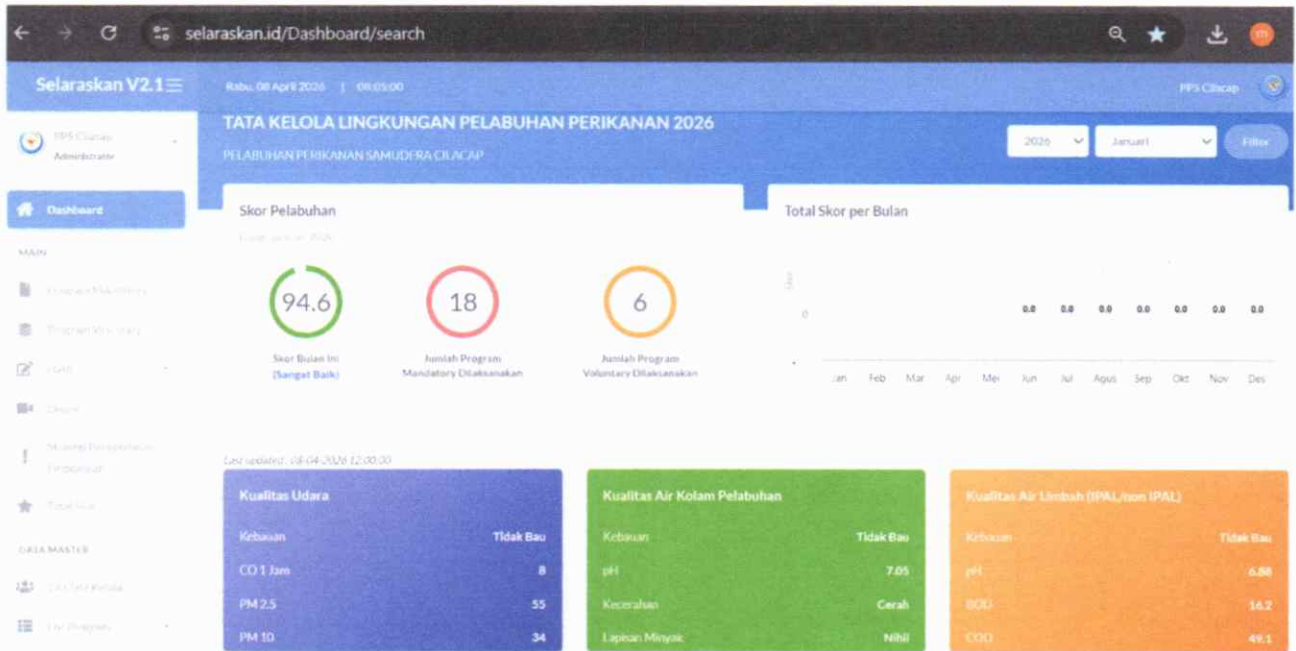


Kushartanto A. Santosa

**REALIASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026
 PERSENTASE PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS
 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
 BERDASARKAN MASTER PLAN TAHUN 2007
 PENTAHAPAN TAHUN 2008 s.d 2028**

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Realisasi	Keterangan
A	Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Tengah			
1	Perbaikan revetment kolam A	1	Unit	Sudah
2	Pengerukan kolam A	1	Unit	Belum
3	Pengerukan kolam B dan jalur pelayaran sampai kedalaman -3 dari LWS (-4,5 m dari MWL)	1	Unit	Sudah
4	Perbaikan revetment kolam B	1	Unit	Belum
5	Pembangunan pasar ikan higienis	1	Unit	Belum
6	Peningkatan TPI Lama (peninggian atap dan lantai)	1	Unit	Sudah
7	Pembangunan Pos Jaga	1	Unit	Sudah
8	Pembangunan Cold Storage	1	Unit	Sudah
9	Pembuatan menara reservoir kapasitas 20m3	2	Unit	Sudah
10	Pembangunan areal parkir pelabuhan	1	Unit	Sudah
B	Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Selatan			
1	Pematangan lahan areal pelabuhan bagian selatan	1	Unit	Sudah
2	Pengerukan kolam C dan alur pelayaran sampai -5 LWS (-6,5m dari MWL)	1	Unit	Sudah
3	Pengadaan kapal keruk kapasitas 100m3	1	Unit	Sudah
4	Pembangunan revetment dengan konstruksi concrete sheet pile	1	Unit	Belum
5	Pembangunan dermaga C dengan konstruksi jetty	3	Unit	Sudah
6	Pembangunan transit shield	1	Unit	Sudah
7	Pembangunan jaringan air bersih	900	LS	Sudah
8	Pembangunan MCK	2	Unit	Belum
9	Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	2	Unit	Belum
10	Pembangunan mushollah	1	Unit	Sudah
11	Pembangunan kantor pelayanan terpadu	1	Unit	Sudah
12	Pembangunan shelter nelayan	2	Unit	Belum
13	Pembangunan kios pesisir/waserda	6	Unit	Sudah
14	Pembangunan Jaringan Drainase	1	Unit	Sudah
15	Pembangunan pagar keliling dermaga C	525	M	Sudah
16	Pembangunan SPDN 2 pompa	1	Unit	Sudah
17	Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian selatan	435	M1	Sudah
C	Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Utara			
1	Pembangunan revetment konstruksi rubble mound	1	Unit	Sudah
2	Pengurugan dan pematangan lahan areal pelabuhan utara (Dermaga D)	1	Unit	Belum

TANGKAPAN LAYAR APLIKASI SELARASKAN



selaraskan.id/Dashboard/search

Selaraskan V2.1.1 | Rabu, 08 April 2026 | 08:04:14 | PPS Cilacap

TATA KELOLA LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN 2026

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

2026 | Maret | Filter

Skor Pelabuhan

99.2 Skor Bulan Ini (Sangat Baik)

18 Jumlah Program Mandatory Dilaksanakan

5 Jumlah Program Voluntary Dilaksanakan

Total Skor per Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des

Last updated: 08/04/2026 10:00:00

Kualitas Udara		Kualitas Air Kolam Pelabuhan		Kualitas Air Limbah (PAL/won IPAL)	
Kebasaan	Tidak Bau	Kebasaan	Tidak Bau	Kebasaan	Tidak Bau
CO 1 Jam	27	pH	7	pH	6.7
PM 2.5	35	Kekeruhan	Cerah	BOD	63
PM 10	2	Lapisan Minyak	Nihil	COD	122

selaraskan.id/Mandatory

Selaraskan V2.1.1 | Rabu, 08 April 2026 | 08:06:07 | PPS Cilacap

2026 | Maret

Program Mandatory

Show 10 entries

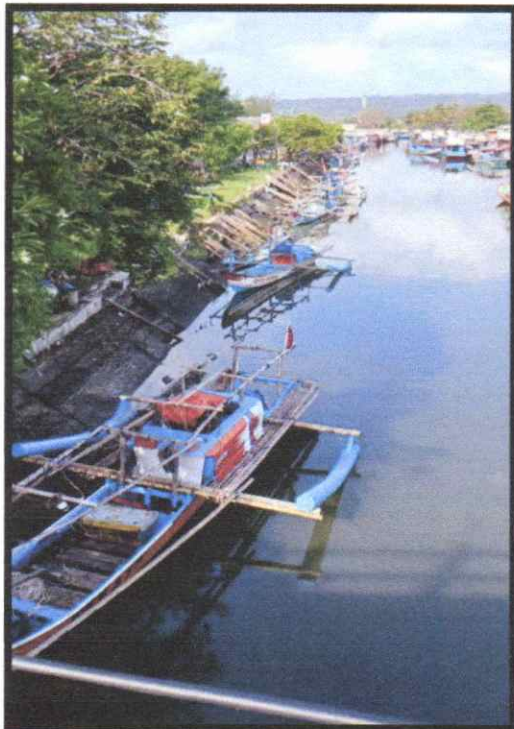
No.	Nama Program	Bobot	Periode Pengukuran	Jadwal Petugas	Anggaran (Rp.)	Evidence (hari)	Skor	Skor Terverifikasi	Aksi
1.	Kebersihan area pelabuhan	8	Harian	▲	66.556.416	22	8,00	4,40 Terverifikasi	+ Evidence
2.	Pengukuran volume sampah darat	6	Harian	▲	0	22	6,00	4,04 Terverifikasi	+ Evidence
3.	Pengukuran volume sampah laut	6	Harian	▲	0	22	6,00	1,83 Terverifikasi	+ Evidence
4.	Pemilahan sampah sesuai jenis	8	Harian	▲	0	22	8,00	4,40 Terverifikasi	+ Evidence
5.	Pengolahan sampah	6	Mingguan	▲	0	4	6,00	Belum Diverifikasi	+ Evidence

**DATA DUKUNG LAPORAN KINERJA
TIM KERJA TATA KELOLA SARANA DAN PRASARANA
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TRIWULAN I TAHUN 2026**

IKU: Pengendalian Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan di PPS Cilacap

A. Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Tengah

1. Perbaikan Revetment Kolam A



2. Pengerukan Kolam A (belum)
3. Pengerukan kolam B dan jalur pelayaran sampai kedalaman -3 dari LWS (-4,5 m dari MWL) (belum)
4. Perbaiki revetment kolam B (belum)
5. Pembangunan pasar ikan higienis (belum)
6. Peningkatan TPI Lama



7. Pembangunan Pos Jaga



8. Pembangunan Cold Storage



9. Pembuatan menara reservoir kapasitas 20m3



10. Pembangunan Area Parkir Pelabuhan



B. Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Selatan

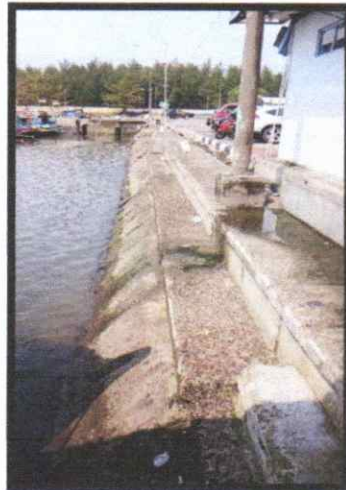
1. Pematangan lahan areal pelabuhan bagian Selatan



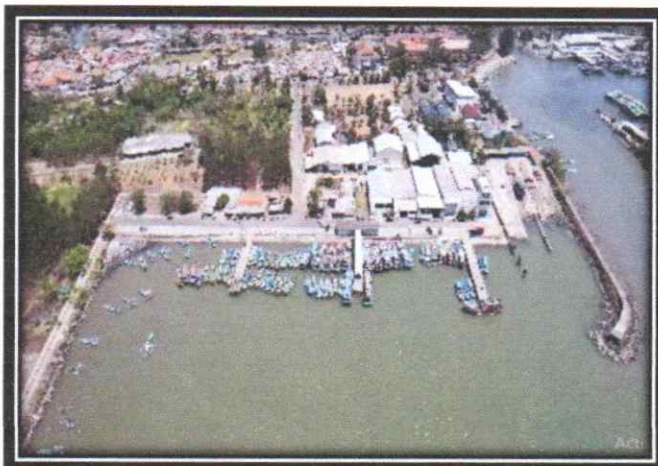
2. Pengerukan kolam C dan alur pelayaran sampai -5 LWS (-6,5m dari MWL) (belum)
3. Pengadaan kapal keruk kapasitas 100m³



4. Pembangunan Revetment dengan Konstruksi Concrete Sheet Pile



5. Pembangunan dermaga C dengan konstruksi jetty



6. Pembangunan transit shield



7. Pembangunan jaringan air bersih



8. Pembangunan MCK (belum)

9. Pembangunan IPAL (belum)

10. Pembangunan mushollah



11. Pembangunan kantor pelayanan terpadu



12. Pembangunan Shelter Nelayan

13. Pembangunan kios pesisir/waserda



14. Jaringan Drainase



15. Pembangunan pagar keliling dermaga C



16. Pembangunan SPDN 2 pompa



17. Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian selatan



C. Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Utara

1. Pembangunan Revetment Konstruksi Rubble Mount



2. Pengurugan dan pematangan lahan areal pelabuhan utara (Dermaga D)
3. Pembangunan cold storage (20m X 12m)





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.1661/DJPT.4/PI.310/IV/2026 14 April 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan I TA. 2026 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Versi 2.1, bersama ini kami sampaikan capaian dan hasil evaluasi SELARASKAN triwulan I TA. 2026 di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

1. Capaian implementasi SELARASKAN bulan Januari s.d Maret 2026 yang dievaluasi pada bulan Januari 2026 dengan skor setelah koreksi *evidence* oleh Tim Evaluasi SELARASKAN sebagai berikut:

NO	NAMA PELABUHAN	2026			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR			
1	PPN Pemangkat	96,42	94,98	95,67	287,06	95,69	Sangat Baik
2	PPN Sibolga	93,45	92,12	90,65	276,22	92,07	Sangat Baik
3	PPN Tanjung Pandan	91,22	91,17	93,44	275,83	91,94	Sangat Baik
4	PPN Kejawan	86,27	86,37	89,85	262,48	87,49	Sangat Baik
5	PPS Cilacap	85,85	86,12	88,84	260,82	86,94	Sangat Baik
6	PPN Kwandang	85,38	86,72	84,91	257,01	85,67	Sangat Baik
7	PPN Pengambengan	86,54	85,28	84,24	256,06	85,35	Sangat Baik
8	PPN Prigi	88,09	79,53	86,19	253,81	84,6	Sangat Baik
9	PPN Ternate	80,75	85,31	85,94	252	84	Sangat Baik
10	PPN Palabuhan Ratu	78,86	83,72	82,02	244,6	81,53	Sangat Baik
11	PPN Sungai Liat	83,25	80,19	80,96	244,4	81,47	Sangat Baik
12	PPS Bungus	75,5	82,82	82,51	240,83	80,28	Sangat Baik

NO	NAMA PELABUHAN	2026			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR			
13	PPP Teluk Batang	78,44	80,04	82,21	240,7	80,23	Sangat Baik
14	PPN Ambon	81,39	80,29	77,73	239,41	79,8	Baik
15	PPN Pekalongan	76,52	77,82	69,29	223,63	74,54	Baik
16	PPS Nizam Zachman	78,08	72,91	69,54	220,53	73,51	Baik
17	PPS Bitung	66,41	76,44	69,13	211,98	70,66	Baik
18	PPN Karangantu	56,01	71,01	77,97	204,99	68,33	Cukup
19	PPN Tual	58,2	68,23	74,71	201,14	67,05	Cukup
20	PPS Kendari	80,36	70,87	49,86	201,09	67,03	Cukup
21	PPS Belawan	67,29	60,26	68,81	196,36	65,45	Cukup
22	PPN Brondong	0	0,01	9,44	9,46	4,73	Kurang

2. Hasil evaluasi implementasi SELARASKAN bulan Januari s.d Maret 2026 secara detail dapat dilihat melalui akun SELARASKAN masing-masing UPT.
3. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dengan capaian nilai SELARASKAN SANGAT BAIK agar mempertahankan kinerjanya di bidang kebersihan dan lingkungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ady Candra

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran

Nomor : B.1661/DJPT.4/PI.310/IV/2026

Tanggal : 14 April 2026

DAFTAR PELABUHAN PERIKANAN

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
4. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
5. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
6. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
10. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
11. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambang
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ady Candra

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 618/PPSC/TU.140/IV/2026

Yth : Kepala Pelabuhan
Dari : Kepala Subbagian Umum
Hal : Data dukung capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026
Lampiran : 1 berkas
Tanggal : 06 April 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026, terlampir kami laporkan capaian kinerja Dukungan Manajerial sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)
 - Merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86	100	116,28

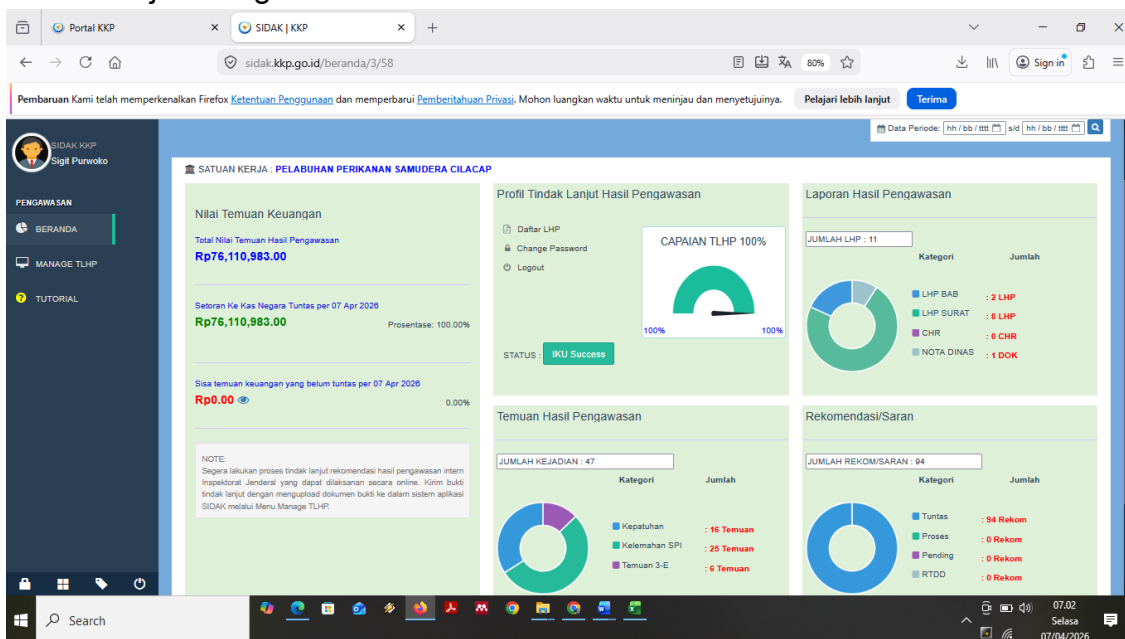
IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 116,28%.

Perbandingan capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah :

IKU	REALISASI TW I TA 2025	REALISASI TW I TA 2026	NAIK/TURUN (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	100	100	-

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun sebelumnya, capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini tetap pada capaian maksimal yakni 100% karena belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Terlampir disampaikan screenshot dari Aplikasi Sidak KKP yang menunjukkan seluruh rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti dengan status Tuntas.



Portal KKP SIDAK | KKP sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/3/58

Perubahan Kami telah memperkenalkan Firefox [Ketentuan Penggunaan](#) dan memperbarui [Pemberitahuan Privasi](#). Mohon luangkan waktu untuk meninjau dan menyetujuinya. [Pelajari lebih lanjut](#) [Terima](#)

SIDAK KKP Sigit Purwoko

HOME | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Data Periode: 01-Jan-2019 sid 07-Apr-2026

Jumlah Laporan : 11 Dokumen
 Jumlah Temuan : 47 Temuan
 Jumlah Rekomendasi : 14
 Nilai Keuangan : Rp176.110.983

Tuntas : 04 Rekomendasi
 Proses : 0 Rekomendasi
 Pending : 0 Rekomendasi
 Sisa Nilai Keuangan : Rp0

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
2520	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Evaluasi	R.1061TJ.2HP.470/V/2023	2023-05-03	Evaluasi Pengelolaan Penanaman Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap	TUNTAS	Q Detail
2495	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Evaluasi	R.971TJ.2HP.430/V/2023	2023-04-14	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2023	TUNTAS	Q Detail
1745	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Audit	R.1069TJ.2HP.240/XI/2021	2021-12-03	Hasil Proby Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di PPS Cilacap TA 2021 3 Desember 2021	TUNTAS	Q Detail
1313	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Reviu	4932TJHP.350/V/2021	2021-04-30	KAK dan RAB Pengada Jasa Konsultansi Penyusunan Addendum ANDAL Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap TA 2021	TUNTAS	Q Detail
1087	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Audit	4731TJHP.110/XI/2020	2020-12-10	Laporan Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap TA 2020	TUNTAS	Q Detail
1095	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Evaluasi	4475TJHP.440/VI/2020	2020-06-20	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAHJP pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap Tahun 2020	TUNTAS	Q Detail
893	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Reviu	4388TJHP.350/V/2020	2020-04-09	Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Perencanaan Pengembangan Jalan Khusus Komplek dan Perbaikan Gedung Kantor Pemaman (Kantor Lama) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap	TUNTAS	Q Detail
723	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Evaluasi	4222TJ.0HP.430/X/2019	2019-10-30	Evaluasi Pelayanan Publik PPS Cilacap TA 2019	TUNTAS	Q Detail
448	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Pemantauan	19.2.51TJ.2HP.550/V/2019	2019-02-19	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan TA 2019 di PPS Cilacap	TUNTAS	Q Detail

Portal KKP SIDAK | KKP sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/3/58

Perubahan Kami telah memperkenalkan Firefox [Ketentuan Penggunaan](#) dan memperbarui [Pemberitahuan Privasi](#). Mohon luangkan waktu untuk meninjau dan menyetujuinya. [Pelajari lebih lanjut](#) [Terima](#)

SIDAK KKP Sigit Purwoko

HOME | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Data Periode: 01-Jan-2019 sid 07-Apr-2026

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
2520	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Evaluasi	R.1061TJ.2HP.470/V/2023	2023-05-03	Evaluasi Pengelolaan Penanaman Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap	TUNTAS	Q Detail
2495	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Evaluasi	R.971TJ.2HP.430/V/2023	2023-04-14	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2023	TUNTAS	Q Detail
1745	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Audit	R.1069TJ.2HP.240/XI/2021	2021-12-03	Hasil Proby Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di PPS Cilacap TA 2021 3 Desember 2021	TUNTAS	Q Detail
1313	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Reviu	4932TJHP.350/V/2021	2021-04-30	KAK dan RAB Pengada Jasa Konsultansi Penyusunan Addendum ANDAL Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap TA 2021	TUNTAS	Q Detail
1087	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Audit	4731TJHP.110/XI/2020	2020-12-10	Laporan Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap TA 2020	TUNTAS	Q Detail
1095	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Evaluasi	4475TJHP.440/VI/2020	2020-06-20	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAHJP pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap Tahun 2020	TUNTAS	Q Detail
893	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Reviu	4388TJHP.350/V/2020	2020-04-09	Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Perencanaan Pengembangan Jalan Khusus Komplek dan Perbaikan Gedung Kantor Pemaman (Kantor Lama) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap	TUNTAS	Q Detail
723	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Evaluasi	4222TJ.0HP.430/X/2019	2019-10-30	Evaluasi Pelayanan Publik PPS Cilacap TA 2019	TUNTAS	Q Detail
448	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Pemantauan	19.2.51TJ.2HP.550/V/2019	2019-02-19	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan TA 2019 di PPS Cilacap	TUNTAS	Q Detail
338	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Evaluasi	10.12.20TJ.2TU.210/XI/2018	2018-12-10	Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada PPS Cilacap dan PPN Pelalangan	TUNTAS	Q Detail
209	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Evaluasi	4221TJ.0HP.470/X/2019	2019-10-30	LAPORAN HASIL EMULSIASI PNBP PADA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	TUNTAS	Q Detail

Showing 1 to 11 of 11 entries

SISTEM INFORMASI DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN
 Version 1.01, Design By: ITJEN KKP

2. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase

Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1)

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	77	100	129,87

Sampai dengan Triwulan I, PPS Cilacap melakukan revisi dan penyesuaian dalam perencanaan anggaran dan telah di tindaklanjuti dengan perubahan RUP dan semuanya sudah diinput dengan nilai 100%. Pagu PPS Cilacap pada awal DIPA adalah sebesar Rp. 23.746.662.000,- dan hasil revisi adalah sebesar Rp. 119.376.963.000,- dan telah terumumkan seluruhnya, sehingga tidak ada selisih dan prosentase RUP terumumkan sebesar 100%.

Perbandingan capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah :

IKU	REALISASI TW I TA 2025	REALISASI TW I TA 2026	NAIK/TURUN (%)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100	100	-

3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).
- Pelaksanaan SKM di PPS Cilacap dilakukan oleh Petugas Pelayanan Publik PPS Cilacap.
- Survei dilakukan secara periodik yaitu setiap triwulan dengan pendekatan kualitatif yang diukur menggunakan *Skala Likert*. *Skala Likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik.

Dengan menggunakan *skala Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pengumpulan data pada Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan melalui pengisian kuesioner (melalui aplikasi SKM) serta wawancara tatap muka kepada pengguna layanan.

- Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 (Sembilan) unsur sebagai berikut:
 1. Persyaratan
 2. Prosedur
 3. Waktu Pelayanan
 4. Biaya / Tarif
 5. Produk Layanan
 6. Kompetensi Pelaksana
 7. Perilaku Pelaksana
 8. Sarana dan Prasarana
 9. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat PPSCilacap Triwulan I Tahun 2026 adalah :

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,8	96,70	108,90

Hasil SKM pada Triwulan I Tahun 2026 ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 96,70 (kriteria A) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK.

Indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data sebanyak 111 responden dari 13 jenis pelayanan..

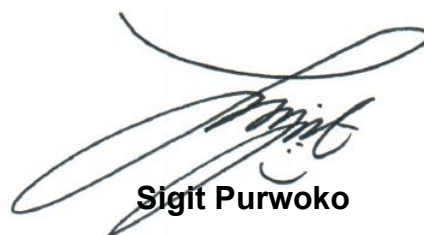
Perbandingan capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah :

IKU	REALISASI TW I TA 2025	REALISASI TW I TA 2026	NAIK/TURUN (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	94,15	96,70	2,71%

Dalam pelaksanaan SKM pada Triwulan I tahun 2026 ini dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan publik di PPS Cilacap secara umum menunjukkan kualitas kinerja pelayanan SANGAT BAIK;
- b. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai SANGAT BAIK. Namun demikian, dua unsur dengan nilai terendah tetap dimasukkan dalam prioritas perbaikan. Perbaikan tersebut bersifat sosialisasi karena secara teknis pelayanan publik yang dilaksanakan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Tiga unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah kemudahan persyaratan layanan, kemudahan prosedur, dan sarana prasarana.

Terkait dengan capain IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukungnya. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Sigit Purwoko

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 7 April 2026

Kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah keharusan hukum bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kementerian/lembaga/perangkat daerah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Pada tahun anggaran 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 156 (seratus lima puluh enam) satuan kerja Pengelola DIPA Aktif dan tersebar pada 10 (sepuluh) Unit Kerja Eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan kegiatan identifikasi belanja pengadaan yang dicatatkan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Target dari kegiatan tersebut adalah memperoleh persentase pengumuman RUP atau RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP 100% sebagaimana hal tersebut telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi *mandatory* penilaian.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					% Target IKU TW 1	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan		% Capaian	Keterangan
1	01	Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai	85.00	100.00%	Capaian target maksimal
2	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
3	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai	75.00	100.00%	Capaian target maksimal
4	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
5	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
6	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
7	02	Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan	86.00	99.99%	Capaian melebihi target
8	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan	77.00	99.99%	Capaian melebihi target
9	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan	76.00	99.48%	Capaian melebihi target
10	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan	77.00	97.79%	Capaian melebihi target
TOTAL			156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIH TARGET



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

(01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
	01	SEKRETARIAT JENDERAL	470,068,437,000	470,068,437,000			
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14,473,809,000	14,473,809,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	447,214,323,000	447,214,323,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,380,305,000	8,380,305,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	19,484,769,000	19,484,769,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	1,143,921,000	1,143,921,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan	
			TOTAL	PAGU PENGADAAN				TOTAL
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000		304,871,258,000			
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000		2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000		526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000		2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000		942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000		1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000		922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000		1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000		1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000		2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000		3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000		388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAkan	872,480,000		872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000		23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMKHP	222,620,591,000		222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000		228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000		132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000		264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000		1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000		753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000		683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan	
			TOTAL	PAGU PENGADAAN				TOTAL
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000		304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000		160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000		574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000		784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000		928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000		493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000		195,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000		380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000		171,170,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000		978,651,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000		996,270,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000		903,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000		748,892,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	858,250,000		858,250,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000		390,073,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000		397,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000		1,284,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000		754,512,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000		833,020,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	508,760,000		508,760,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TJ. BALAI ASAHAN	726,335,000		726,335,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000		705,319,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000		1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
08	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT		50,518,334,000				
1	417154	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	50,518,334,000		50,518,334,000	0	100.00% Sudah Sesuai

(05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		758,474,978,000		758,474,978,000		
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,299,569,000		20,299,569,000	0	100.00% Sudah Sesuai
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	16,681,384,000		16,681,384,000	0	100.00% Sudah Sesuai
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	20,840,752,000		20,840,752,000	0	100.00% Sudah Sesuai
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000		18,809,471,000	0	100.00% Sudah Sesuai
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,211,781,000		15,211,781,000	0	100.00% Sudah Sesuai
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000		21,461,321,000	0	100.00% Sudah Sesuai
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	549,904,060,000		549,904,060,000	0	100.00% Sudah Sesuai
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000		16,852,683,000	0	100.00% Sudah Sesuai
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,740,296,000		18,740,296,000	0	100.00% Sudah Sesuai
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,711,004,000		9,711,004,000	0	100.00% Sudah Sesuai
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,617,665,000		7,617,665,000	0	100.00% Sudah Sesuai
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	13,622,708,000		13,622,708,000	0	100.00% Sudah Sesuai
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	12,492,975,000		12,492,975,000	0	100.00% Sudah Sesuai
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,671,447,000		9,671,447,000	0	100.00% Sudah Sesuai
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,557,862,000		6,557,862,000	0	100.00% Sudah Sesuai

(12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan – 42 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan	
			TOTAL	PAGU PENGADAAN				TOTAL
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000		326,938,554,000			
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	990,954,000		990,954,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	403827	BBR BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,529,483,000		6,529,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	403835	BBR PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	4,985,346,000		4,985,346,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	403836	BBR SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,643,813,000		1,643,813,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	238755	BPPP AMBON	16,013,469,000		16,013,469,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	238762	BPPP BANYUWANGI	6,245,814,000		6,245,814,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239260	BPPP BITUNG	12,257,656,000		12,257,656,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	238741	BPPP MEDAN	4,518,648,000		4,518,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239188	BPPP TEGAL	39,950,140,000		39,950,140,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	653526	BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI	5,196,446,000		5,196,446,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,868,988,000		2,868,988,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	3,231,545,000		3,231,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,104,748,000		2,104,748,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	403828	BRP BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,817,145,000		6,817,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	403829	BRP BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,759,499,000		7,759,499,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,093,050,000		1,093,050,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	403823	BRP PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,931,859,000		6,931,859,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,466,192,000		1,466,192,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,219,765,000		1,219,765,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	928,933,000		928,933,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,701,958,000		1,701,958,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000		326,938,554,000		
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,730,900,000		1,730,900,000	0	100.00% Sudah Sesuai
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000		57,281,778,000	0	100.00% Sudah Sesuai
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000		2,633,984,000	0	100.00% Sudah Sesuai
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	3,306,385,000		3,306,385,000	0	100.00% Sudah Sesuai
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,655,559,000		12,655,559,000	0	100.00% Sudah Sesuai
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,047,982,000		2,047,982,000	0	100.00% Sudah Sesuai
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	19,357,989,000		19,357,989,000	0	100.00% Sudah Sesuai
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,823,939,000		1,823,939,000	0	100.00% Sudah Sesuai
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000		2,467,483,000	0	100.00% Sudah Sesuai
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	18,089,136,000		18,089,136,000	0	100.00% Sudah Sesuai
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,759,647,000		5,759,647,000	0	100.00% Sudah Sesuai
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,980,873,000		7,980,873,000	0	100.00% Sudah Sesuai
34	652009	SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG	4,715,445,000		4,715,445,000	0	100.00% Sudah Sesuai
35	427551	SUPM LADONG	2,407,153,000		2,407,153,000	0	100.00% Sudah Sesuai
36	427573	SUPM PARIAMAN	4,821,203,000		4,821,203,000	0	100.00% Sudah Sesuai
37	427582	SUPM PONTIANAK	1,668,251,000		1,668,251,000	0	100.00% Sudah Sesuai
38	427630	SUPM SORONG	1,336,284,000		1,336,284,000	0	100.00% Sudah Sesuai
39	237373	SUPM TEGAL	4,040,473,000		4,040,473,000	0	100.00% Sudah Sesuai
40	427618	SUPM WAEHERU	2,018,843,000		2,018,843,000	0	100.00% Sudah Sesuai
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PPSDM KP	34,580,706,000		34,580,706,000	0	100.00% Sudah Sesuai
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	1,759,090,000		1,759,090,000	0	100.00% Sudah Sesuai

 (03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		6,234,837,443,000	6,234,837,443,000			
1	239150	BBPI SEMARANG	4,266,256,000	4,266,256,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622461	PPN AMBON	2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427692	PPN BRONDONG	5,550,267,000	5,550,267,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	239146	PPN KARANGANTU	4,975,865,000	4,975,865,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622482	PPN KEJAWANAN	76,447,767,000	76,447,767,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	310719	PPN KWANDANG	3,808,313,000	3,808,313,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239171	PPN PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	560393	PPN PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239991	PPN PEMANGKAT	2,169,663,000	2,169,663,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	633693	PPN PENGAMBENGAN	277,833,054,000	277,833,054,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	427670	PPN PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	560401	PPN SIBOLGA	3,526,343,000	3,526,343,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	239214	PPN SUNGAILIAT	3,715,198,000	3,715,198,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	239221	PPN TANJUNG PANDAN	1,437,176,000	1,437,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	427661	PPN TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	622475	PPN TUAL	2,121,021,000	2,121,021,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	239235	PPP TELUK BATANG	2,044,222,000	2,044,222,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	427655	PPS BELAWAN	8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	633707	PPS BITUNG	10,659,664,000	10,659,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	531488	PPS BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	518117	PPS CILACAP	10,461,664,000	10,461,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	537695	PPS KENDARI	43,633,886,000	43,633,886,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	537611	PPS NIZAM ZACHMAN	29,534,068,000	29,534,068,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,724,781,854,000	5,724,781,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
02	INSPEKTORAT JENDERAL		15,127,743,000	15,127,914,000			
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	15,127,743,000	15,127,914,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan

(06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN		158,069,244,000	158,066,570,000			
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,347,589,000	7,347,589,000	0	100.0000%	Sudah Sesuai
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	150,721,655,000	150,718,981,000	2,674,000	100.0018%	Lebih Terumumkan

(07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN		1,170,166,198,000	1,169,007,198,000			
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,455,753,000	6,455,753,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,199,403,000	3,199,403,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000	2,736,010,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	477456	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	2,970,613,000	2,970,613,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,154,804,419,000	1,153,645,419,000	1,159,000,000	100.10%	Lebih Terumumkan

(04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		897,634,697,000	917,960,850,000			
1	239192	BBPB AIR PAYAU JEPARA	33,776,312,000	33,776,312,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	238734	BBPB AIR TAWAR SUKABUMI	26,301,351,000	26,301,351,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427706	BBPB LAUT LAMPUNG	17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	445393	BLU PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	126,396,102,000	126,396,102,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	567800	BPKIL SERANG	3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	567350	BPB AIR PAYAU SITUBONDO	48,941,145,000	48,941,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	567680	BPB AIR PAYAU TAKALAR	15,771,406,000	15,771,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	567385	BPB AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567584	BPB AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	237657	BPB AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	538911	BPB AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	567720	BPB LAUT AMBON	14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	567474	BPB LAUT BATAM	9,292,277,000	9,292,277,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	567762	BPB LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	445394	BPI UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGSEM	6,052,854,000	6,052,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	524,099,649,000	544,425,802,000	(20,326,153,000)	96.27%	Kurang Terumumkan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 939/DJPT.1/OT.710/IV/2026

Yth. : 1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
4. Direktur Usaha Penangkapan Ikan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Dari : Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup
Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan I Tahun 2026

Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Validasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap periode pelaksanaan Triwulan I tahun 2026, bersama ini kami sampaikan hasil sebagai berikut:

1. Validasi dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP;
2. Hasil SKM diambil berdasarkan validasi data SKM Triwulan I Tahun 2026 yang dilakukan tanggal 1 s.d. 7 April 2026;
3. Hasil penyelenggaraan SKM Ditjen Perikanan Tangkap periode Triwulan I Tahun 2026 per Unit Pelayanan Publik (UPP) terlampir (lampiran II).
4. Analisis atas hasil SKM Ditjen Perikanan Tangkap dijabarkan berikut:
 - a. Target nilai SKM sebagaimana IKU Ditjen Perikanan Tangkap adalah 88,80;
 - b. Jumlah responden sebanyak 4.089 dengan hasil SKM **93,56** (kategori mutu pelayanan **Sangat Baik**);
 - c. Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 41 layanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP;
 - d. Nilai SKM tertinggi diperoleh PPN Sibolga dengan nilai sebesar 97,58. Sedangkan, nilai terendah diperoleh Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dengan nilai 89,02
 - e. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultasi, U9 Kualitas Isi/Sarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,74;

5. Atas hasil SKM tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menghimbau agar masing-masing UPP untuk dapat:
 - a. Mengidentifikasi 3 (tiga) unsur terendah dari U1 s.d. U9 dan menjadikan unsur tersebut sebagai bahan dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dalam laporan;
 - b. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP;
 - c. Memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 - d. Menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi hasil SKM Triwulan I Tahun 2026 melalui media sosial dan sarana prasarana yang tersedia paling lambat tanggal **14 April 2026**.
 - e. memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh pada menu Download pada Tools SKM KKP.
6. Rincian data SKM berdasarkan hasil validasi Triwulan I Tahun 2026 dapat diunduh secara mandiri melalui menu Laporan Data Detail pada Tools SKM KKP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara , kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran

Nomor : 939/DJPT.1/OT.710/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	83	3,687	3,675	3,723	3,759	3,711	3,675	3,699	3,711	3,711	92,64
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	68	3,735	3,809	3,765	3,750	3,706	3,603	3,779	3,824	3,794	93,79
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,786	3,714	3,857	3,714	95,44
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	242	3,595	3,587	3,562	3,562	3,558	3,562	3,554	3,537	3,529	89,02
PPN Ambon	99	3,758	3,859	3,747	3,778	3,747	3,838	3,828	3,747	3,818	94,78
PPN Brondong	210	3,776	3,738	3,710	3,695	3,724	3,629	3,686	3,519	3,429	91,40
PPN Karangantu	228	3,746	3,737	3,719	3,807	3,702	3,719	3,741	3,627	3,526	92,57
PPN Kejawanan	153	3,654	3,725	3,686	3,654	3,634	3,699	3,706	3,634	3,614	91,68
PPN Kwandang	450	3,878	3,896	3,816	3,842	3,776	3,782	3,809	3,789	3,773	95,44
PPN Palabuhanratu	173	3,711	3,723	3,665	3,642	3,717	3,676	3,711	3,682	3,723	92,36
PPN Pekalongan	86	3,907	3,837	3,860	3,907	3,814	3,884	3,907	3,849	3,663	96,19
PPN Pemangkat	141	3,801	3,801	3,794	3,844	3,809	3,780	3,830	3,837	3,823	95,33
PPN Pengambang	164	3,652	3,652	3,591	3,683	3,659	3,549	3,659	3,616	3,579	90,67
PPN Prigi	129	3,744	3,705	3,674	3,690	3,690	3,659	3,713	3,682	3,698	92,38

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
PPN Sibolga	443	3,910	3,901	3,901	3,901	3,907	3,901	3,907	3,896	3,905	97,58
PPN Sungailiat	179	3,832	3,849	3,816	3,782	3,810	3,721	3,743	3,754	3,782	94,69
PPN Tanjung Pandan	52	3,942	3,865	3,788	3,904	3,846	3,827	3,885	3,846	3,808	96,42
PPN Ternate	129	3,760	3,736	3,729	3,713	3,729	3,736	3,791	3,744	3,744	93,56
PPN Tual	42	3,786	3,619	3,619	3,595	3,667	3,595	3,667	3,524	3,548	90,61
PPP Teluk Batang	46	3,761	3,783	3,761	3,804	3,870	3,783	3,804	3,870	3,826	95,17
PPS Belawan	123	3,650	3,634	3,634	3,667	3,602	3,626	3,634	3,626	3,553	90,63
PPS Bitung	313	3,757	3,728	3,700	3,693	3,719	3,684	3,706	3,684	3,677	92,63
PPS Bungus	133	3,917	3,639	3,917	3,647	3,902	3,632	3,902	3,677	3,887	94,78
PPS Cilacap	111	3,901	3,901	3,847	3,874	3,838	3,838	3,874	3,856	3,883	96,70
PPS Kendari	63	3,857	3,841	3,841	3,825	3,841	3,762	3,825	3,794	3,794	95,50
PPS Nizam Zachman	215	3,698	3,670	3,656	3,600	3,637	3,595	3,660	3,633	3,595	90,96
DJPT	4089	3,781	3,767	3,746	3,748	3,745	3,717	3,758	3,716	3,705	93,56

1.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal KKP
2. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
3. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 13 April 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan I Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (Triwulan I Tahun 2026).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan I Tahun 2026 lingkup KKP sebesar 92,78% (tuntas 604 dari 651 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
4. Para Kepala Badan lingkup KKP
5. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal KKP

Lampiran
 Nomor : 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026
 Tanggal : 13 April 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup KKP” Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	39	39	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	103	88	85,44%	15	14,56%
3	Ditjen PRL	2	2	100,00%	0	0,00%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	84	63	75,00%	21	25,00%
5	Ditjen PSDKP	73	73	100,00%	0	0,00%
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	118	115	97,46%	3	2,54%
7	BPPSDMKP	49	49	100,00%	0	0,00%
8	Ditjen PDSPKP	28	25	89,29%	3	10,71%
9	BPPMHKP	150	145	96,67%	5	3,33%
10	Itjen	5	5	100%	0	0,00%
TOTAL		651	604	92,78%	47	7,22%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 1 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB sebesar **99,75%**. (daftar rekapitulasi terampir);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					% Target IKU TW 1	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan		% Capaian	Keterangan
1	01	Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai	85.00	100.00%	Capaian target maksimal
2	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
3	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai	75.00	100.00%	Capaian target maksimal
4	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
5	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
6	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
7	02	Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan	77.00	99.99%	Capaian melebihi target
8	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan	77.00	99.99%	Capaian melebihi target
9	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan	76.00	99.48%	Capaian melebihi target
10	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan	77.00	97.79%	Capaian melebihi target
TOTAL			156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIH TARGET



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

(01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
	01	SEKRETARIAT JENDERAL	470,068,437,000	470,068,437,000			
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14,473,809,000	14,473,809,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	447,214,323,000	447,214,323,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,380,305,000	8,380,305,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	19,484,769,000	19,484,769,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	1,143,921,000	1,143,921,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan	
			TOTAL	PAGU PENGADAAN				TOTAL
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000		304,871,258,000			
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000		2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000		526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000		2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000		942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000		1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000		922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000		1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000		1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000		2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000		3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000		388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000		872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000		23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMKHP	222,620,591,000		222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000		228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000		132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000		264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000		1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000		753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000		683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan	
			TOTAL	PAGU PENGADAAN				TOTAL
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000		304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000		160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000		574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000		784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000		928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000		493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000		195,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000		380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000		171,170,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000		978,651,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000		996,270,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000		903,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000		748,892,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	858,250,000		858,250,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000		390,073,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000		397,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000		1,284,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000		754,512,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000		833,020,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	508,760,000		508,760,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TJ. BALAI ASAHAN	726,335,000		726,335,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000		705,319,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000		1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
08	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT		50,518,334,000				
1	417154	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	50,518,334,000		0	100.00%	Sudah Sesuai

(05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		758,474,978,000				
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,299,569,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	16,681,384,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	20,840,752,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,211,781,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	549,904,060,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,740,296,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,711,004,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,617,665,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	13,622,708,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	12,492,975,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,671,447,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,557,862,000		0	100.00%	Sudah Sesuai

 (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan – 42 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000	326,938,554,000			
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	990,954,000	990,954,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	403827	BBR BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	403835	BBR PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	4,985,346,000	4,985,346,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	403836	BBR SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,643,813,000	1,643,813,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	238755	BPPP AMBON	16,013,469,000	16,013,469,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	238762	BPPP BANYUWANGI	6,245,814,000	6,245,814,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239260	BPPP BITUNG	12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	238741	BPPP MEDAN	4,518,648,000	4,518,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239188	BPPP TEGAL	39,950,140,000	39,950,140,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	653526	BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI	5,196,446,000	5,196,446,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,868,988,000	2,868,988,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	3,231,545,000	3,231,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,104,748,000	2,104,748,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	403828	BRP BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,817,145,000	6,817,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	403829	BRP BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,759,499,000	7,759,499,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,093,050,000	1,093,050,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	403823	BRP PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,931,859,000	6,931,859,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,466,192,000	1,466,192,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,219,765,000	1,219,765,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	928,933,000	928,933,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,701,958,000	1,701,958,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000	326,938,554,000			
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,730,900,000	1,730,900,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000	57,281,778,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000	2,633,984,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	3,306,385,000	3,306,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,655,559,000	12,655,559,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,047,982,000	2,047,982,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	19,357,989,000	19,357,989,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,823,939,000	1,823,939,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000	2,467,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	18,089,136,000	18,089,136,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,759,647,000	5,759,647,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,980,873,000	7,980,873,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	652009	SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG	4,715,445,000	4,715,445,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	427551	SUPM LADONG	2,407,153,000	2,407,153,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	427573	SUPM PARIAMAN	4,821,203,000	4,821,203,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	427582	SUPM PONTIANAK	1,668,251,000	1,668,251,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	427630	SUPM SORONG	1,336,284,000	1,336,284,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	237373	SUPM TEGAL	4,040,473,000	4,040,473,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	427618	SUPM WAEHERU	2,018,843,000	2,018,843,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PPSDM KP	34,580,706,000	34,580,706,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	1,759,090,000	1,759,090,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		6,234,837,443,000	6,234,837,443,000			
1	239150	BBPI SEMARANG	4,266,256,000	4,266,256,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622461	PPN AMBON	2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427692	PPN BRONDONG	5,550,267,000	5,550,267,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	239146	PPN KARANGANTU	4,975,865,000	4,975,865,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622482	PPN KEJAWANAN	76,447,767,000	76,447,767,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	310719	PPN KWANDANG	3,808,313,000	3,808,313,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239171	PPN PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	560393	PPN PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239991	PPN PEMANGKAT	2,169,663,000	2,169,663,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	633693	PPN PENGAMBENGAN	277,833,054,000	277,833,054,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	427670	PPN PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	560401	PPN SIBOLGA	3,526,343,000	3,526,343,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	239214	PPN SUNGAILIAT	3,715,198,000	3,715,198,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	239221	PPN TANJUNG PANDAN	1,437,176,000	1,437,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	427661	PPN TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	622475	PPN TUAL	2,121,021,000	2,121,021,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	239235	PPP TELUK BATANG	2,044,222,000	2,044,222,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	427655	PPS BELAWAN	8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	633707	PPS BITUNG	10,659,664,000	10,659,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	531488	PPS BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	518117	PPS CILACAP	10,461,664,000	10,461,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	537695	PPS KENDARI	43,633,886,000	43,633,886,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	537611	PPS NIZAM ZACHMAN	29,534,068,000	29,534,068,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,724,781,854,000	5,724,781,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
02		INSPEKTORAT JENDERAL	15,127,743,000				
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	15,127,743,000		15,127,914,000	(171,000)	99.9989% Kurang Terumumkan

(06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
06		DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	158,069,244,000		158,066,570,000		
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,347,589,000		7,347,589,000	0	100.0000% Sudah Sesuai
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	150,721,655,000		150,718,981,000	2,674,000	100.0018% Lebih Terumumkan

(07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
07		DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	1,170,166,198,000		1,169,007,198,000		
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,455,753,000		6,455,753,000	0	100.00% Sudah Sesuai
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,199,403,000		3,199,403,000	0	100.00% Sudah Sesuai
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000		2,736,010,000	0	100.00% Sudah Sesuai
4	477456	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	2,970,613,000		2,970,613,000	0	100.00% Sudah Sesuai
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,154,804,419,000		1,153,645,419,000	1,159,000,000	100.10% Lebih Terumumkan

(04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		897,634,697,000	917,960,850,000			
1	239192	BBPB AIR PAYAU JEPARA	33,776,312,000	33,776,312,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	238734	BBPB AIR TAWAR SUKABUMI	26,301,351,000	26,301,351,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427706	BBPB LAUT LAMPUNG	17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	445393	BLU PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	126,396,102,000	126,396,102,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	567800	BPKIL SERANG	3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	567350	BPB AIR PAYAU SITUBONDO	48,941,145,000	48,941,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	567680	BPB AIR PAYAU TAKALAR	15,771,406,000	15,771,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	567385	BPB AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567584	BPB AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	237657	BPB AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	538911	BPB AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	567720	BPB LAUT AMBON	14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	567474	BPB LAUT BATAM	9,292,277,000	9,292,277,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	567762	BPB LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	445394	BPI UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,854,000	6,052,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	524,099,649,000	544,425,802,000	(20,326,153,000)	96.27%	Kurang Terumumkan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 968/DJPT.1/OT.710/IV/2026

Yth. : 1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
4. Direktur Usaha Penangkapan Ikan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Dari : Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Perubahan Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan I Tahun 2026

Tanggal : 9 April 2026

Menindaklanjuti nota dinas Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, nomor 939/DJPT.1/OT.710/IV/2026, tanggal 7 April 2026 perihal Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan perubahan hasil validasi SKM Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Validasi dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP;
2. Hasil SKM diambil berdasarkan validasi data SKM Triwulan I Tahun 2026 yang dilakukan tanggal 1 s.d. 7 April 2026;
3. Hasil penyelenggaraan SKM Ditjen Perikanan Tangkap periode Triwulan I Tahun 2026 per Unit Pelayanan Publik (UPP) terlampir (lampiran II).
4. Analisis atas hasil SKM Ditjen Perikanan Tangkap dijabarkan berikut:
 - a. Target nilai SKM sebagaimana IKU Ditjen Perikanan Tangkap adalah 88,80;
 - b. Jumlah responden sebanyak 4.088 dengan hasil SKM **93,57** (kategori mutu pelayanan **Sangat Baik**);
 - c. Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 41 layanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP;
 - d. Nilai SKM tertinggi diperoleh PPN Sibolga dengan nilai sebesar 97,58. Sedangkan, nilai terendah diperoleh Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dengan nilai 89,02
 - e. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan

- Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultasi, U9 Kualitas Isi/Sarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,74;
5. Atas hasil SKM tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menghimbau agar masing-masing UPP untuk dapat:
 - a. Mengidentifikasi 3 (tiga) unsur terendah dari U1 s.d. U9 dan menjadikan unsur tersebut sebagai bahan dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dalam laporan;
 - b. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP;
 - c. Memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 - d. Menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi hasil SKM Triwulan I Tahun 2026 melalui media sosial dan sarana prasarana yang tersedia paling lambat tanggal **14 April 2026**.
 - e. memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh pada menu Download pada Tools SKM KKP.
 6. Rincian data SKM berdasarkan hasil validasi Triwulan I Tahun 2026 dapat diunduh secara mandiri melalui menu Laporan Data Detail pada Tools SKM KKP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara , kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran

Nomor : 968/DJPT.1/OT.710/IV/2026

Tanggal : 9 April 2026

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	83	3,687	3,675	3,723	3,759	3,711	3,675	3,699	3,711	3,711	92,64
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	68	3,735	3,809	3,765	3,750	3,706	3,603	3,779	3,824	3,794	93,79
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,786	3,714	3,857	3,714	95,44
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	242	3,595	3,587	3,562	3,562	3,558	3,562	3,554	3,537	3,529	89,02
PPN Ambon	98	3,776	3,878	3,765	3,806	3,755	3,867	3,837	3,765	3,816	95,18
PPN Brondong	210	3,776	3,738	3,710	3,695	3,724	3,629	3,686	3,519	3,429	91,40
PPN Karangantu	228	3,746	3,737	3,719	3,807	3,702	3,719	3,741	3,627	3,526	92,57
PPN Kejawanan	153	3,654	3,725	3,686	3,654	3,634	3,699	3,706	3,634	3,614	91,68
PPN Kwandang	450	3,878	3,896	3,816	3,842	3,776	3,782	3,809	3,789	3,773	95,44
PPN Palabuhanratu	173	3,711	3,723	3,665	3,642	3,717	3,676	3,711	3,682	3,723	92,36
PPN Pekalongan	86	3,907	3,837	3,860	3,907	3,814	3,884	3,907	3,849	3,663	96,19
PPN Pemangkat	141	3,801	3,801	3,794	3,844	3,809	3,780	3,830	3,837	3,823	95,33
PPN Pengambang	164	3,652	3,652	3,591	3,683	3,659	3,549	3,659	3,616	3,579	90,67
PPN Prigi	129	3,744	3,705	3,674	3,690	3,690	3,659	3,713	3,682	3,698	92,38

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
PPN Sibolga	443	3,910	3,901	3,901	3,901	3,907	3,901	3,907	3,896	3,905	97,58
PPN Sungailiat	179	3,832	3,849	3,816	3,782	3,810	3,721	3,743	3,754	3,782	94,69
PPN Tanjung Pandan	52	3,942	3,865	3,788	3,904	3,846	3,827	3,885	3,846	3,808	96,42
PPN Ternate	129	3,760	3,736	3,729	3,713	3,729	3,736	3,791	3,744	3,744	93,56
PPN Tual	42	3,786	3,619	3,619	3,595	3,667	3,595	3,667	3,524	3,548	90,61
PPP Teluk Batang	46	3,761	3,783	3,761	3,804	3,870	3,783	3,804	3,870	3,826	95,17
PPS Belawan	123	3,650	3,634	3,634	3,667	3,602	3,626	3,634	3,626	3,553	90,63
PPS Bitung	313	3,757	3,728	3,700	3,693	3,719	3,684	3,706	3,684	3,677	92,63
PPS Bungus	133	3,917	3,639	3,917	3,647	3,902	3,632	3,902	3,677	3,887	94,78
PPS Cilacap	111	3,901	3,901	3,847	3,874	3,838	3,838	3,874	3,856	3,883	96,70
PPS Kendari	63	3,857	3,841	3,841	3,825	3,841	3,762	3,825	3,794	3,794	95,50
PPS Nizam Zachman	215	3,698	3,670	3,656	3,600	3,637	3,595	3,660	3,633	3,595	90,96
DJPT	4088	3,781	3,767	3,747	3,749	3,745	3,717	3,758	3,717	3,705	93,57

1.

BIMBINGAN TEKNIS

PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

📅 20 FEBRUARI 2026 ⋮ ⌚ 09.00 WIB S.D SELESAI

TAUTAN ZOOM

📺 https://s.id/BIMTEK_KKP20feb

FREE E-SERTIFIKAT



Ber...

GARUDA

Gerakan AI untuk Resiliensi dan Kedaulatan Nasional



GERAKAN NASIONAL

145.000+

APARATUR NEGARA DIGITAL,
MENUJU *SMART GOVERNANCE*

Collaborating
Partner



100K
Learners

100+
Partners

800+
AI Idea



Sertifikat
Webinar
(3 JP)



Sertifikat
Pelatihan di
LMS (8 JP)

